



# Laporan Keuangan Audited Bagian Anggaran 055

**Tahun Anggaran 2021**

**Kementerian PPN/Bappenas**

LAPORAN KEUANGAN *AUDITED*  
BAGIAN ANGGARAN 055  
TAHUN ANGGARAN 2021

# **BAGIAN ANGGARAN 055**

**LAPORAN KEUANGAN**  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**  
*(Audited)*

Jalan Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310


Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kementerian PPN/Bappenas. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, Mei 2022

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 



  
Suharso Monoarfa

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GRAFIK.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
PERNYATAAN TELAH DIREVIU .....	x
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB .....	x
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN .....	1
I.    LAPORAN REALISASI ANGGARAN .....	3
II.   NERACA.....	4
III.  LAPORAN OPERASIONAL .....	5
IV.  LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS .....	6
V.   CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN .....	7
A.  Penjelasan Umum.....	7
B.  Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran .....	21
C.  Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca .....	47
D.  Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional.....	91
E.  Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas .....	109
F.  Pengungkapan Penting Lainnya.....	120

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kementerian PPN/Bappenas. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, Mei 2022

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



Suharso Monoarfa



KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GRAFIK.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
PERNYATAAN TELAH DIREVIU .....	x
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB .....	x
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN .....	1
I.    LAPORAN REALISASI ANGGARAN .....	3
II.   NERACA.....	4
III.  LAPORAN OPERASIONAL .....	5
IV.  LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS .....	6
V.   CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN .....	7
A.  Penjelasan Umum.....	7
B.  Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran .....	21
C.  Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca .....	47
D.  Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional.....	91
E.  Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas .....	109
F.  Pengungkapan Penting Lainnya.....	120

Tabel 1 Daftar Satker Kementerian PPN/Bappenas TA 2021 .....	10
Tabel 2 Penggolongan Kualitas Piutang.....	14
Tabel 3 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap.....	18
Tabel 4 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud .....	19
Tabel 5 Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja .....	21
Tabel 6 Rincian Anggaran per Program per 31 Desember 2021.....	21
Tabel 7 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2021 .....	22
Tabel 8 Perbandingan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 .....	22
Tabel 9 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja .....	23
Tabel 10 Rincian Belanja Berdasarkan Program per 31 Desember 2021 .....	24
Tabel 11 Rincian Belanja Berdasarkan Bagian Anggaran .....	25
Tabel 12 Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2021 .....	25
Tabel 13 Total Realisasi Hibah Langsung Luar Negeri Kas .....	26
Tabel 14 Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai .....	27
Tabel 15 Perbandingan Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 .....	27
Tabel 16 Kesalahan MAK Belanja Persediaan Barang Konsumsi dengan Belanja Kepeluan Perkantoran .....	28
Tabel 17 Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 per 31 Desember 2021.....	28
Tabel 18 Realisasi Belanja Barang Penanganan Pandemi .....	29
Tabel 19 Realisasi Belanja Jasa Penanganan Pandemi Covid-19 .....	29
Tabel 20 Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Penanganan Pandemi Covid-19 per 31 Desember 2021 .....	30
Tabel 21 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi Covid-19 per 31 Desember 2021 .....	30
Tabel 22 Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 .....	31
Tabel 23 Kesalahan MAK Belanja Ekstrakomtable dengan MAK Belanja Modal .....	32
Tabel 24 Kesalahan Belanja Intrakomtable .....	32
Tabel 25 Kesalahan MAK Belanja Belanja Modal dengan MAK Belanja Ekstrakomtable .....	33
Tabel 26 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin.....	33
Tabel 27 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 .....	34
Tabel 28 Kesalahan MAK Belanja Modal Gedung dan Bangunan dengan MAK Belanja Modal Lainnya.....	34
Tabel 29 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 .....	35
Tabel 30 Perbandingan Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran.....	47
Tabel 31 Rincian Pembagian Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah (UP KKP) TA 2021 .....	48
Tabel 32 Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 .....	48
Tabel 33 Perbandingan Rincian Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 .....	49
Tabel 34 Rincian Data Karyasiswa .....	50
Tabel 35 Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 .....	50
Tabel 36 Perbandingan Rincian Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 .....	51



Tabel 37 Perbandingan Rincian Penyisihan Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 .....	51
Tabel 38 Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2021 .....	52
Tabel 39 Perbandingan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.....	52
Tabel 40 Perbandingan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih BL TGR/TGR per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 .....	53
Tabel 41 Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-BL TGR/TGR.....	53
Tabel 42 Perbandingan Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 .....	54
Tabel 43 Mutasi Persediaan .....	54
Tabel 44 Saldo Persediaan pada Satuan Kerja .....	55
Tabel 45 Mutasi Barang Konsumsi .....	57
Tabel 46 Mutasi Bahan untuk Pemeliharaan .....	59
Tabel 47 Mutasi Suku Cadang .....	60
Tabel 48 Mutasi Pita Cukai, Materai dan Leges .....	61
Tabel 49 Mutasi Tanah dan Bangunan untuk Dijual atau Diserahkan Kepada Masyarakat .....	62
Tabel 50 Mutasi Hewan dan Tanaman untuk Dijual atau Diserahkan Kepada Masyarakat .....	62
Tabel 51 Mutasi Peralatan dan Mesin untuk Dijual atau Diserahkan Kepada Masyarakat .....	63
Tabel 52 Mutasi Aset Lain-lain untuk Dijual atau Diserahkan Kepada Masyarakat .....	65
Tabel 53 Mutasi Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual atau Diserahkan Kepada Masyarakat .....	65
Tabel 54 Mutasi Bahan Baku.....	66
Tabel 55 Mutasi Persediaan Lainnya.....	67
Tabel 56 Perbandingan Tanah per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 .....	67
Tabel 57 Mutasi Aset Tetap Berupa Tanah .....	68
Tabel 58 Rincian Saldo Tanah per 31 Desember 2021 .....	68
Tabel 59 Perbandingan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 .....	70
Tabel 60 Mutasi Aset Tetap Berupa Peralatan dan Mesin.....	70
Tabel 61 Perbandingan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 .....	74
Tabel 62 Mutasi Transaksi Terhadap Gedung dan Bangunan .....	75
Tabel 63 Perbandingan Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 .....	76
Tabel 64 Mutasi Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan .....	76
Tabel 65 Perbandingan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 .....	77
Tabel 66 Rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 .....	77
Tabel 67 Mutasi Saldo Aset Tetap Lainnya .....	77
Tabel 68 Perbandingan Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 .....	79
Tabel 69 Mutasi Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan.....	80
Tabel 70 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021.....	81
Tabel 71 Perbandingan Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 .....	82
Tabel 72 Perbandingan Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 .....	82
Tabel 73 Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 .....	83
Tabel 74 Mutasi Saldo Aset Tak Berwujud .....	83

Tabel 75 Perbandingan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 .....	85
Tabel 76 Rincian Aset Lain-lain per 31 Desember 2021.....	85
Tabel 77 Mutasi Aset Lain-lain .....	85
Tabel 78 Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2021 .....	87
Tabel 79 Perbandingan Rincian Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 .....	88
Tabel 80 Rincian Kegiatan Hibah dan Nilai yang sudah disahkan per 31 Desember 2021 .....	88
Tabel 81 Perbandingan Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 .....	89
Tabel 82 Perbandingan Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 .....	89
Tabel 83 Perbandingan Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 .....	90
Tabel 84 Perbandingan Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 .....	91
Tabel 85 Perbandingan PNBPN Lainnya pada LO dan LRA per 31 Desember 2021 .....	92
Tabel 86 Selisih nilai PNBPN Lainnya pada LO dan LRA per 31 Desember 2021 .....	92
Tabel 87 Perbandingan Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 .....	93
Tabel 88 Perbandingan Beban Pegawai pada LO dan LRA per 31 Desember 2021 .....	94
Tabel 89 Selisih Nilai Beban Pegawai pada LO dan LRA per 31 Desember 2021 .....	94
Tabel 90 Perbandingan Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 .....	95
Tabel 91 Perbandingan Rincian Beban Persediaan pada LO dan LRA per 31 Desember 2021 .....	95
Tabel 92 Selisih nilai Beban Persediaan pada LO dan LRA per 31 Desember 2021 .....	95
Tabel 93 Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 .....	96
Tabel 94 Perbandingan Beban Barang dan Jasa pada LO dan LRA per 31 Desember 2021 .....	97
Tabel 95 Selisih nilai Barang dan Jasa pada LO dan LRA per 31 Desember 2021.....	98
Tabel 96 Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 .....	99
Tabel 97 Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan pada LO dan LRA per 31 Desember 2021 .....	100
Tabel 98 Selisih nilai Beban Pemeliharaan pada LO dan LRA per 31 Desember 2021 .....	100
Tabel 99 Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 .....	101
Tabel 100 Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas pada LO dan LRA per 31 Desember 2021 .....	101
Tabel 101 Selisih Nilai Beban Perjalanan Dinas pada LO dan LRA per 31 Desember 2021 .....	102
Tabel 102 Perbandingan Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.....	103
Tabel 103 Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 .....	103
Tabel 104 Perbandingan Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih.....	104
Tabel 105 Perbandingan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar.....	104

Tabel 106 Perbandingan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar pada LO dan LRA per 31 Desember 2021 .....	105
Tabel 107 Realisasi Beban Pelepasan Aset Non Lancar .....	105
Tabel 108 Perbandingan Beban Pelepasan Aset Non Lancar antara LO dan LRA per 31 Desember 2021 .....	105
Tabel 109 Perbandingan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 .....	106
Tabel 110 Perbandingan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada LO dan LRA per 31 Desember 2021 .....	107
Tabel 111 Selisih Nilai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.....	107
Tabel 112 Perbandingan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.....	108
Tabel 113 Perbandingan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya antara LO dan LRA per 31 Desember 2021 .....	108
Tabel 114 Rincian Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas.....	109
Tabel 115 Rincian Koreksi Nilai Persediaan Per Satker .....	110
Tabel 116 Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi.....	110
Tabel 117 Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi .....	111
Tabel 118 Rincian Koreksi Lainnya Berdasar Satker.....	111
Tabel 119 Rincian Koreksi Lain-lain Satker Bappenas .....	111
Tabel 120 Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas .....	112
Tabel 121 Rincian Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) per Satker .....	113
Tabel 122 Rincian Diterima dari Entitas Lain (DDEL) per Satker .....	113
Tabel 123 Rincian Transfer Keluar per Satker.....	114
Tabel 124 Rincian Pengesahan Hibah Langsung per Satker .....	115
Tabel 125 Daftar Hibah Langsung Sudah Disahkan per 31 Desember 2021 .....	116
Tabel 126 Rincian Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung per Satker .....	118
Tabel 127 Informasi Pandemi Covid-19.....	122
Tabel 128 Indikasi Konvergensi Implementasi Kegiatan Stunting DIPA Bappenas.....	123

**DAFTAR GRAFIK**

Grafik 1 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja .....24

**LAMPIRAN**

1. Laporan Realisasi Anggaran Belanja;
2. Daftar Realisasi Belanja Hibah sudah disahkan dan belum disahkan;
3. Daftar Kas Lainnya dan Setara Kas ;
4. Belanja Dibayar di Muka (*Prepaid*);
5. Daftar Pendapatan yang masih harus diterima;
6. Daftar Piutang Bukan Pajak;
7. Daftar Rincian Persediaan;
8. Laporan BMN;
9. Daftar Barang Milik Negara Yang Rusak Berat;
10. Daftar Utang Kepada Pihak Ketiga;
11. Daftar Pendapatan Diterima Dimuka;
12. Daftar Pinjaman dan Hibah;
13. Daftar Rekening Pemerintah dan Rekening Lainnya;
14. Neraca Percobaan;

**LAMPIRAN PENDUKUNG**

15. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan;
16. Daftar Realisasi Satuan Kerja Pusat;
17. Daftar Realisasi Dana Dekonsentrasi;
18. Daftar Kas di Bendahara Pengeluaran;
19. Laporan Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut Pemerintah Terhadap Temuan Pemeriksaan BPK Atas LKKL Tahun 2020;
20. Rencana Tindak Pemerintah Terhadap Temuan Pemeriksaan BPK Atas LKKL Tahun 2020;
21. Ikhtisar Laporan Keuangan Unit Badan Lainnya Bagian Satker;
22. Pernyataan Tanggung Jawab Unit Badan Lainnya Bagian Satker;
23. Daftar Tuntutan Hukum Pemerintah;
24. Daftar Barang Persediaan Yang Tidak dikuasai; dan
25. Nota Kesepakatan Angka Asersi Final.

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
TAHUN ANGGARAN 2021**

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) untuk Tahun Anggaran 2021 Bagian Anggaran 055 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2021, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen Kementerian PPN/Bappenas.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Jakarta, Februari 2022  
\* Inspektur Utama



Ir. Wismana Adi Suryabrata, MIA  
NIP. 19630225 199003 1 003






**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, Mei 2022

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 



Suharso Monoarfa

## RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

## RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas Semester II Tahun Anggaran 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintah. Laporan Keuangan ini meliputi:

### 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Negara per 31 Desember 2021 adalah berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp3.335.323.238,00 dan estimasi Pendapatan-LRA adalah sebesar Rp573.481.000,00.

Realisasi Belanja Negara per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.156.567.508.037,00 atau mencapai 98 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp1.178.408.621.000,00.

### 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2021. Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp2.625.851.772.224,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp34.634.768.844,00, Aset Tetap (*Netto*) sebesar Rp1.951.473.450.395,00, Piutang Jangka Panjang (*Netto*) sebesar Rp0,00, dan Aset Lainnya (*Netto*) sebesar Rp639.743.552.985,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp9.099.005.912,00 dan Rp2.616.752.766.312,00.

### 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp519.410.193,00 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp1.847.078.551.396,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional

senilai Rp(1.846.559.141.203,00). Surplus Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp315.186.623,00 dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(1.846.243.954.580,00)

#### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2021 adalah sebesar Rp2.659.028.591.533,00. Mutasi selama Tahun Anggaran 2021 terdiri dari Defisit-LO sebesar Rp(1.846.243.954.580,00), koreksi-koreksi senilai Rp(1.988.988.723,00) dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp1.805.957.118.082,00. Sehingga Ekuitas per 31 Desember 2021 adalah senilai Rp2.616.752.766.312,00.

#### **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam Penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Semester II Tahun Anggaran 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual.

# LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

**KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2021  
DAN 31 DESEMBER 2020**

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2021		% thd Angg	31 Desember 2020
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
<b>PENDAPATAN</b>					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	573.481.000	3.335.323.238	582	2.258.763.546
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>573.481.000</b>	<b>3.335.323.238</b>	<b>582</b>	<b>2.258.763.546</b>
<b>BELANJA</b>					
<b>Belanja Operasi</b>	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	156.793.538.000	156.204.617.613	100	149.301.536.269
Belanja Barang	B.4	942.826.412.000	921.764.539.731	98	884.565.670.476
Belanja Modal	B.5	78.788.671.000	78.598.350.693	100	82.993.972.404
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>1.178.408.621.000</b>	<b>1.156.567.508.037</b>	<b>98</b>	<b>1.116.861.179.149</b>

Jakarta, Mei 2022

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



*Suharso Monoarfa*  
Suharso Monoarfa

**Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan**



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN / LEMBAGA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020  
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Kode Lap : LRA.F.W.1  
Tanggal : 26/04/22 12:18 PM  
Halaman : 1  
Prg ID : lap\_lra\_face\_kl\_komparatif --

NO	URAIAN	2021				2020			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>A</b>	<b>PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH</b>				0				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	573,481,000	3,335,323,238	2,761,842,238	582	0	2,258,763,546	2,258,763,546	0
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH</b>	<b>573,481,000</b>	<b>3,335,323,238</b>	<b>2,761,842,238</b>	<b>582</b>	<b>0</b>	<b>2,258,763,546</b>	<b>2,258,763,546</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>BELANJA</b>				0				0
	BELANJA PEGAWAI	156,793,538,000	156,204,617,613	(588,920,387)	100	179,573,052,000	149,301,536,269	(30,271,515,731)	83
	BELANJA BARANG	942,826,412,000	921,764,539,731	(21,061,872,269)	98	951,958,593,000	884,565,670,476	(67,392,922,524)	93
	BELANJA MODAL	78,788,671,000	78,598,350,693	(190,320,307)	100	86,226,063,000	82,993,972,404	(3,232,090,596)	96
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>JUMLAH BELANJA (B I + B II)</b>	<b>1,178,408,621,000</b>	<b>1,156,567,508,037</b>	<b>(21,841,112,963)</b>	<b>98</b>	<b>1,217,757,708,000</b>	<b>1,116,861,179,149</b>	<b>(100,896,528,851)</b>	<b>92</b>
<b>C</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				0				0

NERACA

II

## II. NERACA

**KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS**  
**NERACA**  
**PER 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020**

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	73.005.701	77.254.593
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2	3.680.626.556	638.208.958
Belanja Dibayar di Muka ( <i>prepaid</i> )	C.3	26.159.329.931	41.221.576.013
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.4	21.401.210	502.342.500
Piutang PNPB	C.5	-	542.701.763
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.6	-	(2.628.360)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan	C.7	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - BL TGR/TGR	C.8	-	-
Piutang dari KUN	-	-	-
Persediaan	C.9	4.700.405.446	6.322.466.604
Persediaan yang Belum Diregister	-	-	-
Jumlah Aset Lancar		<b>34.634.768.844</b>	<b>49.301.922.071</b>
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	C.10	1.541.450.676.000	1.541.450.676.000
Peralatan dan Mesin	C.11	494.470.079.873	469.890.509.737
Peralatan dan Mesin Belum Diregister	-	-	-
Gedung dan Bangunan	C.12	161.997.391.722	159.920.519.326
Gedung dan Bangunan Belum Diregister	-	-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.13	6.197.314.170	6.020.002.566
Aset Tetap Lainnya	C.14	106.960.367.956	111.114.920.719
Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	C.15	19.016.500.000	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.16	(378.618.879.326)	(315.156.289.356)
Aset Tetap yang Belum Diregister	-	-	-
Jumlah Aset Tetap		<b>1.951.473.450.395</b>	<b>1.973.240.338.992</b>
<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>			
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TG)	C.17	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.18	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ASET LAINNYA</b>			
Kemitraan Dengan Pihak ketiga	C.19	490.209.375.000	490.209.375.000
Aset Tak Berwujud	C.20	101.310.171.102	131.912.902.018
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	105.437.090.556	66.639.026.947
Aset Lainnya yang Belum Diregister	-	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(57.213.083.673)	(49.998.051.795)
Jumlah Aset Lainnya		<b>639.743.552.985</b>	<b>638.763.252.170</b>
<b>JUMLAH ASET</b>			
		<b>2.626.861.772.224</b>	<b>2.661.306.613.233</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.24	8.968.540.875	2.107.379.659
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.25	-	-
Hibah Yang Belum Disahkan	C.26	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	C.27	57.459.336	82.513.583
Uang Muka dari KPPN	C.28	73.005.701	77.254.593
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.29	-	9.773.665
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		<b>9.099.005.912</b>	<b>2.276.921.700</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>			
		<b>9.099.005.912</b>	<b>2.276.921.700</b>
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.30	2.616.752.766.312	2.659.028.591.533
<b>JUMLAH EKUITAS</b>			
		<b>2.616.752.766.312</b>	<b>2.659.028.591.533</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>			
		<b>2.626.861.772.224</b>	<b>2.661.306.613.233</b>

Jakarta, Mei 2022

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



Suharso Monoarfa

**Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan**

**NERACA**  
**TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA**  
**PER DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 055

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Tgl. Cetak 26/04/2022 12:17 PM  
lap\_neraca\_kl\_komparatif --rekon17

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2021	2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Kas di Bendahara Pengeluaran	73,005,701	77,254,593	(4,248,892)	(5.50)
Kas Lainnya dan Setara Kas	3,680,626,556	638,208,958	3,042,417,598	476.71
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	26,159,329,931	41,221,576,013	(15,062,246,082)	(36.54)
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	21,401,210	502,342,500	(480,941,290)	(95.74)
Piutang Bukan Pajak	0	542,701,763	(542,701,763)	(100.00)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	0	(2,628,360)	2,628,360	(100.00)
<b>PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)</b>	<b>0</b>	<b>540,073,403</b>	<b>(540,073,403)</b>	<b>(100.00)</b>
Persediaan	4,700,405,446	6,322,466,604	(1,622,061,158)	(25.66)
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>34,634,768,844</b>	<b>49,301,922,071</b>	<b>(14,667,153,227)</b>	<b>(29.75)</b>
<b>ASET TETAP</b>				
Tanah	1,541,450,676,000	1,541,450,676,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	494,470,079,873	469,890,509,737	24,579,570,136	5.23
Gedung dan Bangunan	161,997,391,722	159,920,519,326	2,076,872,396	1.30
Jalan, Irigasi dan Jaringan	6,197,314,170	6,020,002,566	177,311,604	2.95
Aset Tetap Lainnya	106,960,367,956	111,114,920,719	(4,154,552,763)	(3.74)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	19,016,500,000	0	19,016,500,000	0.00
<b>AKUMULASI PENYUSUTAN</b>	<b>(378,618,879,326)</b>	<b>(315,156,289,356)</b>	<b>(63,462,589,970)</b>	<b>20.14</b>
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>1,951,473,450,395</b>	<b>1,973,240,338,992</b>	<b>(21,766,888,597)</b>	<b>(1.10)</b>
<b>ASET LAINNYA</b>				
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	490,209,375,000	490,209,375,000	0	0.00
Aset Tak Berwujud	101,310,171,102	131,912,902,018	(30,602,730,916)	(23.20)
Aset Lain-lain	105,437,090,556	66,639,026,947	38,798,063,609	58.22
<b>AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA</b>	<b>(57,213,083,673)</b>	<b>(49,998,051,795)</b>	<b>(7,215,031,878)</b>	<b>14.43</b>
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>639,743,552,985</b>	<b>638,763,252,170</b>	<b>980,300,815</b>	<b>0.15</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>2,625,851,772,224</b>	<b>2,661,305,513,233</b>	<b>(35,453,741,009)</b>	<b>(1.33)</b>
<b>KEWAJIBAN</b>				
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>				
Utang kepada Pihak Ketiga	8,968,540,875	2,107,379,659	6,861,161,216	325.58
Pendapatan Diterima Dimuka	57,459,336	82,513,583	(25,054,247)	(30.36)
Uang Muka dari KPPN	73,005,701	77,254,593	(4,248,892)	(5.50)
Utang Jangka Pendek Lainnya	0	9,773,865	(9,773,865)	(100.00)
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>9,099,005,912</b>	<b>2,276,921,700</b>	<b>6,822,084,212</b>	<b>299.62</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>9,099,005,912</b>	<b>2,276,921,700</b>	<b>6,822,084,212</b>	<b>299.62</b>
<b>EKUITAS</b>				
<b>EKUITAS</b>				
Ekuitas	2,616,752,766,312	2,659,028,591,533	(42,275,825,221)	(1.59)
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>2,616,752,766,312</b>	<b>2,659,028,591,533</b>	<b>(42,275,825,221)</b>	<b>(1.59)</b>
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>2,616,752,766,312</b>	<b>2,659,028,591,533</b>	<b>(42,275,825,221)</b>	<b>(1.59)</b>

**NERACA**  
**TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA**  
PER DESEMBER 2021 DAN 2020  
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 055

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Tgl. Cetak 26/04/2022 12:17 PM  
lap\_neraca\_kl\_komparatif --rekon17

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2021	2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>2,625,851,772,224</b>	<b>2,661,305,513,233</b>	<b>(35,453,741,009)</b>	<b>(1.33)</b>

## LAPORAN OPERASIONAL

III



## III. LAPORAN OPERASIONAL

**KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2021**  
**DAN 31 DESEMBER 2020**

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	519.410.193	611.470.187
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>519.410.193</b>	<b>611.470.187</b>
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	D.2	157.174.178.897	149.074.878.526
Beban Persediaan	D.3	11.343.931.892	13.584.409.156
Beban Barang dan Jasa	D.4	1.351.662.095.304	1.518.044.198.005
Beban Pemeliharaan	D.5	23.727.944.458	17.953.512.020
Beban Perjalanan Dinas	D.6	166.344.609.514	112.666.543.427
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	50.833.418.800	98.781.019.703
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	85.992.372.531	82.088.076.115
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.9	-	2.680.165
Beban Bantuan Sosial	D.10	-	-
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>1.847.078.551.396</b>	<b>1.992.195.317.117</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>(1.846.559.141.203)</b>	<b>(1.991.583.846.930)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
<b>SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR</b>			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.11	351.698.999	512.878.889
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.12	446.023.636	137.500.909
<b>Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar</b>		<b>(94.324.637)</b>	<b>375.377.980</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA</b>			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.13	1.668.705.806	8.994.562.362
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.14	1.259.194.546	9.266.332.781
<b>Jumlah Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>		<b>409.511.260</b>	<b>(271.770.419)</b>
<b>SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>315.186.623</b>	<b>103.607.561</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>			
Beban Luar Biasa	D.15	-	-
<b>SURPLUS /DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>		<b>(1.846.243.954.580)</b>	<b>(1.991.480.239.369)</b>

Jakarta, Mei 2022

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



*Suharso Monoarfa*  
Suharso Monoarfa

**Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan**

LAPORAN OPERASIONAL  
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020  
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN

: 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
NASIONAL

Kode Lap : LO.KL

Tanggal : 26/04/22 12:18

Halaman : 1

Prg ID : lap\_lo\_kl --

Tgl Data : 20/05/19 12:00

URAIAN	2021	2020	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	519,410,193	611,470,187	(92,059,994)	(15.056)
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	519,410,193	611,470,187	(92,059,994)	(15.056)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	519,410,193	611,470,187	(92,059,994)	(15.056)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	157,174,178,897	149,074,878,526	8,099,300,371	5.433
Beban Persediaan	11,343,931,892	13,584,409,156	(2,240,477,264)	(16.493)
Beban Barang dan Jasa	1,351,662,095,304	1,518,044,198,005	(166,382,102,701)	(10.96)
Beban Pemeliharaan	23,727,944,458	17,953,512,020	5,774,432,438	32.163
Beban Perjalanan Dinas	166,344,609,514	112,666,543,427	53,678,066,087	47.643
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	50,833,418,800	98,781,019,703	(47,947,600,903)	(48.539)
Beban Bunga	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL  
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020  
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN

: 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
NASIONAL

Kode Lap : LO.KL

Tanggal : 26/04/22 12:18

Halaman : 2

Prg ID : lap\_lo\_kl --

Tgl Data : 20/05/19 12:00

URAIAN	2021	2020	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	85,992,372,531	82,088,076,115	3,904,296,416	4.756
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	2,680,165	(2,680,165)	(100)
Beban Lain-Lain	0	0	0	
<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>1,847,078,551,396</b>	<b>1,992,195,317,117</b>	<b>(145,116,765,721)</b>	<b>(7.284)</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>	<b>(1,846,559,141,203)</b>	<b>(1,991,583,846,930)</b>	<b>145,024,705,727</b>	<b>(7.282)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	(94,324,637)	375,377,980	(469,702,617)	(125.128)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	351,698,999	512,878,889	(161,179,890)	(31.427)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	446,023,636	137,500,909	308,522,727	224.379
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	409,511,260	(271,770,419)	681,281,679	(250.683)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1,668,705,806	8,994,562,362	(7,325,856,556)	(81.448)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1,259,194,546	9,266,332,781	(8,007,138,235)	(86.411)
<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>315,186,623</b>	<b>103,607,561</b>	<b>211,579,062</b>	<b>204.212</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	<b>(1,846,243,954,580)</b>	<b>(1,991,480,239,369)</b>	<b>145,236,284,789</b>	<b>(7.293)</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
<b>POS LUAR BIASA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>	<b>(1,846,243,954,580)</b>	<b>(1,991,480,239,369)</b>	<b>145,236,284,789</b>	<b>(7.293)</b>

## LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV

#### IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2021  
DAN 31 DESEMBER 2020**

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
EKUITAS AWAL	E.1	2.659.028.591.533	2.629.750.217.776
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(1.846.243.954.580)	(1.991.480.239.369)
<b>KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS</b>	E.3	(1.988.988.723)	55.929.612.705
Kebijakan/Kesalahan Mendasar			
Penyesuaian Nilai Aset	E.3.1	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.2	16.861.900	-
Koreksi atas Reklasifikasi	E.3.3	(920.000)	2.808.800
Selisih Revaluasi Aset	E.3.4	-	57.006.925.695
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.3.5	(2.016.248.984)	(195.763.386)
Koreksi Lain-lain	E.3.6	11.318.361	(884.358.404)
<b>JUMLAH</b>		<b>(1.988.988.723)</b>	<b>55.929.612.705</b>
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	1.805.957.118.082	1.964.829.000.421
<b>KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS</b>		<b>(42.275.825.221)</b>	<b>29.278.373.757</b>
<b>EKUITAS AKHIR</b>	E.5	<b>2.616.752.766.312</b>	<b>2.659.028.591.533</b>

Jakarta, Mei 2022

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



Suharso Monoarfa

**Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan**

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
TINGKAT KEMENTERIAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020  
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 055

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Kode Lap : LPE.KL

Tanggal : 26/04/22 12:18

Halaman : 1

Prg ID : lap\_lpe\_kl --

URAIAN	2021	2020	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	2,659,028,591,533	2,629,750,217,776	29,278,373,757	1.113
SURPLUS/DEFISIT-LO	(1,846,243,954,580)	(1,991,480,239,369)	145,236,284,789	(7.293)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(1,988,988,723)	55,929,612,705	(57,918,601,428)	(103.55 6)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	16,861,900	0	16,861,900	
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	(920,000)	2,808,800	(3,728,800)	(132.75 4)
SELISIH REVALUASI ASET	0	57,006,925,695	(57,006,925,695)	(100)
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(2,016,248,984)	(195,763,386)	(1,820,485,598)	929.942
LAIN-LAIN	11,318,361	(884,358,404)	895,676,765	(101.28)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	1,805,957,118,082	1,964,829,000,421	(158,871,882,339)	(8.086)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(42,275,825,221)	29,278,373,757	(71,554,198,978)	(244.39 3)
EKUITAS AKHIR	2,616,752,766,312	2,659,028,591,533	(42,275,825,221)	(1.59)



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

v

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. PENJELASAN UMUM

*Profil & Kebijakan  
Teknis*

#### A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan sektoral, lintas sektor, dan lintas wilayah, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan;
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
5. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tanggal 29 Februari 2016, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Pengkajian, pengoordinasian, dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan sektoral, lintas sektor,

dan lintas wilayah, kerangka ekonomi makro nasional dan regional, rancang bangun sarana dan prasarana, kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan pembangunan nasional;

2. Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dan penyiapan rancang bangun sarana dan prasarana;
3. Penyusunan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/ Daerah;
4. Pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara rencana kerja pemerintah dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara;
5. Penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara bersama-sama dengan Kementerian Keuangan;
6. Pengoordinasian peluncuran dan percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional
7. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional;
8. Pengoordinasian, fasilitasi, dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri, serta pengalokasian dana untuk pembangunan bersama-sama instansi terkait;
9. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BAPPENAS;
10. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan BAPPENAS;
11. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BAPPENAS; dan
12. Pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan tugas di BAPPENAS.

Sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas, dalam melaksanakan tugasnya Menteri PPN/Kepala Bappenas dibantu oleh Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama, Staf Ahli, Inspektorat Utama, dan Deputi yang masing-masing membidangi bidang-bidang tertentu, serta Pusat.

Susunan Organisasi Kementerian PPN/Bappenas terdiri atas :

1. Menteri/Kepala;
2. Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama;
3. Deputi Bidang Ekonomi;
4. Deputi Bidang Pengembangan Regional;
5. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;
6. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan;
7. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan;
8. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana;
9. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan;
10. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan;
11. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan;
12. Inspektorat Utama;
13. Staf Ahli;
14. Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana;
15. Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan;
16. Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja.

*Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan  
Keuangan*

## **A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kementerian PPN/Bappenas. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian PPN/Bappenas.

Jumlah satuan kerja (satker) aktif di lingkup Kementerian PPN/Bappenas per 31 Desember 2021 berdasarkan data di aplikasi e-Rekon&LK G2 adalah sejumlah 34 Satker. Rekapitulasi satuan kerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Daftar Satker Kementerian PPN/Bappenas TA 2021

No.	Satuan Kerja
1	Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas
2	MWA ICCTF
3	Bappeda Provinsi Jawa Tengah
4	Bappeda Provinsi DIY
5	Bappeda Provinsi Jawa Timur
6	Bappeda Provinsi Aceh
7	Bappeda Provinsi Sumatera Utara
8	Bappeda Provinsi Sumatera Barat
9	Bappeda Provinsi Riau
10	Bappeda Provinsi Jambi
11	Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
12	Bappeda Provinsi Lampung
13	Bappeda Provinsi Kalimantan Barat
14	Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah
15	Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan
16	Bappeda Provinsi Kalimantan Timur
17	Bappeda Provinsi Sulawesi Utara
18	Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah
19	Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan
20	Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara
21	Bappeda Provinsi Maluku
22	Bappeda Provinsi Bali
23	Bappeda Provinsi NTB
24	Bappeda Provinsi NTT
25	Bappeda Provinsi Bengkulu
26	Bappeda Provinsi Maluku Utara
27	Bappeda Provinsi Banten
28	Bappeda dan Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
29	Bappeda Provinsi Gorontalo
30	Bappeda Provinsi Kepulauan Riau
31	Bappeda Provinsi Papua Barat
32	Bappeda Provinsi Sulawesi Barat
33	Bappeda Provinsi Kalimantan Utara
34	Bappeda Provinsi Papua

*Basis  
Akuntansi*

### **A.3. BASIS AKUNTANSI**

Kementerian PPN/Bappenas menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar  
Pengukuran*

### **A.4. DASAR PENGUKURAN**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kementerian PPN/Bappenas dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan  
Akuntansi*

### **A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar,

konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintah.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-LRA*

**(1) Pendapatan-LRA**

- Pendapatan–LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan *bruto*, dan tidak mencatat jumlah *nettonya* (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-LO*

**(2) Pendapatan-LO**

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kementerian PPN/Bappenas adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa;
  - Pendapatan Jasa Giro diakui pada saat terbitnya rekening koran per akhir bulan.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan *bruto*, dan tidak



mencatat jumlah *nettonya* (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Belanja*

**(3) Belanja**

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Negara (KUN).
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- Belanja Hibah diakui pada saat terjadi pengeluaran kas Negara.

*Beban*

**(4) Beban**

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- Beban Hibah diakui pada saat resume tagihan (SP2HL).

*Aset*

**(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

*Aset Lancar*

**a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

#### *Aset Tetap*

##### **b. Aset Tetap**

- Aset tetap meliputi seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - Pengeluaran untuk per satuan peralatan, mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Pada tahun 2017 dan 2018, Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan, Jembatan, dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup obyek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian Negara/Lembaga yang sedang dilaksanakan pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian kembali dilakukan dengan survei lapangan untuk obyek penilaian kembali selain Tanah.
- Pada tahun 2019, atas hasil penilaian kembali tahun 2017 dan 2018 terdapat perbaikan/koreksi yang dilakukan guna menyempurnakan hasil penilaian kembali agar diperoleh nilai Aset Tetap yang lebih akurat, andal, dan wajar.
- Berdasarkan Surat Anggota BPK Nomor 50/S/IV-XV/01/2020 tanggal 6 Januari 2020 hal Tanggapan atas Penyelesaian Tindak Lanjut Perbaikan Penilaian Kembali Barang Milik Negara Tahun 2017-2018 dinyatakan bahwa Pemerintah dapat menyajikan seluruh hasil penilaian kembali BMN tahun 2017-2018 beserta perbaikannya dalam LKPP tahun 2019 *Unaudited* sesuai mekanisme yang berlaku.
- Nilai Aset Tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal

nilai Aset Tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai Aset Tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai lagi dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset Tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari Neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

#### *Penyusutan Aset Tetap*

#### **c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah;
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang

dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusunan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang Jangka panjang*

**d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset Lainnya*

**e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dengan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software Komputer</i>	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

#### Kewajiban

#### (6) Kewajiban

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - a. Kewajiban Jangka Pendek
 

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

*Ekuitas*

**(7) Ekuitas**

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan.

Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja tersaji sebagai berikut:

Tabel 5 Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja per 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
<b>Pendapatan</b>		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	573.481.000
<b>Jumlah Pendapatan</b>	-	573.481.000
<b>Belanja</b>		
Belanja Pegawai	200.667.839.000	156.793.538.000
Belanja Barang	1.434.704.313.000	942.826.412.000
Belanja Modal	135.149.011.000	78.788.671.000
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.770.521.163.000</b>	<b>1.178.408.621.000</b>

Perubahan anggaran berdasarkan program pada Kementerian PPN/Bappenas adalah sebagai berikut:

Tabel 6 Rincian Anggaran per Program per 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah)

Program	31 Desember 2021	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Program Perencanaan Pembangunan Nasional	981.378.563.000	682.422.974.000
Program Dukungan Manajemen	789.142.600.000	495.985.647.000
<b>Jumlah</b>	<b>1.770.521.163.000</b>	<b>1.178.408.621.000</b>

Pada tahun 2021 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bappenas (P2A2) merupakan bagian dari Program Dukungan Manajemen.

Realisasi  
Pendapatan  
Rp3.335.323.238,00

## B.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.335.323.238,00 sedangkan estimasi pendapatan adalah sebesar Rp573.481.000,00. Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Kementerian PPN/Bappenas adalah sebagai berikut:

Tabel 7 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2021		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	86.500.000	777.698.999	899,07
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya			
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	90.929.000	100.960.847	111,03
Pendapatan dari Bangun, Guna, Serah (BGS)	396.052.000	792.104.220	200
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	76.342.500	
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)			
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara			
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	140.473.826	-
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu		1.430.065.952	
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	17.029.861	
Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu	-		-
Pendapatan Anggaran Lain-lain		647.033	
<b>Jumlah</b>	<b>573.481.000</b>	<b>3.335.323.238</b>	<b>581,59</b>

Tabel 8 Perbandingan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	777.698.999	86.878.889	795,15
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya		-	0,00
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	100.960.847	20.552.700	391,23
Pendapatan dari Bangun, Guna, dan Serah (BGS)	792.104.220		0,00
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	76.342.500	-	0,00
Pendapatan Denda Lainnya			0,00
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara		86.805.080	-100,00
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)		2.287.530	-100,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	140.473.826	66.258.848	112,01
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	1.430.065.952	1.995.640.499	-28,34
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	17.029.861	-	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu		-	0,00
Pendapatan Anggaran Lain-lain	647.033	340.000	90,30
<b>Jumlah</b>	<b>3.335.323.238</b>	<b>2.258.763.546</b>	<b>47,66</b>

Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2021 antara lain berasal dari Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin, Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan, Pendapatan dari Bangun Guna Serah (BGS), Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah, Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu, Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu, serta Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu, dan Pendapatan Anggaran Lain-lain.

Kenaikan Pendapatan PNPB lainnya disebabkan karena:

1. Setoran imbalan BOT TA 2020 yang baru disetorkan di bulan Januari 2021;
2. Pembayaran penjualan kendaraan tanpa lelang TA 2020 yang baru dibayarkan di bulan Januari dan Februari 2021;
3. Pembayaran denda keterlambatan pekerjaan pengadaan notebook TA 2020;

Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin mengalami kenaikan signifikan yang disebabkan karena adanya program pengurangan BMN yang sudah usang/ atau rusak. Sedangkan kenaikan signifikan pada Pendapatan dari Bangun, Guna, Serah disebabkan karena pembayaran imbalan BOT TA 2020 yang baru disetorkan di bulan Januari 2021.

Realisasi Belanja  
Rp1.156.567.508.037,00

## B.2. Belanja

Realisasi Belanja Kementerian PPN/Bappenas per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.156.567.508.037,00 atau mencapai 98,15 persen dari anggaran belanja sebesar Rp1.178.408.621.000,00. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2021 tersaji sebagai berikut:

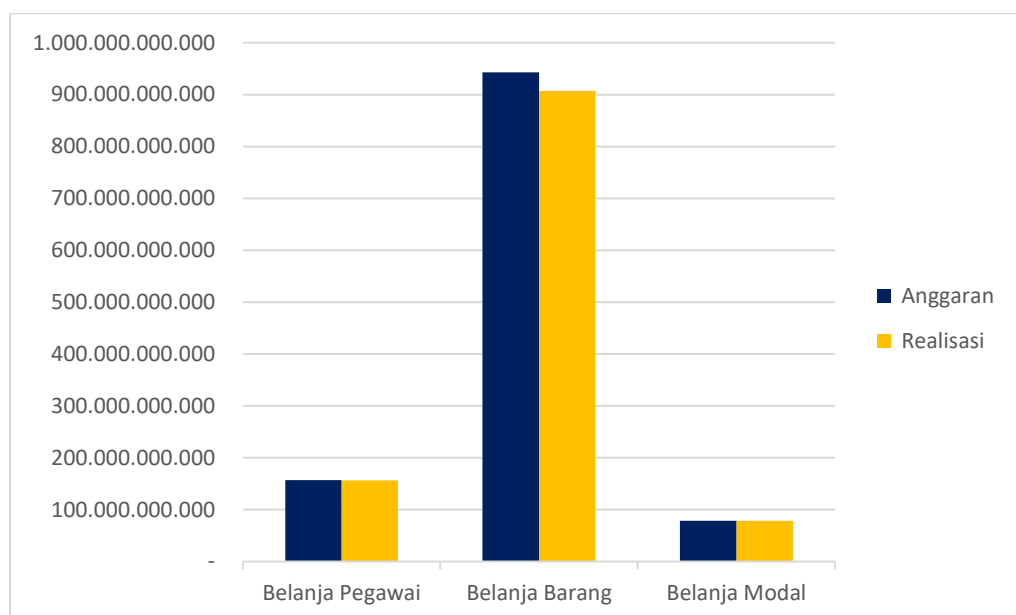
Tabel 9 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja  
per 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2021		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	156.793.538.000	156.309.469.451	99,62
Belanja Barang	942.826.412.000	922.608.733.868	96,08
Belanja Modal	78.788.671.000	78.598.350.693	99,76
<b>Total Belanja Kotor</b>	<b>1.178.408.621.000</b>	<b>1.157.516.554.012</b>	<b>98,23</b>
Pengembalian Belanja	-	(949.045.975)	
<b>Jumlah</b>	<b>1.178.408.621.000</b>	<b>1.156.567.508.037</b>	<b>98,15</b>

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Grafik 1 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2021



Realisasi belanja menurut sumber dana/program/kegiatan, eselon1/wilayah/satker, jenis belanja/eselon1/akun dapat dilihat pada lampiran 1.

Tabel 10 Rincian Belanja Berdasarkan Program per 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah)

Program	31 Desember 2021		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Program Perencanaan Bappenas	682.422.974.000	663.395.819.510	97,212
Program Dukungan Manajemen	495.985.647.000	494.120.734.502	99,62
<b>Total</b>	<b>1.178.408.621.000</b>	<b>1.157.516.554.012</b>	<b>98,23</b>
Pengembalian	-	(949.045.975)	-
<b>Jumlah</b>	<b>1.178.408.621.000</b>	<b>1.156.567.508.037</b>	<b>98,15</b>

Pada tahun 2021 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bappenas (P2A2) merupakan bagian dari Program Dukungan Manajemen.

Tabel 11 Rincian Belanja Berdasarkan Bagian Anggaran per 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah)

Bagian Anggaran	31 Desember 2021		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
BA 055	1.178.408.621.000	1.157.516.554.012	98,23
Pengembalian		(949.045.975)	-
<b>Jumlah</b>	<b>1.178.408.621.000</b>	<b>1.156.567.508.037</b>	<b>98,15</b>

Sedangkan realisasi belanja berdasarkan mata anggaran per 31 Desember Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 12 Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Belanja Pegawai	156.204.617.613	149.301.536.269	4,62
Belanja Barang	921.764.539.731	884.565.670.476	4,21
Belanja Modal	78.598.350.693	82.993.972.404	(5,30)
<b>Jumlah</b>	<b>1.156.567.508.037</b>	<b>1.116.861.179.149</b>	<b>3,56</b>

Realisasi Belanja per 31 Desember 2021 mengalami peningkatan sebesar 3,56 persen dibanding realisasi per 31 Desember 2020. Hal ini disebabkan adanya peningkatan belanja pegawai karena meningkatnya jumlah pegawai PNS di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2021. Selain itu juga terdapat peningkatan belanja barang antara lain pada belanja operasional, belanja perjalanan dinas karena adanya kelonggaran Pemberlakuan Pembatasan kegiatan Masyarakat (PPKM), dan belanja barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat.

Jumlah realisasi belanja sebagaimana diatas, belum termasuk realisasi belanja hibah langsung uang tahun 2020 yang belum proses SPHL senilai Rp58.134.000,00 pada satker bappenas dari Proyek READSI yang disebabkan karena pada Aplikasi SAKTI belum mengakomodir untuk pengesahan belanja hibah Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL). Adapun realisasi belanja hibah langsung uang tahun 2021 yang sudah disahkan senilai total Rp15.869.716.711,00 terdiri dari proyek UNICEF senilai Rp6.210.906.372,00, proyek UNFPA senilai Rp4.364.723.703,00 dan Proyek READSI senilai Rp5.294.086.636,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 13 Total Realisasi Hibah Langsung Luar Negeri Kas  
(Termasuk Belum Proses SPHL)

(Dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
<b>Realisasi belanja hibah langsung uang :</b>	
1. Terbit SPHL	15.869.716.711
2. Belum terbit SPHL	-
3. Belum proses SPHL	58.134.000
<b>Jumlah</b>	<b>15.927.850.711</b>

Rincian penjelasan dapat dilihat pada lampiran 2.

Dana hibah langsung luar negeri kas tersebut langsung disalurkan oleh Mitra Pembangunan kepada Kementerian PPN/Bappenas untuk membiayai suatu program/kegiatan/proyek tertentu melalui rekening unit pelaksana masing-masing program/kegiatan/proyek di Kementerian PPN/Bappenas. Apabila program/kegiatan/proyek telah selesai (*project closed*) dan masih terdapat sisa dana di rekening, maka dana tersebut disetor kembali ke Mitra Pembangunan.

Akuntabilitas pemanfaatan hibah tetap dapat dipertanggungjawabkan melalui audit yang dilakukan oleh auditor independen yang ditunjuk oleh Mitra Pembangunan berdasarkan perjanjian hibah (*Grant Agreement*).

Mekanisme pencairan hibah langsung luar negeri kas diatur dalam:

1. *General Guidelines* dari Mitra Pembangunan menetapkan bahwa seluruh ketentuan pelaksanaan hibah mengacu kepada *guideline*;
2. MoU Hibah antara Mitra Pembangunan dan Kementerian PPN/Bappenas menetapkan bahwa penyaluran dana hibah langsung ke rekening yang disetujui oleh Mitra Pembangunan, bukan melalui rekening Kas Umum Negara.

Belanja Pegawai  
Rp156.204.617.613,00

### B.3. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp156.204.617.613,00 dan Rp149.301.536.269,00 atau terjadi peningkatan sebesar 4,62 persen. Hal ini utamanya disebabkan karena peningkatan belanja gaji dan tunjangan maupun tunjangan khusus akibat peningkatan jumlah PNS di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas TA 2021. Sedangkan pada belanja uang lembur mengalami penurunan disebabkan karena berkurangnya pelaksanaan lembur di kantor akibat Pandemi Covid-19.

Tabel 14 Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan	66.791.074.860	64.080.963.023	4,23
Belanja Lembur	16.563.000	51.811.000	(68,03)
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	89.501.831.591	85.260.345.698	4,97
<b>Total Belanja Pegawai</b>	<b>156.309.469.451</b>	<b>149.393.119.721</b>	<b>4,63</b>
Pengembalian Belanja Pegawai	(104.851.838)	(91.583.452)	
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>156.204.617.613</b>	<b>149.301.536.269</b>	<b>4,62</b>

Belanja Barang  
Rp921.764.539.731,00

#### B.4. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp921.764.539.731,00 dan Rp884.565.670.476,00.

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2021 mengalami peningkatan 2,43 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2020. Hal ini disebabkan adanya peningkatan pada belanja operasional, belanja perjalanan dinas dan belanja perjalanan dinas luar negeri. Selain itu, terdapat peningkatan pada belanja barang lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda.

Tabel 15 Perbandingan Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	73.752.055.085	58.164.479.647	26,80
Belanja Barang Non Operasional	143.126.723.999	200.679.890.030	- 28,68
Belanja Barang Pengganti Pajak	-	-	
Belanja Barang Persediaan	10.542.807.106	13.852.937.240	- 23,89
Belanja Jasa	457.218.491.302	465.029.717.666	- 1,68
Belanja Pemeliharaan	23.639.233.054	18.554.808.800	27,40
Belanja Perjalanan Dinas	147.172.243.047	110.283.989.464	33,45
Belanja Perjalanan Luar Negeri	18.197.480.431	4.112.012.652	342,54
Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-	
Belanja Jasa untuk Pencatatan Jasa dari Hibah (NonKasO)	-	-	
Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	48.959.699.844	18.634.729.494	162,73
<b>Total Belanja Barang</b>	<b>922.608.733.868</b>	<b>889.312.564.993</b>	<b>3,74</b>
Pengembalian Belanja Barang	- 844.194.137	- 4.746.894.517	- 82,22
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>921.764.539.731</b>	<b>884.565.670.476</b>	<b>4,21</b>

Termasuk dalam Belanja Persediaan Barang Konsumsi (MAK 521811) merupakan Belanja Keperluan Perkantoran senilai Rp110.554.350,00 yang tidak dapat dilakukan koreksi melalui ralat SPM dikarenakan koreksi sebagian MAK dalam satu SPM tidak dimungkinkan sesuai PMK Nomor 190/PMK.05/2021.

Tabel 16 Kesalahan MAK Belanja Persediaan Barang Konsumsi dengan Belanja Keperluan Perkantoran

(dalam rupiah)

No.	Keterangan	Jumlah	Nilai Total	Akun Awal	Akun Seharusnya
1	Pekerjaan Pengadaan Alat Rumah Tangga Kran dan	1	110.284.350	521111	521811
2	Pembayaran UP 3 Belanja keperluan Kantor SDEMP	1	270.000	521111	521811
<b>TOTAL</b>		<b>2</b>	<b>110.554.350</b>		

#### B.4.1 Belanja Penanganan Pandemi Covid-19

Dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 yang dilakukan pemerintah Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas telah mengalokasikan anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19. Adapun rincian anggaran dan realisasi untuk masing-masing jenis belanja, sebagai berikut:

Tabel 17 Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19	20.704.695.000	20.312.045.555	98,10
2	Berang Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19	25.238.000	25.237.692	100,00
3	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19	10.451.017.000	10.296.849.953	98,52
4	Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi Covid-19	-	-	0,00
5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi Covid-19	632.056.000	632.056.000	100,00
<b>Total</b>		<b>31.813.006.000</b>	<b>31.266.189.200</b>	<b>98,28</b>

##### B.4.1.1 Belanja Barang - Penanganan Pandemi Covid-19

Realisasi belanja barang penanganan pandemi Covid-19 per 31 Desember 2021 sebesar Rp20.337.283.247,00 terdiri dari belanja barang operasional meliputi belanja *healthy kit*, paket data, lisensi



aplikasi zoom, dan secara umum belanja non operasional berupa biaya swab antigen dalam rangka *tracing* penyebaran Covid-19.

Tabel 18 Realisasi Belanja Barang Penanganan Pandemi Covid-19 per 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi Belanja	% Realisasi Anggaran
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	11.838.558.000	20.704.695.000	20.313.089.060	98,11
Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	433.932.000	25.238.000	25.237.692	100,00
Pengembalian			(1.043.505)	-
<b>Jumlah Belanja Barang Operasional dan</b>	<b>12.272.490.000</b>	<b>20.729.933.000</b>	<b>20.337.283.247</b>	<b>98,11</b>

#### B.4.1.2 Belanja Jasa Penanganan – Pandemi Covid-19

Realisasi Belanja Jasa Penanganan-Pandemi Covid-19 per 31 Desember 2021 sebesar Rp10.296.849.953,00. Secara umum, realisasi belanja jasa penanganan – pandemi Covid-19 digunakan untuk pembayaran pelaksanaan swab antigen/PCR dalam rangka memutus mata rantai Covid-19.

Tabel 19 Realisasi Belanja Jasa Penanganan Pandemi Covid-19 per 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi Belanja	% Realisasi Anggaran
Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	20.435.488.000	10.451.017.000	10.296.849.953	98,52
Pengembalian				-
<b>Jumlah Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID 19</b>	<b>20.435.488.000</b>	<b>10.451.017.000</b>	<b>10.296.849.953</b>	<b>98,52</b>

#### B.4.1.3 Belanja Perjalanan Dinas – Penanganan Pandemi Covid-19

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas-Penanganan Pandemi Covid-19 per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00. Akun Belanja Perjalanan Dinas Penanganan Pandemi Covid-19 diperuntukkan untuk membiayai perjalanan dinas dalam negeri dalam rangka penanganan pandemi Covid-19.

Tabel 20 Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Penanganan Pandemi Covid-19 per 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi Belanja	% Realisasi Belanja
Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-	0,00
Pengembalian	-	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID 19</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>

#### B.4.1.4 Belanja Modal Peralatan dan Mesin–Penanganan Pandemi Covid-19

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Penanganan Pandemi Covid-19 per 31 Desember 2021 sebesar Rp632.056.000,00. Akun Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi Covid-19, diperuntukkan untuk pembelian peralatan dan mesin dalam rangka penanganan pandemi Covid-19.

Tabel 21 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi Covid-19 per 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi Belanja	% Realisasi Belanja
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19	400.000.000	632.056.000	632.056.000	100,00
Pengembalian	-	-	-	0,00
<b>Modal Peralatan dan Mesin-Penanganan Pandemi Covid-19</b>	<b>400.000.000</b>	<b>632.056.000</b>	<b>632.056.000</b>	<b>100,00</b>

Belanja Modal  
Rp78.598.350.693,00

#### B.5. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp78.598.350.693,00 dan Rp82.993.972.404,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar 5,30 persen dibanding realisasi per 31 Desember 2020. Penyebab utamanya penurunan belanja modal pada tahun 2021 disebabkan karena kebijakan *refocusing* anggaran, sehingga terdapat rencana pembangunan/renovasi gedung yang tidak terlaksana.

Tabel 22 Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.180.270.854	67.300.311.336	(10,58)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.908.913.000	10.534.215.500	(81,88)
Belanja Modal Jalan, irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	16.509.166.839	5.203.320.568	217,28
Belanja Modal Lainnya untuk Pencatatan Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya dari Hibah (Non Kas)	-	-	-
<b>Total Belanja Modal</b>	<b>78.598.350.693</b>	<b>83.037.847.404</b>	<b>(5,35)</b>
Pengembalian Belanja Modal	-	(43.875.000)	(100,00)
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>78.598.350.693</b>	<b>82.993.972.404</b>	<b>(5,30)</b>

*Belanja Modal Tanah Rp0,00*

### B.5.1. Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

*Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp60.180.270.854,00*

### B.5.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp60.180.270.854,00 dan Rp67.300.311.336,00.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar 10,58 persen dibanding realisasi per 31 Desember 2020. Hal ini disebabkan karena adanya kebijakan *refocusing* anggaran di Tahun 2021.

Termasuk dalam Belanja Modal Peralatan dan Mesin MAK 532111 merupakan belanja *ekstrakomptable* senilai Rp10.278.028,00 yang berdasarkan PMK 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN seharusnya menggunakan MAK 521111. Atas kesalahan penggunaan MAK 532111 tersebut, tidak dapat dilakukan ralat SPM karena sesuai PMK Nomor 190/PMK.05/2021, koreksi sebagian MAK dalam satu SPM tidak dimungkinkan. Namun, pencatatan transaksi beban asset *ekstrakomptable* telah dilakukan secara otomatis pada saat dilakukan pendetailan asset.

Tabel 23 Kesalahan MAK Belanja *Ekstrakomptable* dengan MAK Belanja Modal

(Dalam Rupiah)

No.	Keterangan	Jumlah	Nilai Total	Akun Awal	Akun Seharusnya
1	Pembelian Blender Philips Problenser White (Di bawah Nilai Kapitalisasi)	2	1.939.300	532111	521111
2	Pembelian Exhaust/Blower Panasonic FV 20TGU5 (Di bawah Nilai Kapitalisasi)	1	462.000	532111	521111
3	Pembelian Tripod Camera untuk Kegiatan Dit. Keuangan Negara dan Analisis Moneter (Di bawah Nilai Kapitalisasi)	1	555.000	532111	521111
4	Pembelian alat kantor kegiatan FMSRB (Di bawah Nilai Kapitalisasi)	2	1.772.728	532111	521111
5	Pembelian Eksternal Hardisk (Di bawah Nilai Kapitalisasi)	5	4.950.000	532111	521111
6	Pembelian Mi TV Stick (Di bawah Nilai Kapitalisasi)	1	599.000	532111	521111
<b>TOTAL</b>		<b>12</b>	<b>10.278.028</b>		

Termasuk dalam dalam Belanja Modal Aset Tetap Renovasi (MAK 536111) merupakan Belanja Peralatan dan Mesin senilai Rp16.500.000,00 yang tidak dapat dilakukan koreksi melalui ralat SPM dikarenakan koreksi sebagian MAK dalam satu SPM tidak dimungkinkan sesuai dengan PMK Nomor 190/PMK.05/2021.

Tabel 24 Kesalahan Belanja *Intrakomptable*

(Dalam Rupiah)

No.	Keterangan	Jumlah	Nilai Total	Akun Awal	Akun Seharusnya
1.	Pengadaan Hardisk WD My Cloud Duo 8 TB dan Seagate 8 TB Bacup Hub	3	16.500.000	536111	532111
<b>TOTAL</b>		<b>3</b>	<b>16.500.000</b>		

Termasuk dalam Belanja Keperluan Perkantoran (MAK 521111) merupakan Belanja Modal Peralatan dan Mesin senilai Rp1.111.300,00 yang tidak dapat dilakukan koreksi melalui ralat SPM dikarenakan koreksi sebagian MAK dalam satu SPM tidak dimungkinkan sesuai dengan PMK Nomor 190/PMK.05/2021.

Tabel 25 Kesalahan MAK Belanja Belanja Modal dengan MAK Belanja Ekstrakomptable

No.	Keterangan	Jumlah	Nilai Total	Akun Awal	Akun Seharusnya
1.	Pembelian Peralatan Komputer: Speaker	1	1.111.300	521111	532111
<b>TOTAL</b>		<b>1</b>	<b>1.111.300</b>		

Perbandingan realisasi belanja modal peralatan dan mesin tersaji di bawah ini.

Tabel 26 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.194.720.855	65.318.197.574	(9,37)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi Covid	632.056.000	1.855.831.762	
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	353.493.999	126.282.000	179,92
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>60.180.270.854</b>	<b>67.300.311.336</b>	<b>(10,58)</b>
Pengembalian Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>60.180.270.854</b>	<b>67.300.311.336</b>	<b>(10,58)</b>

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2021 meliputi antara lain pengadaan notebook sebanyak 621 unit dan PC sebanyak 287 unit untuk mendukung pelaksanaan sistem kerja *Integrated Digital Workspace* di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.

*Belanja Modal Gedung dan Bangunan*  
Rp1.908.913.000,00

### B.5.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp1.908.913.000,00 dan Rp10.490.340.500,00.

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar 81,80 persen dibanding realisasi per 31 Desember 2020. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2021 terdapat kebijakan *refocusing* anggaran, sehingga terdapat rencana pembangunan/renovasi gedung yang tidak terlaksana.

Tabel 27 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	1.908.913.000	10.534.215.500	(81,88)
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>1.908.913.000</b>	<b>10.534.215.500</b>	<b>(81,88)</b>
Pengembalian Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	(43.875.000)	(100,00)
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.908.913.000</b>	<b>10.490.340.500</b>	<b>(81,80)</b>

Realisasi belanja penambahan nilai modal Gedung dan bangunan berasal dari renovasi Gedung Kantor milik Kementerian PPN/Bappenas. Termasuk dalam Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan (MAK 533121) merupakan Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset senilai Rp345.271.000,00 yang tidak dapat dilakukan koreksi akun karena akan mengakibatkan pagu minus pada MAK 533121.

Tabel 28 Kesalahan MAK Belanja Modal Gedung dan Bangunan dengan MAK Belanja Modal Lainnya

(dalam rupiah)

Keterangan	Jumlah	Nilai Total	Akun Awal	Akun Seharusnya
Pekerjaan Rehabilitasi Garasi Bus Komplek Jatisari	1	148.300.000	536121	533121
Pekerjaan Rehabilitasi Pagar, Saluran, dan Jalan di Komplek Bappenas Jatisampurna	3	196.971.000	536121	533121
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>345.271.000</b>		

*Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp0,00*

#### **B.5.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

*Belanja Modal Lainnya Rp16.509.166.839,00*

#### **B.5.5. Belanja Modal Lainnya**

Realisasi Belanja Modal lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp16.509.166.839,00 dan Rp5.203.320.568,00.

Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2021 mengalami peningkatan sebesar 217,28 persen dibanding realisasi per 31

Desember 2020. Hal ini disebabkan adanya pekerjaan renovasi Kantor Gedung Wisma Bakrie 2 dan Rumah Dinas Menteri Jalan Widya Chandra, serta pembelian dan pengembangan asset tak berwujud berupa *software*.

Tabel 29 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Belanja Modal Lainnya	10.061.298.539	3.880.999.368	159,25
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau aset	6.447.868.300	1.322.321.200	387,62
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>16.509.166.839</b>	<b>5.203.320.568</b>	<b>217,28</b>
Pengembalian Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>16.509.166.839</b>	<b>5.203.320.568</b>	<b>217,28</b>

#### B.5.6. Informasi Target dan Realisasi Capaian Output Prioritas Nasional

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021, pada Kementerian PPN/Bappenas terdapat alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu Prioritas Nasional I dan VII.

Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, Target dan Realisasi Output dari masing-masing Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:

##### 1) PN I: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

Pagu Anggaran PN I adalah Rp3.552.873.000,00 dan total realisasi sebesar Rp3.548.387.232,00. Beberapa Program/Kegiatan dalam PN I ini antara lain sebagai berikut:

No	Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Satuan Output	Target	Capaian Output	%
1	Pengembangan Pola Pendanaan Pengembangan Geopark	3.552.873.000	3.548.387.232	99,87	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100
	<b>Jumlah</b>	<b>3.552.873.000</b>	<b>3.548.387.232</b>					<b>100</b>

**a. Progres Pencapaian Output (RO) K/L 2021: Pengembangan Pola Pendanaan Pengembangan Geopark**

Rincian Output Pengembangan Pola Pendanaan Pengembangan Geopark termasuk ke dalam Prioritas Nasional. Progres capaian pada tahun 2021 sebesar 100%, dengan rincian kegiatan yang sudah dilaksanakan diantaranya:

Rincian Output dilaksanakan dengan kerangka komponen Koordinasi Strategis Implementasi Rencana Aksi Nasional Pengembangan Geopark yang terintegrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGS) Tahun 2021 yaitu:

- 1) Kajian Kelembagaan Pengelolaan Geopark telah melaksanakan 2 kali pertemuan *Focus Group Discussion* dengan para pakar dan *stakeholder* pengelolaan Geopark dan juga telah melaksanakan serial rapat konsultasi dengan pakar bidang kelembagaan dan tata kelola kawasan serta pakar dan pelaku pengelolaan Capaian pelaksanaan kegiatan telah menjelaskan rekomendasi dan sintesa bentuk-bentuk pengelolaan yang dapat diterapkan dalam pengembangan Geopark, dalam kajian ini juga membahas terkait bagaimana bentuk kelembagaan mempengaruhi model/ skema pembiayaan yang dapat dilaksanakan oleh masing-masing Badan Pengelola Geopark. Dalam pengembangan sumber pendanaan pengembangan Geopark telah diselenggarakan *Geopark Virtual Exhibition* dan *Investment Forum* yang melibatkan seluruh *stakeholder* pengembangan Geopark khususnya pengelolal Geopark, pelaku usaha, badan usaha, filantropi dan para investor.
- 2) Telah dilaksanakan Sosialisasi Peraturan Menteri PPN No.15 tahun 2020 Geopark dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan baik virtual maupun pertemuan langsung, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah rangkaian Sosialisasi Rencana Aksi Pengembangan Geopark melalui program Indonesia *Geopark Youth Forum* (IGYF) yang dilaksanakan di Belitong UGGp, Geopark Ijen UGGp, Geopark Tambora, Toba Caldera UGGp, 2



kali pelaksanaan *workshop youth* di Batur UGGp bekerjasama dengan BPSDM-KESDM, pelaksanaan kunjungan kerja Menteri ke Geopark Ngarai Sianok-Maninjau, Belitong, pelaksanaan sosialisasi RAN dalam rangkaian acara Geopark Indonesia Summit 2021 baik dalam acara *virtual learning and advisory mission* yang menghadirkan Guy Martini Sekretaris Jendral Global Geopark Network, Konferensi Nasional Geopark Indonesia II yang dihadiri secara virtual oleh Presiden, Menkomarves (selalu Ketua Dewan Pengarah KNIGI, Menteri PPN/Bappenas (selaku Sekretaris Dewan Pengarah) dan 7 Menteri anggota KNIGI dalam mendukung pengembangan Geopark.

- 3) Telah dilaksanakan inventarisasi dan sinkronisasi data Rencana Pembangunan dalam rangka Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Nasional Pengembangan Geopark dan akan diintegrasikan dengan hasil capaian rencana kerja pemerintah. Sinkronisasi dilaksanakan secara internal melalui mitra Kementerian/Lembaga di Bappenas maupun secara eksternal. Dari hasil pemantauan masih terdapat rencana aksi yang belum diintegrasikan dengan rencana kerja K/L selanjutnya menjadi rekomendasi dalam proses penyusunan rencana kerja agar rencana aksi pengembangan Geopark dapat diurusutamakan dan dilaksanakan.
- 4) Telah dibangun sistem informasi dan pemantauan implementasi rencana aksi Nasional pengembangan geopark dengan fitur utama yaitu informasi matrik dan pemantaauan Rencana Aksi nasional Pengembangan Geopark dan didukung fitur data informasi Geopark di Indonesia dan fitur lainnya. Sistem Informasi Rencana Aksi Nasional Pengembangan Geopark yang sedang dikembangkan telah diujicoba dan publikasi, dan selanjutnya perlu dievaluasi, pemutakhiran berkala dan penyempurnaan.
- 5) Telah disusun pedoman untuk verifikasi penelaahan Rencana Induk Pengembangan Geopark dan inventarisasi data dan dokumen dalam rangka fasilitasi penyusunan Rencana Induk

Pengembangan Geopark. Telah disusun 2 rencana induk oleh pemerintah daerah dan difasilitasi berupa konsultasi dan verifikasi muatan rencana induk dan konsultasi untuk beberapa daerah yang akan menyusun maupun pemutakhiran rencana induk.

**b. Permasalahan Umum yang Dihadapi dan Upaya Percepatan Pencapaian Output (RO) K/L**

1) Pengaruh pandemi COVID-19 pada pencapaian output K/L

Kondisi pandemi COVID-19 pasti berpengaruh pada setiap sektor pembangunan, termasuk dalam pelaksanaan koordinasi Pengembangan Geopark. Pengaruh yang paling terasa adalah dampak penghematan refocusing anggaran dan metode pelaksanaan yang terbatas. Sesuai dengan kegiatan-kegiatan dalam pencapaian RO, memerlukan koordinasi yang intensif dan pelaksanaan pertemuan tatap muka. Namun kondisi tersebut masih dapat diatasi dengan penyesuaian dan pembiasaan koordinasi secara virtual serta penerapan protokol kesehatan saat pertemuan tatap muka dan tinjauan lapangan ke daerah untuk mencapai target.

2) Permasalahan Umum yang Dihadapi

Terjadi pemotongan anggaran kembali dalam rangka *refocusing* TA 2021 sehingga pelaksanaan pencapaian output seperti penyelenggaraan beberapa pertemuan khususnya dalam sosialisasi RAN Pengembangan Geopark harus dilakukan banyak penyesuaian khususnya dalam lingkup metode pelaksanaan.

**2) PN VII: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**

Pagu Anggaran PN VII adalah Rp7.830.571.000,00 dan total realisasi sebesar Rp7.814.704.226,00. Beberapa Program/Kegiatan dalam PN VII ini antara lain sebagai berikut:

No	Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Satuan Output	Target	Capaian Output	%
1	Knowledge Sharing Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST)	2.083.003.000	2.082.360.856	99,97	Kesepakatan	2	2	100
2	Sistem Perencanaan Pendanaan Pembangunan yang Terintegrasi dengan Penganggaran	5.747.568.000	5.732.343.370	99,73	Sistem Informasi	1	1	100
Jumlah		7.830.571.000	7.814.704.226					

### **Knowledge Sharing Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST)**

#### **a. Progres Pencapaian Output (RO) K/L 2021: Knowledge Sharing Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST)**

ProPN *Knowledge Sharing* Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular telah menghasilkan 2 kesepakatan atau 100% dari target RKP 2021. Sebagai *focal point* kerja sama pembangunan *Reverse Linkage dengan Islamic Development Bank (IsDB)*, Kementerian PPN/Bappenas mengkoordinasikan pelaksanaan kerja sama yaitu:

- 1) Kerja Sama Pengembangan Covid-19 IT *Surveillance System* (Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan, IsDB dan ADDO AI Pte yang berasal dari Singapura), yang diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah dalam menghadapi pandemi dan meningkatkan kesiapan dalam menghadapi tantangan kesehatan di masa mendatang;
- 2) Kerja Sama Pengembangan *Digital Halal Ecosystem* (Indonesia melalui Universitas Brawijaya, IsDB dan Serunai *Commerce* yang berasal dari Malaysia), sebagai salah satu upaya memperkuat industri halal sejalan dengan RPJMN 2020-2024

Selain itu, hingga triwulan IV Tahun 2021 telah dilaksanakan berbagai kegiatan kerja sama sebagai berikut:

- 1) Pelatihan Perancangan Kerja Sama Pembangunan Internasional yang Efektif.

Pelatihan Perancangan KPI yang Efektif diselenggarakan pada tanggal 18-21 Oktober 2021 di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kegiatan dihadiri oleh 29 peserta dari Kementerian/Lembaga, BUMN, swasta dan akademisi pengelola dan pelaksana kerja sama pembangunan internasional. Penyelenggaraan pelatihan merupakan bentuk tindak lanjut atas tantangan pelaksanaan KPI

yaitu belum efektifnya pengelolaan kerja sama pembangunan yang salah satunya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dalam merancang program kerja sama pembangunan.

Output kegiatan berupa rancangan proposal kerja sama yang telah ditindaklanjuti dan mendapat respon positif dari mitra pembangunan yaitu *Islamic Development Bank (IsDB)* untuk ditindaklanjuti menjadi kerja sama konkrit. Kegiatan memperoleh dukungan dari unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas seperti Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Pusbindiklatren, Biro Hukum dan Direktorat Sisdur PEPP yang mendorong penyelenggaraan pelatihan dapat menjadi agenda rutin setiap tahun.

2) Pendampingan dalam Perencanaan dan Penganggaran Tematik KSST.

KSST merupakan salah satu anggaran tematik APBN sebagaimana diatur dalam PMK No. 142/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penelaahan RKA-K/L dan Pengesahan DIPA dan Juklak Sesmen PPN No.4/2018 Tentang Renja K/L. Merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, Direktorat Politik Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Internasional melakukan pengendalian dan pemantauan RKP untuk anggaran tematik KSST.

3) Penguatan Pemanfaatan Pemberian Hibah dalam Kerangka KSST.

Dalam rangka pengelolaan hibah kepada pemerintah/lembaga asing, Pemerintah membentuk Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) sesuai amanat PP 57/2019 tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing. Peran Kementerian PPN/Bappenas dalam LDKPI: i) Menteri PPN/Kepala Bappenas selaku Komite Pengarah bersama Menkeu, Menlu dan Mensesneg yang bertugas memberikan arah kebijakan dan pengawasan; ii) Deputi Polhukhankam dan Direktur Politik Luar Negeri dan KPI selaku Kelompok Kerja Pemberian Hibah.

4) Pelaksanaan Tugas Tim Kornas KSS.

Kementerian PPN/Bappenas merupakan anggota Tim Koordinasi Nasional Kerja Sama Selatan-Selatan (Tim Kornas KSS) dan merupakan *co-chair* dari Kelompok Kerja 1 yang memiliki tugas terkait isu manajemen perencanaan dan pengembangan KSST Indonesia. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian PPN/Bappenas telah berperan aktif dalam berbagai pelaksanaan program kerja Tim Kornas KSS antara lain: 1) masukan substantif penyusunan laporan KSS 2020 meliputi penguatan instrumen KMP, peningkatan partisipasi aktor non pemerintah melalui penyusunan kajian pengukuran tingkat partisipasi, kontribusi aktif Indonesia dalam membentuk arsitektur pembangunan global (GPEDC, penyampaian VNR); 2) masukan penyusunan SOP *project management* KSS; 3) masukan penyusunan Panduan Monev KSS.

5) Kerja Sama Bidang *Trail Bridge Development*.

Tujuan kerja sama adalah pengurangan kemiskinan dengan mengurangi kesenjangan melalui pemanfaatan jembatan gantung untuk peningkatan akses pelayanan dasar, akses pasar dan kesempatan ekonomi di perdesaan dan daerah terpencil. Pada tahun 2021, telah dilakukan serangkaian koordinasi persiapan kerja sama antara Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, IsDB dan Helvetas (Swiss). Pada tahun 2021, telah diidentifikasi tahapan kerja sama antara lain: 1) *demonstration phase* fokus pada peningkatan kapasitas di tingkat lokal termasuk adaptasi desain yang ditawarkan; 2) *institutionalising phase* meliputi pengembangan kurikulum jembatan gantung di lembaga Pendidikan

6) *Capacity Development for Indonesia Village Development Innovation Programme*.

Sebagai tindak lanjut dari kerja sama triangular Indonesia-UNOSSC-ROK melalui *Capacity Development for Indonesia Village Development Innovation Programme*, Kementerian PPN/Bappenas bersama Kementerian Desa PDTT dan

UNOSSC melanjutkan inisiasi pembentukan *South-South Centre of Excellence for Village Innovation* (SSCEVI). Untuk mendapatkan data praktik unggulan inovasi desa, Kementerian PPN/Bappenas mendukung pendokumentasian praktik unggulan di desa-desa inovatif. Output kegiatan berupa terdokumentasinya praktik unggulan inovasi desa di 5 lokasi yaitu Pujon Kidul Malang, Batu Merah Ambon, Nglanggeran Gunungkidul, Sukarara Lombok Tengah, dan Kembang Kuning Lombok Timur.

7) *Capacity Building* dan Program Vaksinasi Dalam Rangka Mendukung Pembebasan Brucellosis di Republic Democratic Timor Leste (RDTL). Pada tahun 2021, telah diselenggarakan serangkaian pertemuan antara Kementerian PPN/Bappenas, Pusvetma, Kementerian Pertanian, KBRI Dili, dan Pemerintah RDTL untuk membahas rancangan kerja sama;

8) Penguatan Kemitraan Multi-Pihak dalam KSST.

Dalam rangka penguatan peran Kementerian PPN/Bappenas sebagai clearing house untuk percepatan pelaksanaan TPB/SDGs, penguatan Kemitraan Multi-Pihak (KMP) dalam KSST terus dilakukan untuk mendukung upaya mengatasi berbagai tantangan pembangunan. Pada tahun 2021, telah diselenggarakan Forum dan Dialog Kemitraan Multi-Pihak di berbagai daerah untuk sektor pertanian dan perkebunan, peternakan, dan pendidikan. Praktik-praktik KMP tersebut dalam hal ini berpotensi untuk direplikasi dan di-*scale up* di daerah maupun ke negara lain dalam kerangka KSST. Lebih lanjut, Kementerian PPN/Bappenas bersama UNESCAP juga telah menyusun draft akhir Modul Pelatihan Penguatan Kemitraan Multi Pihak dan Dokumentasi Praktik Unggulan KMP. Modul disusun sebagai referensi untuk meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan dalam menginstitusionalisasi KMP untuk mengatasi tantangan pembangunan.

#### **b. Permasalahan Umum yang Dihadapi dan Upaya Percepatan Pencapaian Output (RO) K/L**

1) Pengaruh pandemi COVID-19 pada pencapaian output (RO) K/L

- a. Penanganan pandemi berdampak pada pemotongan anggaran ProPN KSST melalui refocusing anggaran. Alokasi ProPN KSST yang semula Rp2,60 miliar menjadi Rp2,08 miliar (pada refocusing ke-4).
  - b. Terdapat penyesuaian prioritas bidang kerja sama ke arah penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi, (termasuk melalui sektor kesehatan dan lainnya).
  - c. Adaptasi pelaksanaan kerja sama pembangunan, semula hanya tatap muka menjadi *virtual* dan *hybrid*. Hal ini berdampak pada efektivitas pencapaian kualitas output.
  - d. Pemberlakuan periode PPKM yang dinamis mengakibatkan kegiatan yang dirancang dilaksanakan tatap muka dan hybrid tertunda ke triwulan selanjutnya. Selain itu, kebijakan karantina menyebabkan dibatalkannya kehadiran peserta maupun pembicara dari luar negeri.
- 2) Dalam perencanaan kerja sama, masalah yang dihadapi antara lain:
- a. Perubahan kebijakan K/L pelaksana menyebabkan terjadinya penyesuaian terhadap *implementing agency* dan lingkup kerja sama.
  - b. Masih perlunya kesiapan dalam memastikan keamanan data dalam kerja sama pembangunan (penggunaan data sharing perlu seleksi dan keamanan ekstra).
- 3) Dalam percepatan pencapaian RO, dilaksanakan upaya sebagai berikut:
- a. Peningkatan partisipasi swasta dalam kerja sama pembangunan untuk mendorong keberlanjutan kerja sama dan memberi manfaat bagi upaya peningkatan perdagangan dan investasi.
  - b. Memperkuat kerja sama triangular dengan mitra pembangunan seperti *Islamic Development Bank (IsDB)* dan *United Nations Office for SouthSouth Cooperation (UNOSSC)* untuk memperluas jangkauan dan tindak lanjut kerja sama, sekaligus sebagai sumber alternatif akibat keterbatasan anggaran.

- c. Mendorong Kemitraan Multi-Pihak untuk mensinergikan beragam pengetahuan, sumber daya, dan teknologi dari berbagai pemangku kepentingan, sehingga menghasilkan solusi yang dapat mengakomodasi setiap kepentingan tersebut.

### **Sistem Perencanaan Pendanaan Pembangunan yang Terintegrasi dengan Penganggaran.**

#### **a. Progres Pencapaian Output (RO) K/L 2021: Sistem Perencanaan Pendanaan Pembangunan yang Terintegrasi dengan Penganggaran.**

Rincian Output Sistem Perencanaan Pendanaan Pembangunan yang Terintegrasi dengan Penganggaran termasuk ke dalam Prioritas Nasional. Progres capaian pada tahun 2021 sebesar 100%, dengan rincian kegiatan yang sudah dilaksanakan diantaranya:

- 1) Mengembangkan KRISNA Renja K/L dalam proses perencanaan dan penganggaran tahunan;
- 2) Mengembangkan KRISNA Pagu untuk menyusun Pagu Indikatif dan Pagu Anggaran;
- 3) Mengembangkan KRISNA RKP untuk menyusun matriks pembangunan dan matriks major project RKP;
- 4) Mengembangkan KRISNA Selaras dan KRISNA DAK untuk digunakan pemerintah daerah dalam mengusulkan kegiatan daerah yang didanai pusat;
- 5) Mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran antara Sistem Informasi KRISNA Renja K/L dengan SAKTI RKA K/L dengan mekanisme interkoneksi dua arah;
- 6) Melakukan penyempurnaan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP);
- 7) Melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Sistem Informasi KRISNA kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah

Proses integrasi perencanaan dan penganggaran antar pemerintah pusat, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah dilakukan selama 5 tahun mulai tahun



2020 hingga 2025 dengan target masing-masing yang sudah dicantumkan dalam RPJMN 2020-2024.

Pada 7 Juli 2021 telah dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) Integrasi Sistem Perencanaan, Pengendalian Pembangunan antara Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan. Salah satu capaian atas MoU tersebut adalah perkuatan atas pertukaran data perencanaan dan penganggaran melalui interkoneksi dua arah antara Sistem Informasi KRISNA dan SAKTI RKA. Adanya interkoneksi dua arah tersebut bertujuan untuk menyederhanakan proses perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya data yang tersedia antara dua sistem akan digunakan sebagai dasar dalam proses review baseline bersama TA 2023 antara Kementerian PPN/Bappenas dengan Kementerian Keuangan.

Integrasi antara perencanaan pusat dan daerah telah tercermin pada Krisna RKP yang telah mengakomodir baik belanja K/L (Renja K/L) maupun DAK (Krisna DAK). Selain itu, usulan daerah dalam forum Musrenbangnas yang tertuang dalam Krisna Selaras sudah dapat ditelusuri di Krisna Renja melalui tagging selaras. Disisi lain, sinkronisasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam perencanaan dan penganggaran akan ditingkatkan lagi melalui penyusunan MoU Integrasi dan Sinergi dalam Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah. MoU ini sudah dalam tahap finalisasi draft akhir.

**b. Permasalahan Umum yang Dihadapi dan Upaya Percepatan Pencapaian Output (RO) K/L**

- 1) Pengaruh pandemi COVID-19 pada pencapaian output (RO) K/L. Kondisi pandemi COVID-19 pasti berpengaruh pada setiap sektor pembangunan, termasuk perencanaan dan penganggaran. Pengaruh yang paling terasa adalah aspek koordinasi baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sesuai dengan target Prioritas Nasional dalam hal

perencanaan dan penganggaran dimana adanya integrasi perencanaan dan penganggaran antara pemerintah pusat, pemerintah pusat dan daerah, serta antar pemerintah daerah, memerlukan koordinasi yang intensif. Namun kondisi tersebut tidak terlalu signifikan mempengaruhi ketercapaian target, karena sudah dapat diatasi dengan penyesuaian dan pembiasaan koordinasi secara virtual serta penerapan protokol kesehatan saat pertemuan tatap muka dan tinjauan lapangan ke daerah.

- 2) Permasalahan umum yang dihadapi dan upaya percepatan pencapaian output (RO) Saat ini telah dilakukan tahapan interkoneksi data antara Renja dan RKA K/L. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa hambatan antara lain:
  - a. Perbedaan struktur data antara Renja dan RKA, khususnya dalam hal lokasi RO; dan
  - b. Belum adanya mekanisme persetujuan 2 pihak dalam penyusunan RKA. Ke depan akan dilakukan upaya pengembangan atas permasalahan di atas sehingga dapat memastikan terwujudnya integrasi sistem perencanaan dan penganggaran.

## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di  
Bendahara  
Pengeluaran  
Rp73.005.701,00

### C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Kementerian PPN/Bappenas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp73.005.701,00 dan Rp77.254.593,00. Perbandingan Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Tabel 30 Perbandingan Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	per 31 Desember 2021	per 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Kas di Bendahara Pengeluaran - UP	14.228.000	6.609.800	-
Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	58.777.701	70.644.793	(16,80)
<b>Jumlah</b>	<b>73.005.701</b>	<b>77.254.593</b>	<b>(16,80)</b>

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran TUP merupakan sisa TUP pada Satker Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas (PPK DM III) sebesar Rp58.777.701,00 yang disetor pada tanggal 04 Januari 2022.

Pada tahun 2021, sumber Uang Persediaan yang dikelola oleh Kementerian PPN/Bappenas terdiri dari dua jenis yaitu dalam bentuk Uang Persediaan Tunai dan Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah (UP KKP) sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah. Adapun rincian proporsi pembagian UP KKP Tahun 2021 untuk masing - masing PPK adalah sebagai berikut:

Tabel 31 Rincian Pembagian Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah (UP KKP) TA 2021

(Dalam Rupiah)

NO	SATKER	PPK	UP KKP (40%)
1	SATKER BAPPENAS	DM I	100.000.000
2		DM II	113.333.333
3		DM III & ICCTF	216.666.667
4		DM IV	81.333.333
5		DM V	60.000.000
6		DM VI	46.666.667
7		03.01 P2A2	100.000.000
8		06.01 PPN I	47.333.333
9		06.02 PPN II	83.333.333
10		06.03 PPN III	80.000.000
11		06.04 PPN IV	53.333.333
12		06.05 PPN V	108.000.000
13		06.06 PPN VI	126.666.667
14		06.07 PPN VII	113.333.333
15		06.08 PPN VIII	100.000.000
16		06.09 PPN IX	146.666.667
17		06.10 PPN X	153.333.333
18		06.11 PPN XI	66.666.667
19		06.12 PPN XII	100.000.000
20		PPK PPN XVII	33.333.333
21		PPK PPN XVI (Compact 2)	36.666.667
22		PPK PPN XVIII	33.333.333
23	SATKER ICCTF	ICCTF	120.000.000
<b>Total</b>			<b>Rp 2.120.000.000</b>

*Kas Lainnya dan Setara Kas*  
Rp3.680.626.556,00

## C.2. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp3.680.626.556,00 dan Rp638.208.958,00. Kas Lainnya dan Setara Kas meliputi saldo kas lainnya di Bendahara Pengeluaran selain UP/TUP, kas lainnya dari hibah sudah disahkan dan kas lainnya dari hibah belum disahkan. Setara kas merupakan investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Tabel 32 Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	1.040.971.044	331.398.721	214,11
Kas Lainnya di K/L dari Hibah Sudah Disahkan	2.697.789.512	364.944.237	639,23
Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan	(58.134.000)	(58.134.000)	
<b>Jumlah</b>	<b>3.680.626.556</b>	<b>638.208.958</b>	<b>476,71</b>

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp3.680.626.556,00 terdiri dari Kas Lainnya di Bendahara

Pengeluaran sebesar Rp1.040.971.044,00 dan Kas Lainnya dari Hibah sebesar Rp2.639.655.512,00.

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo pada Satker Bappenas berupa setoran SSBP TAYL pada bulan Januari sampai dengan maret 2022 sebesar Rp1.040.971.044,00.

Kas Lainnya dari Hibah merupakan saldo pada Satker Bappenas berupa saldo kas lainnya dari hibah yang sudah disahkan sebesar Rp2.639.655.512,00 yang berasal dari proyek UNICEF sebesar Rp2.063.989.999,00, proyek UNFPA sebesar Rp173.800.997,00 dan proyek READSI sebesar Rp459.998.516,00. Sedangkan Kas Lainnya dari Hibah yang belum disahkan sebesar Rp(58.134.000,00) berasal dari proyek READSI untuk realisasi tahun 2020 dikarenakan dalam Aplikasi SAKTI belum mengakomodir untuk pengesahan belanja hibah Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL).

Rincian atas Kas Lainnya dan Setara Kas disajikan pada lampiran 3.

Belanja Dibayar di Muka  
Rp26.159.329.931,00

### C.3. Belanja Dibayar di Muka

Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp26.159.329.931,00 dan Rp41.221.576.013,00. Belanja Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya dengan perbandingan rincian sebagai berikut:

Tabel 33 Perbandingan Rincian Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

Jenis	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Karyasiswa PHRD	19.263.622.388	30.174.856.072	(36,16)
Karyasiswa PHRD Premium	-	10.718.249.489	(100,00)
Karyasiswa Program Coremap	1.644.121.166	328.470.452	400,54
Karyasiswa RM	5.229.016.209	-	-
Langganan Zoom selama 1 tahun	2.320.168	-	-
Sewa Kantor Lapangan Waisai	20.250.000	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>26.159.329.931</b>	<b>41.221.576.013</b>	<b>(36,54)</b>

Saldo Belanja Dibayar di Muka merupakan saldo pada Satker Bappenas dan Satker MWA ICCTF. Saldo Belanja Dibayar di Muka pada Satker

Bappenas berasal dari pembayaran di muka atas langganan aplikasi zoom selama 1 tahun pada PPK DM I dan tunjangan karyawan pada PPK PPN X. Saldo Belanja Dibayar Dimuka pada Satker MWA ICCTF berasal dari sewa kantor Lapangan Waisai untuk Yayasan PILI dan Yayasan Terumbu Karang Indonesia dengan rincian sebagaimana pada Lampiran 4.

Berikut adalah data penerima karyawan per 31 Desember 2021.

Tabel 34 Rincian Data Karyawan

TAHUN	PROGRAM					
	PHRD	JUMLAH	COREMAP	JUMLAH	PREMIUM /SS/RM	JUMLAH
2019	S2LP	8			S2LP	10
2020	S2LP	17			S2LP	30
	S2DN	250	S2LN	5	S3DN	3
2021	S2DN	314			S2LP	14
	JUMLAH 1	589	JUMLAH 2	5	JUMLAH 3	57
<b>TOTAL 1+2+3</b>				<b>651</b>		

Pendapatan yang Masih Harus Diterima  
Rp21.401.210,00

#### C.4. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp21.401.210,00 dan Rp502.342.500,00. Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa.

Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima adalah sebagai berikut:

Tabel 35 Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Satker Bappenas	21.401.210	502.342.500	-
Satker MWA ICCTF	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>21.401.210</b>	<b>502.342.500</b>	<b>(95,74)</b>

Rincian atas Pendapatan yang Masih Harus Diterima disajikan pada lampiran 5.

Piutang Bukan  
Pajak  
Rp0,00

### C.5. Piutang Bukan Pajak

Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp542.701.763,00. Perbandingan Rincian Piutang Bukan Pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 36 Perbandingan Rincian Piutang Bukan Pajak  
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Piutang PNPB	-	399.356.154	-
Piutang Lainnya	-	143.345.609	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>542.701.763</b>	<b>-</b>

Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

Rincian Piutang Bukan Pajak dan perhitungannya disajikan pada lampiran 5 dan 6.

Penyisihan  
Piutang Tidak  
Tertagih –  
Piutang Bukan  
Pajak  
Rp0,00

### C.6. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp(2.628.360,00). Perbandingan Rincian Penyisihan Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 37 Perbandingan Rincian Penyisihan Tidak Tertagih - Piutang  
Bukan Pajak per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Piutang PNPB	-	1.996.781	-
Piutang Lainnya	-	631.579	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>2.628.360</b>	<b>-</b>

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih berdasarkan kategori piutang disajikan sebagai berikut:

Tabel 38 Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah)

Kualitas	Nilai Piutang Jangka Pendek	% Penyisihan	Nilai
Piutang	Jk Pendek	Penyisihan	Penyisihan
<b>Piutang Bukan Pajak</b>			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	-		-
<b>Bagian Lancar TP/TGR</b>			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	-		-
<b>Bagian Lancar TPA</b>			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	-		-
<b>Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih</b>	-		-

Rincian Penyisihan Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak dan perhitungannya disajikan pada lampiran 5 dan 6.

Bagian Lancar  
Tagihan  
TP/TGR  
Rp0,00

### C.7. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Perbandingan Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) sebagai berikut:

Tabel 39 Perbandingan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Satker Bappenas	-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-	-



Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Penyisihan  
Piutang Tidak  
Tertagih – BL  
TGR/TGR  
Rp(0,00)

### C.8. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – BL TGR/TGR

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – BL TGR/TGR per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 Perbandingan rincian penyisihan piutang tidak tertagih BL/TGR adalah sebagai berikut:

Tabel 40 Perbandingan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih BL TGR/TGR per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Satker Bappenas	-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-	-

Tabel 41 Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-BL TGR/TGR per 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah)

Kualitas	Nilai Piutang Jangka Pendek	% Penyisihan	Nilai
Piutang	Jk Pendek	Penyisihan	Penyisihan
<b>Piutang Bukan Pajak</b>			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	-		-
<b>Bagian Lancar TP/TGR</b>			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	-		-
<b>Bagian Lancar TPA</b>			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	-		-
<b>Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih</b>	-		-

Penyisihan piutang tak tertagih – piutang lancar merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

Persediaan  
Rp4.700.405.446,00

### C.9. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Saldo Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp4.700.405.446,00 dan Rp6.322.466.604,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 42 Perbandingan Rincian Persediaan  
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Barang Konsumsi	4.349.784.401	5.864.033.341	(25,82)
Bahan untuk Pemeliharaan	251.540.891	214.739.672	17,14
Suku Cadang	32.855.064	32.868.924	(0,04)
Pita Cukai, Materai & Leges	-	-	-
Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	-	-	-
Hewan dan Tanaman untuk diserahkan kepada masyarakat	-	-	-
Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat	-	93.350.000	(100,00)
Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	-	-	-
Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada masyarakat	-	-	-
Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan kepada masyarakat	-	-	-
Persediaan Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat	-	-	-
Bahan Baku	66.000	273.570	(75,87)
Persediaan Lainnya	66.159.090	117.201.097	(43,55)
<b>Jumlah</b>	<b>4.700.405.446</b>	<b>6.322.466.604</b>	<b>(25,66)</b>

Penjelasan mutasi persediaan adalah sebagai berikut:

Tabel 43 Mutasi Persediaan

(Dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	6.322.466.604
<b>Mutasi tambah :</b>	
Saldo Awal	1.260.500
Pembelian	10.536.774.356
Hibah (Masuk)	2.735.390.610
Hasil Opname Fisik Lebih	87.463.577
Pencatatan Kembali Persediaan Tidak dikuasai TAB	885.024.941
Perolehan Lainnya	81.372.500
Reklas Masuk	180.000
Pencatatan Kembali Persediaan Tidak dikuasai TAYL	91.900
<b>Mutasi Kurang :</b>	
Koreksi Penyesuaian Persediaan	(16.861.900)
Pemakaian	(14.948.486.540)
Penyerahan kepada Masyarakat atau Pemda Tugas Pembantuan	(2.111.900)
Barang Usang	(94.702.861)
Reklas Keluar	(885.244.841)
Koreksi Nilai Tambah	(1.755.000)
Hasil Opname Fisik Lebih	(456.500)
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>4.700.405.446</b>

Saldo akhir persediaan merupakan gabungan dari Laporan Barang Persediaan atas 34 (tiga puluh empat) Satuan Kerja. Khusus untuk Satuan Kerja Kantor Pusat Kementerian PPN/Bappenas, nilai persediaan menggunakan metode *First In First Out (FIFO)* pada Aplikasi SAKTI dari 23 (dua puluh tiga) Pejabat Pembuat Komitmen selaku Pembantu Kuasa Pengguna Barang (sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 234/PMK.05/2020 tentang Perubahan atas PMK Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat).

Satuan kerja yang masih memiliki saldo persediaan per 31 Desember 2021 yaitu:

Tabel 44 Saldo Persediaan pada Satuan Kerja

(Dalam Rupiah)

Satuan Kerja	Saldo
Kantor Pusat Kementerian PPN/Bappenas	4.670.124.298
Bappeda Provinsi Sumatera Utara	0
Bappeda Provinsi Kalimantan Barat	0
Bappeda Provinsi Kalimantan Timur	0
Bappeda Provinsi Kalimantan Utara	0
Bappeda Sulawesi Utara	0
Bappeda Sulawesi Tengah	0
Bappeda Sulawesi Selatan	15.361.148
Bappeda Kepulauan Riau	0
Bappeda Maluku Utara	0
Bappeda Sulawesi Tenggara	0
Bappeda NTT	0
Majelis Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/ICCTF	14.920.000
Bappeda Bali	0
<b>Total</b>	<b>4.700.405.446</b>

Per 31 Desember 2021 terdapat persediaan berupa peralatan dan mesin yang akan diserahkan ke masyarakat pada Satuan Kerja Kantor Pusat Kementerian PPN/Bappenas namun tidak disajikan dalam neraca karena sudah tidak berada dalam penguasaan dan dalam proses mendapatkan persetujuan pemindahtanganan dari Pengelola Barang sesuai PMK Nomor 181 /PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara Pasal 47 sebesar Rp2.728.000.498,00 (Dua milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan rupiah), yaitu:

- a. JFPR – ADB sebesar Rp1.283.830.003,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu tiga rupiah), dalam proses persetujuan hibah dari Direktorat PKNSI Kementerian Keuangan sesuai Surat Kepala Biro Umum kepada Direktur PKNSI, Kementerian Keuangan nomor 16546/PL.08.03/B.05/B/12/2021 tanggal 13 Desember 2021;
- b. ISED – GIZ kepada Bappeda Mataram sebesar Rp205.746.115,00 (dua ratus lima juta tujuh ratus empat puluh enam ribu seratus lima belas), dalam proses penerbitan SK Penghapusan, sesuai BAST Nomor 17317 /PL.08.03/SES/T/12/2021 dan 978/6558/01.Bappeda tanggal 30 Desember 2021;
- c. KSI – DFAT kepada Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia sebesar Rp332.221.850,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus lima puluh), dalam proses persetujuan hibah dari Direktorat PKNSI Kementerian Keuangan, sesuai Surat Kepala Biro Umum Nomor 10909/PL.08.03/B.05/B/09/2021 tanggal 3 September 2021 perihal Permohonan Persetujuan Hibah Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Lain-lain;
- d. Program Compact kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang telah mendapat persetujuan Menteri PPN/Kepala Bappenas dan sedang dalam proses serah terima senilai Rp906.202.530,00 (sembilan ratus enam juta dua ratus dua ribu lima ratus tiga puluh), sesuai SK Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.122/M.PPN/HK/10/2021 tanggal 6 Oktober 2021. Jenis barang yang dihibahkan yaitu Workstation Desktop PC dan UPS, Server dan UPS, storage dan UPS, 3 in 1 Printer Scanner, Mini PC dan UPS, Wireless Router, Switch Hub, ArcGIS, Handled GPS dan Cable.

Rincian peralatan dan mesin yang akan diserahkan ke masyarakat per 31 Desember 2021 disajikan pada lampiran 8 dan lampiran 24.

### C.9.1 Barang Konsumsi

Saldo Barang Konsumsi per per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp4.349.784.401,00 dan Rp5.864.033.341,00 dan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 45 Mutasi Barang Konsumsi

(Dalam Rupiah)	
<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020</b>	<b>5.864.033.341</b>
<b>Mutasi tambah :</b>	
Pembelian	9.791.204.949
Koreksi Penyesuaian Persediaan	-
Hibah (Masuk)	-
Hasil Opname Fisik Lebih	87.463.577
Reklasifikasi Masuk	701.841.971
Saldo Awal	1.260.500
Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap	91.900
<b>Mutasi Kurang :</b>	
Koreksi Penyesuaian Persediaan	(16.861.900)
Pemakaian	(11.374.082.542)
Barang Usang	(94.702.861)
Reklas Keluar	(608.709.534)
Koreksi Nilai Berkurang	(1.755.000)
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>4.349.784.401</b>

Mutasi tambah:

1. Pembelian merupakan transaksi perolehan persediaan barang konsumsi yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN melalui Satuan Kerja Kantor Pusat dan Satuan Kerja Dekonsentrasi pada periode berjalan, antara lain berupa pengadaan alat tulis kantor, barang cetakan, alat tulis kantor lainnya, tinta/toner printer, bahan komputer, obat - obatan dan lain – lain.
2. Hasil Opname Fisik Lebih merupakan transaksi pencatatan persediaan barang konsumsi berdasarkan hasil opname fisik lebih, antara lain pada alat tulis kantor, tinta/toner printer, dan lain - lain.
3. Reklasifikasi Masuk merupakan transaksi pencatatan persediaan barang konsumsi yang sebelumnya dicatat dengan klasifikasi persediaan yang lain. Reklasifikasi masuk barang konsumsi antara lain adalah alat tulis kantor, tinta/toner printer, bahan komputer, obat – obatan dan lain – lain.
4. Saldo Awal merupakan transaksi yang digunakan untuk membukukan persediaan yang diperoleh sebelum tahun anggaran berjalan namun belum dicatat dan didaftarkan dalam buku/daftar

persediaan periode sebelumnya, saldo awal terdapat pada Satuan Kerja Dana Dekonsentrasi Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu berupa alat tulis kantor.

5. Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap merupakan transaksi pencatatan persediaan barang konsumsi yang sebelumnya dicatat dengan klasifikasi aset tetap, antara lain adalah perangkat komputer berupa mouse.

Mutasi kurang:

1. Koreksi Penyesuaian Persediaan merupakan transaksi yang muncul akibat dari koreksi nilai berkurang berupa alat tulis kantor.
2. Pemakaian merupakan transaksi yang digunakan untuk membukukan pemakaian/habis pakai persediaan barang konsumsi pada periode berjalan. Sebagian besar pemakaian terjadi pada alat tulis kantor, barang cetakan, tinta/toner printer, bahan komputer, obat – obatan, dan lain – lain.
3. Barang Usang merupakan transaksi yang digunakan untuk membukukan persediaan yang telah rusak/usang, yaitu berupa alat tulis kantor.
4. Reklasifikasi Keluar merupakan transaksi yang digunakan untuk menghapus persediaan barang konsumsi untuk dicatat kembali ke dalam klasifikasi persediaan yang baru, antara lain berupa alat tulis kantor, tinta/toner printer, obat – obatan, dan lain – lain.
5. Koreksi Nilai Berkurang merupakan transaksi yang digunakan untuk membukukan transaksi perubahan nilai barang dikarenakan adanya kesalahan pembukuan pada nilai, yaitu berupa alat tulis kantor.

### **C.9.2 Bahan untuk Pemeliharaan**

Saldo Bahan untuk Pemeliharaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp251.540.891,00 dan Rp214.739.672,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 46 Mutasi Bahan untuk Pemeliharaan

(Dalam Rupiah)

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020</b>	<b>214.739.672</b>
<b>Mutasi tambah :</b>	
Pembelian	636.187.750
Koreksi Penyesuaian Persediaan	-
Hasil Opname Fisik Lebih	-
Reklasifikasi Masuk	169.706.770
Perolehan Lainnya	81.372.500
<b>Mutasi Kurang :</b>	
Hasil Opname Fisik Lebih	(456.500)
Pemakaian	(679.000.001)
Reklasifikasi Keluar	(171.009.300)
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>251.540.891</b>

## Mutasi tambah:

1. Pembelian merupakan transaksi perolehan persediaan bahan untuk pemeliharaan yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN melalui Satuan Kerja Kantor Pusat dan Satuan Kerja Dekonsentrasi pada periode berjalan, antara lain pembelian keset dan tempat sampah serta kunci, kran dan semprotan, dan lain - lain.
2. Reklasifikasi Masuk merupakan transaksi pencatatan persediaan bahan untuk pemeliharaan yang sebelumnya dicatat dengan klasifikasi persediaan lain, antara lain berupa alat – alat pel dan lap, perabot kantor lainnya, dan lain – lain.
3. Perolehan lainnya merupakan transaksi perolehan yang tidak termasuk pada transaksi-transaksi perolehan pembelian. Pada periode berjalan terdapat transaksi perolehan lainnya perabotan kantor lainnya berupa hepa filter dan kantong nafas.

## Mutasi kurang:

1. Hasil Opname Fisik Lebih merupakan transaksi pencatatan persediaan bahan untuk pemeliharaan berdasarkan hasil opname fisik lebih, antara lain berupa kunci, kran dan semprotan, alat untuk makan dan minum, serta kuas.
2. Pemakaian merupakan transaksi yang digunakan untuk membukukan pemakaian/habis pakai persediaan bahan untuk

pemeliharaan pada periode berjalan, antara lain berupa kunci, kran dan semprotan, perabotan lainnya, dan lain – lain.

3. Reklasifikasi Keluar merupakan transaksi yang digunakan untuk menghapus persediaan bahan untuk pemeliharaan untuk dicatat kembali ke dalam klasifikasi persediaan yang baru, antara lain berupa keset dan tempat sampah serta kunci, kran dan semprotan.

### C.9.3 Suku Cadang

Saldo Suku Cadang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp32.855.064,00 dan Rp32.868.924,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 47 Mutasi Suku Cadang

(Dalam Rupiah)	
<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020</b>	<b>32.868.924</b>
<b>Mutasi tambah :</b>	
Pembelian	2.420.000
Koreksi Penyesuaian Persediaan	-
Hasil Opname Fisik Lebih	-
Reklasifikasi Masuk	180.000
<b>Mutasi Kurang :</b>	
Pemakaian	(2.433.860)
Reklasifikasi Keluar	(180.000)
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>32.855.064</b>

Mutasi tambah:

1. Pembelian merupakan transaksi perolehan persediaan suku cadang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN melalui Satuan Kerja Kantor Pusat dan Satuan Kerja Dekonsentrasi pada periode berjalan, antara lain berupa pengadaan suku cadang alat komunikasi berupa protector TC 4/6.
2. Reklasifikasi Masuk merupakan transaksi pencatatan persediaan suku cadang yang sebelumnya dicatat dengan klasifikasi persediaan lain, yaitu berupa alat kedokteran umum berupa gunting anatomi.

Mutasi kurang:

1. Pemakaian merupakan transaksi yang digunakan untuk membukukan pemakaian/habis pakai persediaan suku cadang pada periode berjalan, yaitu antara lain pemakaian pada suku cadang alat komunikasi.



2. Reklasifikasi Keluar merupakan transaksi yang digunakan untuk menghapus persediaan suku cadang untuk dicatat kembali ke dalam klasifikasi persediaan yang baru, yaitu reklasifikasi keluar suku cadang alat kedokteran umum berupa gunting anatomi.

#### C.9.4 Pita Cukai, Materai dan Leges

Saldo Pita Cukai, Materai dan Leges per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 48 Mutasi Pita Cukai, Materai dan Leges

(Dalam Rupiah)

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020</b>	-
<b>Mutasi tambah :</b>	
Pembelian	53.160.027
<b>Mutasi Kurang :</b>	
Pemakaian	(1.954.450)
Reklas Keluar	(51.205.577)
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	-

Mutasi tambah:

1. Pembelian merupakan transaksi perolehan persediaan pita cukai, materai dan leges yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN melalui Satuan Kerja Kantor Pusat dan Satuan Kerja Dekonsentrasi pada periode berjalan, antara lain pengadaan berbagai jenis materai, dan lain – lain.

Mutasi kurang:

1. Pemakaian merupakan transaksi yang digunakan untuk membukukan pemakaian/habis pakai persediaan pita cukai, materai dan leges pada periode berjalan, antara lain pemakaian atas materai 10.000.
2. Reklasifikasi Keluar merupakan transaksi yang digunakan untuk menghapus persediaan pita cukai, materai dan leges untuk dicatat kembali ke dalam klasifikasi persediaan yang baru. Pada periode berjalan terdapat reklasifikasi keluar berbagai jenis materai dan lain – lain.

### C.9.5 Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat

Saldo Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 49 Mutasi Tanah dan Bangunan untuk Dijual atau Diserahkan Kepada Masyarakat

(Dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	-
Mutasi tambah :	
Mutasi Kurang :	
Penyerahan kepada Masyarakat	-
Saldo per 31 Desember 2021	-

Tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang pada tanah dan bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat di Kementerian PPN/Bappenas sampai dengan 31 Desember 2021.

### C.9.6 Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat

Saldo Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 50 Mutasi Hewan dan Tanaman untuk Dijual atau Diserahkan Kepada Masyarakat

(Dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	-
Mutasi tambah :	
Mutasi Kurang :	
Penyerahan kepada Masyarakat	-
Saldo per 31 Desember 2021	-

Tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang pada hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat di Kementerian PPN/Bappenas sampai dengan 31 Desember 2021.

### C.9.7 Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat

Saldo Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp93.350.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 51 Mutasi Peralatan dan Mesin untuk Dijual atau Diserahkan Kepada Masyarakat

(Dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	93.350.000
<b>Mutasi tambah :</b>	
Pembelian	-
Reklasifikasi Masuk	338.800
Hibah (Masuk)	2.735.390.610
<b>Mutasi Kurang :</b>	
Pemakaian/Diserahkan ke Masyarakat	(2.828.740.610)
Penyerahan kepada Masyarakat atau Pemda Tugas Pembantuan	-
Reklasifikasi Keluar	(338.800)
Penyerahan kepada Masyarakat	-
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>-</b>

Mutasi tambah:

1. Hibah (Masuk) merupakan transaksi perolehan peralatan dan mesin yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis dari luar Pemerintah Pusat. Hibah masuk yang berasal dari eks proyek ICBDA – USAID, SCAA – USAID, ISED – GIZ, dan KSI – DFAT antara lain berupa kendaraan bermotor, brandkas, mesin genset, dan lain-lain.
2. Reklasifikasi Masuk merupakan transaksi pencatatan peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat yang sebelumnya dicatat dengan klasifikasi persediaan lain, yaitu berupa mata bor beton 6 mm.

Mutasi kurang:

1. Pemakaian/Diserahkan ke Masyarakat merupakan transaksi yang digunakan untuk membukukan pemakaian/penyerahan peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat pada periode berjalan, antara lain berupa kendaraan bermotor, brandkas, mesin genset, dan lain-lain.

2. Reklasifikasi Keluar merupakan transaksi yang digunakan untuk menghapus peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat untuk dicatat kembali ke dalam klasifikasi persediaan yang baru, pada periode ini terdapat reklasifikasi keluar peralatan dan mesin berupa mata bor beton 6 mm.

Mutasi tambah atas peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat tersebut terdiri dari:

- a. Proyek Indonesia *Cooperative Business Development Alliance* (ICBDA) – USAID yang akan dihibahkan kepada KSU Nimboran Kencana Papua senilai Rp1.035.602.645 (satu milyar tiga puluh lima juta enam ratus dua ribu enam ratus empat puluh lima rupiah).
- b. Proyek *Sustainable Cooperative Agriculture Alliance* (SCAA) yang akan dihibahkan kepada KJUB Puspeta Luwu Sulsel dan KSU Nimboran Kencana Papua senilai Rp1.161.820.000 (satu milyar seratus enam puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).
- c. Proyek *Knowledge Sector Initiative* (KSI) – DFAT yang akan dihibahkan kepada Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia senilai Rp332.221.850 (tiga ratus tiga puluh dua juta dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- d. Proyek *Innovation and Investment for Inclusive Sustainable Economic Development* (ISED) – Mataram, Lombok yang dihibahkan kepada Bappeda Provinsi NTB senilai Rp205.746.115 (dua ratus lima juta tujuh ratus empat puluh enam ribu seratus lima belas rupiah).

#### **C.9.8 Aset Lain-lain untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat**

Saldo Aset Lain-lain untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 52 Mutasi Aset Lain-lain untuk Dijual  
atau Diserahkan Kepada Masyarakat

(Dalam Rupiah)

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020</b>	-
<b>Mutasi tambah :</b>	
<b>Mutasi Kurang :</b>	
Penyerahan kepada Masyarakat	-
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	-

Tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang pada aset lain-lain untuk diserahkan kepada masyarakat di Kementerian PPN/Bappenas sampai dengan 31 Desember 2021.

### C.9.9 Barang Persediaan Lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat

Saldo Barang Persediaan Lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 53 Mutasi Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual  
atau Diserahkan Kepada Masyarakat

(Dalam Rupiah)

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020</b>	-
<b>Mutasi tambah :</b>	
Pembelian	53.801.630
Koreksi Penyesuaian Persediaan	-
<b>Mutasi Kurang :</b>	
Reklasifikasi Keluar	(53.801.630)
Penyerahan kepada Masyarakat atau Pemda Tugas Pembantuan	-
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	-

Mutasi tambah:

1. Pembelian merupakan transaksi perolehan barang persediaan lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN melalui Satuan Kerja Kantor Pusat dan Satuan Kerja Dekonsentrasi pada periode berjalan, antara lain berupa alat tulis kantor.

Mutasi kurang:

1. Reklasifikasi Keluar merupakan transaksi yang digunakan untuk menghapus barang persediaan lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat untuk dicatat kembali ke dalam klasifikasi persediaan yang baru, antara lain berupa alat tulis kantor.

#### C.9.10 Bahan Baku

Saldo Bahan Baku per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp66.000,00 dan Rp273.570,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 54 Mutasi Bahan Baku

(Dalam Rupiah)

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020</b>	<b>273.570</b>
<b>Mutasi tambah :</b>	
Pembelian	-
Reklasifikasi Masuk	2.069.100
<b>Mutasi Kurang :</b>	
Pemakaian	(2.276.670)
Reklasifikasi Keluar	-
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>66.000</b>

Mutasi tambah:

1. Reklasifikasi Masuk merupakan transaksi pencatatan persediaan bahan baku yang sebelumnya dicatat dengan klasifikasi persediaan lain. Reklasifikasi masuk antara lain berupa cat, minyak cat/thinner dan bahan bangunan dan konstruksi lainnya.

Mutasi kurang:

1. Pemakaian merupakan transaksi yang digunakan untuk membukukan pemakaian/habis pakai persediaan bahan baku pada periode berjalan, antara lain berupa cat, minyak cat/thinner, dan bahan bangunan dan konstruksi lainnya.

### C.9.11 Persediaan Lainnya

Saldo Persediaan Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp66.159.090,00 dan Rp117.201.097,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 55 Mutasi Persediaan Lainnya

(Dalam Rupiah)

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020</b>	<b>117.201.097</b>
<b>Mutasi tambah :</b>	
Pembelian	-
Reklasifikasi Masuk	11.068.300
<b>Mutasi Kurang :</b>	
Reklasifikasi Keluar	-
Pemakaian	(62.110.307)
Koreksi Penyesuaian Persediaan	-
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>66.159.090</b>

Mutasi tambah:

1. Reklasifikasi Masuk merupakan transaksi pencatatan persediaan bahan baku yang sebelumnya dicatat dengan klasifikasi persediaan lain. Reklasifikasi masuk persediaan lainnya berupa obat cair dan obat padat.

Mutasi kurang:

1. Pemakaian merupakan transaksi yang digunakan untuk membukukan pemakaian/habis pakai persediaan bahan baku pada periode berjalan, antara lain berupa obat cair dan obat padat.

Rincian Persediaan disajikan pada lampiran 7 dan lampiran 8.

Tanah  
Rp1.541.450.676.000,00

### C.10. Tanah

Tanah yang dimiliki Kementerian PPN/Bappenas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.541.450.676.000,00 dan Rp1.541.450.676.000,00. Berikut tabel perbandingan aset tetap tanah tahun 2021 dan tahun 2020:

Tabel 56 Perbandingan Tanah  
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Satker Bappenas	1.541.450.676.000	1.541.450.676.000	-
<b>Jumlah</b>	<b>1.541.450.676.000</b>	<b>1.541.450.676.000</b>	<b>-</b>

Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut :

Tabel 57 Mutasi Aset Tetap Berupa Tanah

(Dalam Rupiah)

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020</b>	<b>1.541.450.676.000</b>
<b>Mutasi tambah :</b>	
Koreksi Penilaian Kembali BMN	-
	-
<b>Mutasi Kurang :</b>	
	-
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>1.541.450.676.000</b>

Tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang pada aset tanah di Kementerian PPN/Bappenas sampai dengan 31 Desember 2021.

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 58 Rincian Saldo Tanah per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

NO	LUAS (M2)		NAMA BARANG	NOMOR ASET	NILAI	LOKASI
	HASIL INVENTARIS	SAKTI				
1	12.000	11.943	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	13	58.011.750.000	Jati Sari, Bekasi
2	203	135	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	1	2.135.019.000	Buncit PLK XI, Jakarta Selatan
3	172	70	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	2	1.073.111.000	Siaga Krobokan, Jakarta Selatan
4	160	160	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	8	401.508.000	Sawangan, Depok
5	28.172	28.172	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	4	134.318.726.000	Jati Sampurna, Bekasi
6	208	306	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	12	764.787.000	Sawangan, Depok
7	160	160	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	10	401.508.000	Sawangan, Depok
8	160	160	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	9	401.508.000	Sawangan, Depok
9	140	140	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	11	351.319.000	Sawangan, Depok
10	2.035	2.205	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	6	10.077.234.000	Jati Sampurna, Bekasi
11	27.022	27.022	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	3	125.785.408.000	Jati Sari, Bekasi
12	523	523	Tanah Bangunan Gudang	1	10.019.755.000	Tawakal Ujung Grogol, Jakarta, Barat
13	2.334	2.334	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3	216.186.750.000	Madiun No.4-6, Jakarta Pusat
14	846	846	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2	78.380.843.000	Sunda Kelapa No.9, Jakarta Pusat
15	726	726	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	4	43.630.422.000	Proklamasi No.70, Jakarta Pusat
16	678	678	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	9	62.783.648.000	Madiun No.2, Jakarta Pusat
17	2.905	2.905	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	5	267.764.744.000	Taman Suropati No.2A, Jakarta Pusat
18	4.218	4.218	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	390.692.250.000	Taman Suropati No.2, Jakarta Pusat
19	1.437	1.437	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	6	134.433.146.000	Taman Suropati No.1, Jakarta Pusat
20	-	255	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	1	3.837.240.000	Siaga Krobokan, Jakarta Selatan
<b>TOTAL</b>					<b>1.541.450.676.000</b>	

Per 31 Desember 2021 pada Kementerian PPN/Bappenas terdapat aset tetap berupa tanah dengan status Hak Pakai yang berlokasi di Jatisari



dan Jatisampurna yang telah dimanfaatkan untuk perumahan pegawai dan sedang dalam proses persetujuan pemindahtanganan.

Terhadap status tanah di Jatisari dan Jatisampurna tersebut, Kementerian PPN/Bappenas telah menyampaikan surat kepada Kementerian Keuangan namun belum mendapatkan tanggapan.

Adapun surat yang dimaksud yaitu:

1. Surat dari Menteri PPN/Bappenas kepada Menteri Keuangan Nomor B.446/M.PPN/SES/PL.08/10/2017 tanggal 25 Oktober 2017 hal usulan pemindahtanganan untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
2. Surat dari Kepala Biro Umum kepada Menteri Keuangan Nomor 2681/B.05/03/2018 tanggal 14 Maret 2018 hal permohonan penetapan status dan penyampaian kelengkapan dokumen pemindahtanganan tanah kavling Jatisari dan Jatisampurna; dan
3. Surat dari Kepala Biro Umum kepada Menteri Keuangan Nomor 6729/B.05/07/2018 tanggal 4 Juli 2018 hal penyampaian kelengkapan dokumen pemindahtanganan tanah kavling Jatisari dan Jatisampurna.
4. Surat dari Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 10173/PL.08.01/SES/B/08/2021 tanggal 18 Agustus 2021 hal Permohonan Penetapan Status Penggunaan dan Persetujuan Pemindahtanganan BMN berupa Tanah di Jatisari dan Jatisampurna, Bekasi.
5. Surat dari Kepala Biro Umum kepada Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Nomor 16854/PL.05.01/B.05/T/12/2021 tanggal 20 Desember 2021 hal Penyampaian Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Pembentukan Tim Pengadaan Perumahan Pegawai Bappenas.

Rincian Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2021 disajikan pada lampiran 8.

### **C.11. Peralatan dan Mesin**

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar

*Peralatan dan  
Mesin  
Rp494.470.079.873,00*

Rp494.470.079.873,00 dan Rp469.890.509.737,00. Perbandingan Rincian Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

Tabel 59 Perbandingan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Satker Bappenas	490.078.982.115	465.635.328.876	5,25
Satker MWA ICCTF	4.391.097.758	4.255.180.861	3,19
<b>Jumlah</b>	<b>494.470.079.873</b>	<b>469.890.509.737</b>	<b>5,23</b>

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 60 Mutasi Aset Tetap Berupa Peralatan dan Mesin

(Dalam Rupiah)

<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>	<b>469.890.509.737</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	
Pembelian	40.890.439.126
Pengembangan Nilai Aset	278.865.000
Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	1.100.000
Reklasifikasi Masuk	2.029.919.300
Perolehan Lainnya	21.664.000
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	63.326.000
Transfer Masuk	-
Hibah (Masuk)	755.779.713
Pembatalan Penghapusan	1.019.044.000
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	2.091.284.662
<b>Mutasi kurang:</b>	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(17.953.831.296)
Transfer Keluar	(779.815.069)
Reklasifikasi Keluar	(3.753.619.300)
Koreksi Pencatatan	(68.026.000)
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	(16.560.000)
Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	-
Penghapusan Reklasifikasi dari Intra Ke Ekstra	-
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>494.470.079.873</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	(340.544.423.882)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2021</b>	<b>153.925.655.991</b>

Mutasi tambah:

1. Pembelian merupakan transaksi perolehan peralatan dan mesin yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN melalui Satuan Kerja ICCTF dan Satuan Kerja Kantor Pusat Kementerian PPN/Bappenas

- pada periode berjalan, antara lain berupa pengadaan Note Book, P.C Unit, Personal Komputer Lainnya dan lain-lain.
2. Pengembangan Nilai Aset merupakan transaksi yang digunakan untuk membukukan penambahan nilai BMN sebagai akibat pelaksanaan renovasi atau restorasi yang memenuhi kapitalisasi aset yang dananya berasal dari APBN tahun berjalan, antara lain berupa renovasi Meja Kerja Kayu, Bilik Disinfektan, dan lain-lain.
  3. Reklasifikasi Masuk dari Persediaan merupakan transaksi perolehan peralatan dan mesin yang diperoleh atas reklasifikasi masuk dari persediaan akibat kesalahan pencatatan, antara lain berupa Mesin Hitung Elektronik/Kalkulator dan *Flip Chart*.
  4. Reklasifikasi Masuk merupakan transaksi pencatatan peralatan dan mesin yang sebelumnya dicatat dengan klasifikasi BMN yang lain, antara lain berupa *Note Book*, Mesin Fotocopy Folio, *Video Conference* dan lain-lain.
  5. Perolehan Lainnya merupakan transaksi perolehan yang tidak termasuk pada transaksi-transaksi perolehan di atas, perolehan tersebut merupakan penambahan unit atas kesalahan input transaksi pembelian oleh operator modul komitmen pada periode berjalan. Perolehan lainnya antara lain berupa Pesawat Telephone, Lori Dorong, dan lain-lain.
  6. Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas merupakan transaksi yang digunakan untuk membukukan transaksi perubahan nilai dan / atau kuantitas peralatan dan mesin dikarenakan adanya ke salahan pembukuan pada nilai / kuantitas, antara lain koreksi pada Meja Kerja Kayu dan Peralatan Studio Video Dan Film Lainnya.
  7. Hibah (Masuk) merupakan transaksi perolehan peralatan dan mesin yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis dari luar Pemerintah Pusat. Hibah Masuk berasal dari Eks Proyek DRDRRP – JICA, MRV MMI – GIZ, dan ISED – GIZ, antara lain berupa Mesin Fotocopy, Note Book, dan lain-lain.
  8. Pembatalan Penghapusan merupakan pencatatan BMN berupa peralatan dan mesin eks BMN *idle* dari hasil pembatalan penghapusan yang sebelumnya telah dihapuskan/dikeluarkan dari pembukuan berdasarkan Keputusan Penghapusan. Pembatalan

penghapusan di periode 2021 dilakukan hanya untuk mengecek proses alur penghapusan pada sistem aplikasi SAKTI sehingga menyebabkan munculnya transaksi ini. Pembatalan penghapusan dilakukan pada Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) dan Lemari Besi/Metal.

9. Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap merupakan transaksi untuk melakukan reklasifikasi BMN yang sebelumnya disajikan dalam akun Aset Lainnya sebagai aset lain-lain ke dalam akun Aset Tetap. Reklasifikasi dari aset lainnya ke aset tetap merupakan kesalahan pencatatan penghentian aset dari penggunaan, antara lain berupa *Elevator /Lift, Battery Charge, Filing Cabinet Besi*, dan lain-lain.

Mutasi Kurang:

1. Penghentian Aset dari Penggunaan merupakan transaksi untuk mereklasifikasi aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah dari akun Aset Tetap ke dalam akun Aset Lainnya sebagai aset lain-lain, antara lain berupa P.C Unit, *Note Book, Uninterruptible Power Supply (UPS), Server*, dan lain-lain.
2. Transfer Keluar merupakan transaksi penyerahan peralatan dan mesin eks Rumah Dinas Menteri Jalan Denpasar dari Kementerian PPN/Bappenas kepada Kementerian Sekretariat Negara dan Note Book kepada Badan Kepegawaian Negara. Adapun transfer keluar peralatan dan mesin eks rumah dinas Menteri di Jalan Denpasar telah ditandatangani BAST dan dalam proses penerbitan SK Penghapusan.
3. Reklasifikasi Keluar merupakan transaksi yang digunakan untuk menghapus peralatan dan mesin untuk dicatat kembali ke dalam klasifikasi BMN yang baru, antara lain berupa Peralatan Jaringan Lainnya, Mesin Fotokopi Elektronik, Kamera Digital, dan lain-lain.
4. Koreksi Pencatatan merupakan transaksi yang digunakan untuk menghapus BMN sebagai akibat dari perbaikan atas kesalahan pembukuan berupa kelebihan kuantitas barang dan/atau kesalahan pencatatan. Adapun koreksi pencatatan berupa *workstation*.

5. Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas merupakan transaksi yang digunakan untuk membukukan transaksi perubahan nilai dan/atau kuantitas peralatan dan mesin dikarenakan adanya ke salahan pembukuan pada nilai / kuantitas, antara lain A.C. Split, Alat Kedokteran Umum Lainnya, dan *External/ Portable Hardisk*.

Per 31 Desember 2021 terdapat peralatan dan mesin yang akan dilakukan penjualan secara lelang dengan status sebagai berikut:

- a. Peralatan dan mesin berupa kendaraan bermotor sebanyak 19 unit telah direklas menjadi barang rusak berat dan dalam proses penetapan jadwal pelaksanaan lelang oleh KPKNL Bekasi sesuai surat Kepala Biro Umum nomor 16431/PL.08.01/B.05/T/12/2021 tanggal 10 Desember 2021 hal Permohonan Penetapan Jadwal Pelaksanaan Lelang Barang Milik Negara pada Satuan Kerja Kementerian PPN/Bappenas.
- b. Peralatan dan mesin berupa Lift, AC Sentral, dan UPS sebanyak 18 unit telah direklas menjadi barang rusak berat dan dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Direktorat Jenderal dari KPKNL Jakarta I, sesuai surat Kepala KPKNL Jakarta I nomor S-2624/WKN.07/KNL.01/2021 tanggal 23 September 2021 hal Penyampaian Hasil Penilaian BMN pada Kementerian PPN/Bappenas serta nomor S-2648/WKN.07/KNL.01/2021 tanggal 27 September 2021 hal Penyampaian Ralat Hasil Penilaian BMN pada Kementerian PPN/Bappenas dan dalam proses penentuan nilai limit.

Per 31 Desember 2021 terdapat peralatan dan mesin yang akan dilakukan penjualan tanpa lelang dengan status sebagai berikut :

- a. Peralatan dan mesin berupa kendaraan dinas bermotor atas nama Bapak Subandi dan Ibu Diani Sadia Wati telah di hapuskan dari daftar BMN di neraca sesuai BAST BMN atas penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang nomor BA-008/BAST-BMN-PTL/12/2021 dan dalam proses penerbitan SK Penghapusan.
- b. Peralatan dan mesin berupa kendaraan dinas bermotor atas nama Bapak Pungky Sumadi telah dihentikan penggunaannya pada pencatatan aplikasi SAKTI dan dalam proses kelengkapan dokumen.

Selain itu, terdapat rencana pengalihan status penggunaan yang statusnya sebagai berikut :

- a. Alih status penggunaan dari Kementerian Perhubungan kepada Kementerian PPN/Bappenas berupa 2 (dua) unit fasilitas parkir sepeda PT. Juara Bike (Selis) yang saat ini dalam proses usulan persetujuan alih status penggunaan dari Kementerian Keuangan oleh Kementerian Perhubungan.
- b. Alih status penggunaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Kementerian PPN/Bappenas berupa peralatan dan mesin sebanyak 22 (dua puluh dua) unit yang saat ini dalam proses usulan persetujuan alih status penggunaan dari Kementerian Keuangan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin dan Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2021 disajikan pada lampiran 8.

*Gedung dan  
Bangunan  
Rp161.997.391.722,00*

### **C.12. Gedung dan Bangunan**

Gedung dan bangunan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp161.997.391.722,00 dan Rp159.920.519.326,00. Perbandingan rincian Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 61 Perbandingan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Satker Bappenas	161.997.391.722	159.920.519.326	1,30
<b>Jumlah</b>	<b>161.997.391.722</b>	<b>159.920.519.326</b>	<b>1,30</b>

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 62 Mutasi Transaksi Terhadap Gedung dan Bangunan

(Dalam Rupiah)

<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>	<b>159.920.519.326</b>
<b>Mutasi tambah :</b>	
Pembelian	280.677.396
Pengembangan Nilai Aset	1.796.195.000
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	19.659.396
<b>Mutasi kurang :</b>	
Koreksi Pencatatan	(19.659.396)
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>161.997.391.722</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	34.581.422.631
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2021</b>	<b>127.415.969.091</b>

Mutasi tambah:

1. Pembelian merupakan transaksi perolehan gedung dan bangunan yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN pada periode berjalan, yaitu berupa pengadaan Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan di kompleks Siaga Raya.
2. Pengembangan Nilai Aset merupakan transaksi pengembangan (rehabilitasi/renovasi/restorasi) gedung dan bangunan yang memenuhi kapitalisasi aset yang dananya berasal dari APBN tahun berjalan, antara lain berupa rehabilitasi Bangunan Gedung Kantor Bappenas dan Gedung Garasi Bus Komplek Jatisari.
3. Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas merupakan transaksi yang digunakan untuk membukukan transaksi perubahan nilai dan/atau kuantitas gedung dan bangunan dikarenakan adanya ke salahan pembukuan pada nilai / kuantitas, yaitu berupa Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan Kepemilikan di kompleks Siaga Raya.

Mutasi kurang:

1. Koreksi Pencatatan merupakan transaksi yang digunakan untuk menghapus BMN sebagai akibat dari perbaikan atas kesalahan pembukuan berupa kelebihan kuantitas barang dan/atau kesalahan pencatatan. Adapun koreksi pencatatan berupa Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan yang seharusnya menjadi pengembangan nilai aset sebelumnya.

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan dan Akumulasi Penyusutannya disajikan pada lampiran 8.

Jalan, Irigasi,  
dan Jaringan  
Rp6.197.314.170,00

### C.13. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp6.197.314.170,00 dan Rp6.020.002.566,00 dengan perbandingan rincian sebagai berikut:

Tabel 63 Perbandingan Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Satker Bappenas	6.197.314.170	6.020.002.566	2,95
<b>Jumlah</b>	<b>6.197.314.170</b>	<b>6.020.002.566</b>	<b>2,95</b>

Tabel 64 Mutasi Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan

(Dalam Rupiah)

<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>	<b>6.020.002.566</b>
<b>Mutasi tambah :</b>	-
Pengembangan Nilai Aset	177.311.604
<b>Mutasi kurang :</b>	-
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>6.197.314.170</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	240.582.134
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2021</b>	<b>5.956.732.036</b>

Mutasi tambah:

Pengembangan Nilai Aset merupakan transaksi pengembangan (rehabilitasi/renovasi/restorasi) jalan yang memenuhi kapitalisasi aset yang dananya berasal dari APBN tahun berjalan, antara lain berupa rehabilitasi jalan di Komplek Bappenas Jatisampurna, rehabilitasi irigasi di Komplek Bappenas Jatisampurna.

Tidak terdapat mutasi kurang pada aset Jalan, Irigasi, Jaringan pada Kementerian PPN/Bappenas sampai dengan 31 Desember 2021.

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan jaringan dan Akumulasi Penyusutannya disajikan pada lampiran 8.



Aset Tetap  
Lainnya  
Rp106.960.367.956,00

#### C.14. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp106.960.367.956,00 dan Rp111.114.920.719,00. Perbandingan rincian aset tetap lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 65 Perbandingan Aset Tetap Lainnya  
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Satker Bappenas	106.873.948.601	111.029.235.369	(3,74)
Satker MWA ICCTF	86.419.355	85.685.350	0,86
<b>Jumlah</b>	<b>106.960.367.956</b>	<b>111.114.920.719</b>	<b>(3,74)</b>

Tabel 66 Rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai Buku
1	Aset Tetap Renovasi	102.566.081.966
2	Aset Tetap Lainnya	4.394.285.990
	<b>Jumlah</b>	<b>106.960.367.956</b>

Tabel 67 Mutasi Saldo Aset Tetap Lainnya

(Dalam Rupiah)

<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>	<b>111.114.920.719</b>
<b>Mutasi tambah</b>	
Pembelian	395.211.205
Hibah (Masuk)	0
Reklasifikasi Masuk	-
Transfer Masuk	-
Pengembangan nilai aset	5.929.250.000
Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap Lainnya	-
Koreksi Saldo Awal	8.368.792.753
<b>Mutasi kurang</b>	
Transfer Keluar	(9.498.715.398)
Reklasifikasi Keluar	-
Koreksi Pencatatan	(813.988.570)
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	(8.368.792.753)
Penghentian Aset dari Penggunaan	(166.310.000)
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>106.960.367.956</b>

Mutasi tambah:

1. Pembelian merupakan
  - Transaksi perolehan aset tetap lainnya yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN melalui Satuan Kerja ICCTF dan Satuan Kerja Kantor Pusat Kementerian PPN/Bappenas pada periode berjalan, berupa monografi dan lukisan kanvas.
  - Transaksi perolehan Aset tetap dalam renovasi yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN pada periode berjalan, transaksi tersebut merupakan pekerjaan renovasi terhadap rumah dinas Menteri PPN/Kepala Bappenas di Jalan Widya Chandra untuk tahun pengadaan 2021.
2. Pengembangan Nilai Aset merupakan transaksi pengembangan (rehabilitasi/renovasi/restorasi) aset tetap dalam renovasi yang menambah nilai buku sebelumnya berupa rumah dinas Menteri PPN/Kepala Bappenas di Jalan Widya Chandra dan pekerjaan penataan ruang kerja Kementerian PPN/Bappenas di gedung sewa Wisma Bakrie 2.
3. Koreksi Saldo Awal merupakan koreksi perubahan atas saldo akhir BMN berupa bangunan eksBMN *idle* pada periode sebelumnya yang dikarenakan adanya koreksi pencatatan atas nilai/kuantitas BMN berupa bangunan eks BMN *idle* yang telah dicatat dan telah dilaporkan dalam periode sebelumnya, yaitu berupa Rumah Dinas Menteri PPN/Kepala Bappenas di Jalan Widya Chandra.

Mutasi kurang:

1. Transfer Keluar merupakan transaksi penyerahan Aset tetap dalam renovasi berupa rumah dinas Menteri dari Kementerian PPN/Bappenas kepada Kementerian Sekretariat Negara.
2. Koreksi Pencatatan merupakan transaksi yang digunakan untuk menghapus Aset Tetap dalam Renovasi berupa rumah dinas Menteri yang diperoleh sebelum tahun 2017 (sebelum revaluasi).
3. Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas merupakan transaksi yang digunakan untuk membukukan transaksi perubahan nilai dan/atau kuantitas aset tetap dalam renovasi dikarenakan adanya kesalahan

pembukuan pada nilai / kuantitas, yaitu berupa Rumah Dinas Menteri PPN/Kepala Bappenas di Jalan Widya Chandra.

4. Penghentian Aset dari Penggunaan merupakan

- Transaksi untuk mereklasifikasi aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah dari akun Aset Tetap ke dalam akun Aset Lainnya sebagai aset lain-lain, yaitu berupa Lukisan Cat Minyak.
- Transaksi untuk mereklasifikasi aset tetap renovasi yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah dari akun Aset Tetap ke dalam akun Aset Lainnya sebagai aset lain-lain untuk dilakukan penghapusan berupa ATR Gedung Wisma Bakrie Eks Satker KNKS.

Rincian Aset Tetap Lainnya dan Akumulasi Penyusutannya disajikan pada lampiran 8.

Konstruksi  
Dalam  
Pengerjaan  
(KDP)  
Rp19.016.500.000,00

**C.15. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)**

Saldo Konstruksi Dalam pengerjaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp19.016.500.000,00 dan Rp0,00. Saldo Konstruksi Dalam (KDP) Tahun 2021 berasal dari pengadaan pengembangan perangkat TIK dan fasilitas infrastruktur *data center* yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca. Perbandingan rincian konstruksi dalam pengerjaan (KDP) adalah sebagai berikut:

Tabel 68 Perbandingan Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Satker Bappenas	19.016.500.000	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>19.016.500.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Tabel 69 Mutasi Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan

(Dalam Rupiah)

<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>	-
<b>Mutasi tambah</b>	
Pengembangan KDP	12.741.550.000
Perolehan/Penambahan KDP	6.274.950.000
<b>Mutasi kurang</b>	
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>19.016.500.000</b>

Mutasi tambah:

1. Pengembangan KDP merupakan transaksi untuk melakukan pembukuan SPM/SP2D kedua, ketiga, atau selanjutnya untuk 1 (satu) KDP yang sudah pernah dibukukan pada pencatatan awal KDP.
2. Perolehan/Penambahan KDP merupakan transaksi untuk melakukan pembukuan pertama kali KDP.

Saldo atas konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2021 tersebut pada Satuan Kerja Kantor Pusat Kementerian PPN/Bappenas, dikarenakan belum selesai pengerjaannya dan pembayaran termin terakhir akan dilakukan pada semester I TA 2022. Adapun konstruksi dalam pengerjaan dimaksud yaitu pengadaan pengembangan perangkat TIK dan fasilitas infrastruktur data center (Pusdatinrenbang).

Rincian lebih lanjut terkait Kontruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran 8.

### **C.16. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing Rp378.618.879.326,00 dan Rp315.156.289.356,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021.

*Akumulasi  
Penyusutan Aset  
Tetap  
Rp378.618.879.326,00*

Tabel 70 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap  
per 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah)

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	1.541.450.676.000	-	1.541.450.676.000
2	Peralatan dan Mesin	494.470.079.873	(340.544.423.882)	153.925.655.991
3	Gedung dan Bangunan	161.997.391.722	(34.581.422.631)	127.415.969.091
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	6.197.314.170	(3.493.032.813)	2.704.281.357
5	Aset Tetap Lainnya	4.394.285.990	-	4.394.285.990
6	Aset Tetap Renovasi	102.566.081.966	-	102.566.081.966
7	Konstruksi Dalam pengerjaan	19.016.500.000	-	19.016.500.000
	<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>2.330.092.329.721</b>	<b>(378.618.879.326)</b>	<b>1.951.473.450.395</b>

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada lampiran 8.

Tagihan  
Tuntutan  
Perbendaharaan/  
Tuntutan Ganti  
Rugi (TP/TGR)  
Rp0,00

### C.17. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Penyisihan  
Piutang Tak  
Tertagih –  
Piutang Jangka  
Panjang  
Rp(0,00)

### C.18. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp(0,00) dan Rp(0,00).

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Kemitraan Dengan  
Pihak Ketiga  
Rp490.209.375.000,00

### C.19. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp490.209.375.000,00

dan Rp490.209.375.000,00. Perbandingan Kemitraan dengan Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:

Tabel 71 Perbandingan Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Satker Bappenas	490.209.375.000	490.209.375.000	-
<b>Jumlah</b>	<b>490.209.375.000</b>	<b>490.209.375.000</b>	<b>-</b>

Tidak terdapat peningkatan saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga.

Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan nilai tanah milik Kementerian PPN/Bappenas yang digunakan untuk mendirikan gedung perkantoran berdasarkan perjanjian Built, Operating and Transfer (BOT) dengan PT. Bakrie Swasakti Utama. Setelah perjanjian BOT selesai, Aset Tanah akan direklasifikasi kembali menjadi Aset Tetap.

Jangka waktu hak pengelolaan Wisma Bakrie oleh PT. Bakrie Swasakti Utama selama 25 (dua puluh lima) tahun terhitung mulai 1 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2029 sesuai Perjanjian Bangun Guna Serah/*Built, Operate and Transfer* (BOT) Tanah dan Gedung Bappenas Jl. HR. Rasuna Said Kav. B2, nomor 4300/SES/09/2004 tanggal 24 September 2004.

Aset Tak Berwujud  
Rp101.310.171.102,00

### C.20. Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp101.310.171.102,00 dan Rp131.912.902.018,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 72 Perbandingan Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Satker Bappenas	100.509.422.643	127.875.140.511	(21,40)
Satker MWA ICCTF	800.748.459	4.037.761.507	(80,17)
<b>Jumlah</b>	<b>101.310.171.102</b>	<b>131.912.902.018</b>	<b>(23,20)</b>

Tabel 73 Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai Buku
1	Software	27.586.623.805
2	Lisensi	3.723.903.297
3	Hasil Kajian/Penelitian	69.999.644.000
	<b>Jumlah</b>	<b>101.310.171.102</b>

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Adapun mutasi Aset Tak Berwujud pada Kementerian PPN/Bappenas adalah sebagai berikut :

Tabel 74 Mutasi Saldo Aset Tak Berwujud

(Dalam Rupiah)

<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>	<b>131.912.902.018</b>
<b>Mutasi tambah</b>	
Pengembangan Nilai Aset	1.696.192.143
Pembelian	2.639.062.491
Reklasifikasi Masuk	1.727.779.000
Perolehan/Penambahan KDP	1.646.304.000
Pengembangan KDP	3.841.376.000
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	5.487.680.000
<b>Mutasi keluar</b>	
Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi	(5.487.680.000)
Reklasifikasi Keluar	(4.079.000)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(42.149.365.550)
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>101.310.171.102</b>
Akumulasi Amortisasi s.d 31 Desember 2021	(18.753.465.763)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2021</b>	<b>82.556.705.339</b>

Mutasi tambah:

1. Pengembangan Nilai Aset merupakan transaksi yang digunakan untuk membukukan penambahan nilai Aset Tak Berwujud sebagai akibat penambahan fitur/update software yang dananya berasal dari APBN tahun berjalan, antara lain berupa update AMS (Audit Management System, Aplikasi E-Audit, dan lain-lain).
2. Pembelian merupakan transaksi perolehan Aset Tak Berwujud yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN melalui Satuan Kerja MWA ICCTF dan Satuan Kerja Kantor Pusat Kementerian PPN/Bappenas pada periode berjalan, antara lain pengadaan software berupa Aplikasi Form dan Kuesioner online, Domain Website, dan lain-lain.
3. Reklasifikasi Masuk merupakan transaksi pencatatan aset tak berwujud yang sebelumnya dicatat dengan klasifikasi BMN yang lain,

antara lain berupa Perangkat SSL VPN Kementerian PPN/Bappenas, dan lain-lain.

4. Perolehan/Penambahan KDP merupakan transaksi untuk melakukan pembukuan pertama kali KDP, yaitu berupa *Web Based Portal* SDI.
5. Pengembangan KDP merupakan transaksi untuk melakukan pembukuan SPM/SP2D kedua, ketiga, atau selanjutnya untuk 1 (satu) KDP yang sudah pernah dibukukan pada pencatatan awal KDP, yaitu berupa *Web Based Portal* SDI.
6. Penyelesaian Penyelesaian Pembangunan dengan KDP merupakan transaksi perolehan aset tak berwujud dari penyelesaian pembangunan KDP, yaitu berupa *Web Based Portal* SDI.

Mutasi kurang:

1. Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi merupakan pencatatan KDP yang telah selesai pengerjaannya dan direklasifikasi menjadi Aset Tak Berwujud atau barang jadi, yaitu berupa *Web Based Portal* SDI.
2. Reklasifikasi Keluar merupakan transaksi penghapusan aset tak berwujud untuk dicatat menjadi klasifikasi BMN yang lain, yaitu berupa lisensi.
3. Penghentian Aset dari Penggunaan merupakan transaksi untuk mereklasifikasi aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah dari akun Aset Tetap ke dalam akun Aset Lainnya sebagai aset lain-lain.

Rincian Aset Tetap Tak Berwujud disajikan pada lampiran 8.

*Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan Rp0,00*

### **C.21. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan**

Saldo perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp0,00 dan Rp0,00. Tidak terdapat mutasi tambah dan kurang pada Aset Tak Berwujud dalam pengerjaan.

Rincian Aset Tak Berwujud (ATB) Dalam Pengerjaan disajikan pada lampiran 8.



Aset Lain-Lain  
Rp105.437.090.556,00

## C.22. Aset Lain-Lain

Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp105.437.090.556,00 dan 66.639.026.947,00. Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Kementerian PPN/Bappenas serta dalam proses penghapusan dari BMN. Perbandingan Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Tabel 75 Perbandingan Aset Lain-Lain  
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Satker Bappenas	102.179.177.508	66.639.026.947	53,33
Satker MWA ICCTF	3.257.913.048	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>105.437.090.556</b>	<b>66.639.026.947</b>	<b>53,33</b>

Tabel 76 Rincian Aset Lain-lain per 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	69.439.423.697
2	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	35.997.666.859
	<b>Jumlah</b>	<b>105.437.090.556</b>

Adapun mutasi aset lainnya yang tidak digunakan dalam pemerintahan adalah sebagai berikut:

Tabel 77 Mutasi Aset Lain-lain

(Dalam Rupiah)

<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>	<b>66.639.026.947</b>
<b>Mutasi tambah</b>	-
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	54.936.625.005
<b>Mutasi kurang</b>	
Penghapusan (BMN yang dihentikan)	(13.308.068.926)
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)	(874.608)
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	(2.427.323.862)
Transfer Keluar (BMN yang dihentikan)	(402.294.000)
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>105.437.090.556</b>
Akumulasi Penyusutan	(38.459.617.910)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2021</b>	<b>66.977.472.646</b>

Mutasi tambah:

1. Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya merupakan transaksi atas perubahan kondisi ke rusak berat atau penghentian penggunaan dari operasional pemerintah, antara lain berupa A.C Split, Kursi Besi/Metal, P.C Unit, dan lain-lain.

Mutasi kurang:

1. Penghapusan (BMN yang dihentikan) merupakan transaksi yang digunakan untuk menghapus BMN yang sebelumnya telah dihentikan penggunaannya sebagai akibat dari pengalihan kepada pihak lain berdasarkan suatu Keputusan Penghapusan, antara lain berupa Kendaraan Dinas, A.C Split, Perkakas Kantor Lainnya, dan lain-lain.
2. Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan) merupakan transaksi untuk melakukan reklasifikasi BMN yang sebelumnya disajikan sebagai aset lain-lain untuk diusul hapuskan ke pengelola, yaitu berupa kursi besi/metal dan lain-lain.
3. Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif merupakan transaksi untuk melakukan reklasifikasi BMN yang sebelumnya disajikan dalam akun Aset Lainnya sebagai aset lain-lain ke dalam akun Aset Tetap. Transaksi ini merupakan kesalahan pencatatan penghentian aset dari penggunaan, antara lain berupa *Elevator /Lift, Battery Charge, Filing Cabinet* Besi, dan lain-lain.
4. Transfer Keluar (BMN yang dihentikan) merupakan transaksi yang digunakan untuk menghapus BMN sebagai akibat dari penyerahan BMN ke Kuasa Pengguna Barang lain dalam lingkungan satu Pengguna Barang atau diluar Pengguna Barang yang sama. Transfer keluar BMN yang dihentikan tersebut yaitu kepada Kementerian PUPR berupa Rumah Negara Golongan III beserta Tanahnya atas nama Bapak Alm. Sariman.  
Adapun transfer keluar Rumah Negara Golongan III beserta Tanahnya telah ditandatangani BAST dan dalam proses penerbitan SK Penghapusan.

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku disajikan pada lampiran 8 dan 9.

Akumulasi  
Penyusutan dan  
Amortisasi Aset  
Lainnya  
Rp57.213.083.673,00

### C.23. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp57.213.083.673,00 dan 49.998.051.795,00. Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 78 Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
A	Aset Tak Berwujud			
1	Software	27.586.623.805	(17.968.332.212)	9.618.291.593
2	Lisensi	3.723.903.297	(785.133.551)	2.938.769.746
3	Hasil Kajian/Penelitian	69.999.644.000	-	69.999.644.000
	<b>Jumlah</b>	<b>101.310.171.102</b>	<b>(18.753.465.763)</b>	<b>82.556.705.339</b>
B	Aset Lainnya			
1	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	69.439.423.697	(9.224.645.621)	60.214.778.076
2	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	35.997.666.859	(29.234.972.289)	6.762.694.570
	<b>Jumlah</b>	<b>105.437.090.556</b>	<b>(38.459.617.910)</b>	<b>66.977.472.646</b>
	<b>Total</b>	<b>206.747.261.658</b>	<b>(57.213.083.673)</b>	<b>149.534.177.985</b>

Rincian akumulasi amortisasi aset tak berwujud disajikan pada lampiran 8.

Utang kepada  
Pihak Ketiga  
Rp8.968.540.875,00

### C.24. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp8.968.540.875,00 dan Rp2.107.379.659,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Perbandingan rincian utang kepada pihak ketiga adalah sebagai berikut:

Tabel 79 Perbandingan Rincian Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	3.034.639.312	2.050.044.348	48,03
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	5.933.901.563	57.335.311	10.249,47
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	-	-	-
Pengeluaran Transito yang Masih Harus Dibayar	-	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>8.968.540.875</b>	<b>2.107.379.659</b>	<b>326</b>

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga disajikan pada lampiran 10.

*Utang yang belum ditagihkan Rp0,00*

### C.25. Utang Yang Belum Ditagihkan

Utang yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo utang yang belum ditagihkan berasal dari transaksi-transaksi yang telah diterbitkan Berita Acara Serah Terima (BAST) tetapi belum diadministrasikan untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Utang yang Belum Ditagihkan merupakan utang akrual saat Berita Acara Serah Terima (BAST) dari pihak ketiga. Pengakuan hutang ini dicatat oleh satker dengan dokumen sumber BAST.

*Hibah Belum Disahkan Rp0,00*

### C.26. Hibah Yang Belum Disahkan

Saldo Hibah yang Belum Disahkan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Rincian kegiatan hibah dan nilai yang sudah disahkan disajikan sebagai berikut:

Tabel 80 Rincian Kegiatan Hibah dan Nilai yang sudah disahkan per 31 Desember 2021

No	Nama Hibah	Jenis Hibah	Nilai	Keterangan
1	UNICEF	Langsung Uang	8.443.283.468	Penerimaan Hibah Langsung Uang yang sudah disahkan periode Januari - Desember 2021
2	UNFPA	Langsung Uang	4.538.524.700	Penerimaan Hibah Langsung Uang yang sudah disahkan periode Januari - Desember 2021
3	READSI	Langsung Uang	5.570.000.000	Penerimaan Hibah Langsung Uang yang sudah disahkan periode Januari - Desember 2021
			<b>18.551.808.168</b>	

Rincian saldo hibah langsung yang sudah disahkan dapat dilihat pada lampiran 3 untuk hibah langsung uang.

Pendapatan  
Diterima di  
Muka  
Rp57.459.336,00

### C.27. Pendapatan Diterima di Muka

Saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp57.459.336,00 dan 82.513.583,00. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang telah diterima tetapi belum menjadi hak sepenuhnya karena masih melekat kewajiban untuk memberikan barang/jasa. Perbandingan Pendapatan diterima dimuka adalah sebagai berikut:

Tabel 81 Perbandingan Pendapatan Diterima Dimuka  
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Satker Bappenas	57.459.336	82.513.583	(30,36)
<b>Jumlah</b>	<b>57.459.336</b>	<b>82.513.583</b>	<b>(30,36)</b>

Rincian Pendapatan Diterima di Muka disajikan pada lampiran 11.

Uang Muka dari  
KPPN  
Rp73.005.701,00

### C.28. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp73.005.701,00 dan Rp77.254.593,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Perbandingan Uang Muka dari KPPN adalah sebagai berikut:

Tabel 82 Perbandingan Uang Muka dari KPPN  
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Satker Bappenas	58.777.701	70.644.793	(16,80)
BAPPEDA PROP.KAL-TIM	-	6.609.800	(100,00)
Bappeda Provinsi Sumatera Utara	14.228.000		
<b>Jumlah</b>	<b>73.005.701</b>	<b>77.254.593</b>	<b>(116,80)</b>

Utang Jangka  
Pendek  
Lainnya  
Rp0,00

### C.29. Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 dan Rp9.773.865,00. Utang Jangka Pendek Lainnya digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya seperti kelebihan pembayaran pendapatan, pendapatan diterima di

muka, uang muka, pendapatan yang ditangguhkan dan utang jangka pendek lainnya.

Perbandingan Utang Jangka Pendek Lainnya adalah sebagai berikut

Tabel 83 Perbandingan Utang Jangka Pendek Lainnya  
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Satker Bappenas	-	9.773.865	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>9.773.865</b>	<b>(100,00)</b>

### Ekuitas

Rp2.616.752.766.312,00

### C.30. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp2.616.752.766.312,00 dan Rp2.659.028.591.533,00. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

**D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**

*Pendapatan  
Negara Bukan  
Pajak (PNBP)  
Lainnya  
Rp 519.410.193,00*

**D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya**

Jumlah PNBP Lainnya pada Kementerian PPN/Bappenas untuk periode yang berakhir pada tanggal per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 dan adalah masing-masing sebesar Rp519.410.193,00 dan Rp611.470.187,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 84 Perbandingan Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik (Turun) %
<b>Pendapatan PNBP Lainnya</b>			
Pendapatan dari Pengelolaan BMN			
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	122.711.050	534.787.687	(77,05)
Pendapatan dari Bangun, Guna dan Serah (BGS)	396.052.110		
<i>Jumlah Pendapatan dari Pengelolaan BMN</i>	518.763.160	534.787.687	(3,00)
Pendapatan Jasa			
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	-	-	-
<i>Jumlah Pendapatan Jasa</i>	-	-	-
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian	-	76.342.500	
Pendapatan Denda Lainnya		-	
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	-	-	
<b>Jumlah Pendapatan PNBP Lainnya</b>	518.763.160	611.130.187	(15,11)
Pendapatan Anggaran Lain-lain	647.033	340.000	-
Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>519.410.193</b>	<b>611.470.187</b>	<b>(15,056)</b>

Terdapat kesalahan penggunaan MAK pendapatan Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan untuk pembayaran pendapatan dari BOT Gedung Bakrie yang seharusnya menggunakan MAK Pendapatan dari Bangun, Guna dan Serah (BGS). Atas kesalahan penggunaan MAK ini telah dilakukan koreksi melalui Jurnal Manual.

Terdapat kesalahan pengungkapan pendapatan atas imbalan BOT pada CaLK Laporan Keuangan *Audited* TA 2020 yang seharusnya tercatat sebagai pendapatan dari Bangun, Guna, dan Serah (BGS), bukan pendapatan Sewa, Tanah, Gedung dan Bangunan. Namun Pencatatan tersebut telah sesuai pada Aplikasi E-Rekon&LK dan SAKTI.

Penurunan Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya disebabkan karena tidak terdapat pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pengadaan pada tahun 2021.

Tabel 85 Perbandingan PNPB Lainnya pada LO dan LRA  
per 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah)

Uraian Jenis Pendapatan	PNBP Lainnya-LO (Rp)	PNBP Lainnya-LRA (Rp)	Selisih
<b>Pendapatan PNPB Lainnya</b>			
Pendapatan dari Pengelolaan BMN			
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	777.698.999	(777.698.999,00)
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	122.711.050	100.960.847	21.750.203
Pendapatan dari Bangun, Guna dan Serah (BGS)	396.052.110	792.104.220	(396.052.110,00)
Jumlah Pendapatan dari Pengelolaan BMN	518.763.160	1.670.764.066	(1.152.000.906)
Pendapatan Jasa			-
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	-	-	-
Jumlah Pendapatan Jasa	-	-	-
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	76.342.500	(76.342.500)
Pendapatan Denda Lainnya		-	-
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	-	-	-
<b>Jumlah Pendapatan PNPB Lainnya</b>	<b>518.763.160</b>	<b>1.747.106.566</b>	<b>(1.228.343.406)</b>
Pendapatan Anggaran Lain-lain	647.033	647.033	-
Pendapatan Lain-lain	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>519.410.193</b>	<b>1.747.753.599</b>	<b>(1.228.343.406)</b>

Perhitungan selisih nilai dari tabel di atas adalah sebagai berikut:

Tabel 86 Selisih nilai PNPB Lainnya pada LO dan LRA  
per 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah)

<b>Saldo PNPB Lainnya - LRA</b>		<b>1.747.753.599</b>
<b>Penambah</b>		
Pengakuan Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	21.750.203	
Pendapatan Lain-Lain	-	
Jumlah Penambah	21.750.203	
<b>Pengurang</b>		
Pendapatan dari Bangun, Guna dan Serah (BGS)	396.052.110	
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	777.698.999	
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	76.342.500	
Jumlah Pengurang	1.250.093.609	
Total Tambah/Kurang		(1.228.343.406)
<b>Saldo PNPB - LO</b>		<b>519.410.193</b>

Selisih PNPB Lainnya pada LO dan LRA disebabkan transaksi penerimaan pendapatan TAYL, dan transaksi pendapatan diterima di muka.



*Beban Pegawai*  
Rp157.174.178.897,00

## D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp157.174.178.897,00 dan Rp149.074.878.526,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 87 Perbandingan Rincian Beban Pegawai  
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	44.363.495.936	42.671.879.550	3,96
Beban Pembulatan Gaji	673.291	597.288	12,72
Beban Tunjangan Suami/Istri PNS	3.272.861.296	3.317.639.068	(1,35)
Beban Tunjangan Anak PNS	668.823.154	724.997.924	(7,75)
Beban Tunjangan Struktural	5.966.115.000	5.656.375.000	5,48
Beban Tunjangan Fungsional PNS	3.081.593.000	2.846.570.000	8,26
Beban Tunjangan PPh PNS	554.165.206	456.436.963	21,41
Beban Tunjangan Beras PNS	2.121.109.380	1.838.164.440	15,39
Beban Uang Makan PNS	6.115.444.000	5.881.257.000	3,98
Beban Tunjangan Umum	673.400.000	617.770.000	9,00
Beban Uang Lembur	16.563.000	51.811.000	(68,03)
Beban Pegawai TK/Kegiatan	90.444.787.472	85.102.963.745	6,28
<b>Jumlah Beban Pegawai</b>	<b>157.279.030.735</b>	<b>149.166.461.978</b>	<b>5,44</b>
Pengembalian	(104.851.838)	(91.583.452)	-
<b>Jumlah</b>	<b>157.174.178.897</b>	<b>149.074.878.526</b>	<b>5,433</b>

Beban pegawai pada Tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan dengan Tahun 2020 karena peningkatan jumlah PNS di Kementerian PPN/Bappenas. Sedangkan untuk Beban Uang Lembur mengalami penurunan dikarenakan berkurangnya pelaksanaan lembur di kantor akibat pembatasan bekerja di Kantor pada masa pandemi.

Tabel 88 Perbandingan Beban Pegawai pada LO dan LRA  
per 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah)

Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
Beban Gaji Pokok PNS	44.363.495.936	44.325.457.610	38.038.326
Beban Pembulatan Gaji	673.291	665.564	7.727
Beban Tunjangan Suami/Istri PNS	3.272.861.296	3.279.581.516	(6.720.220)
Beban Tunjangan Anak PNS	668.823.154	669.354.158	(531.004)
Beban Tunjangan Struktural	5.966.115.000	5.966.115.000	-
Beban Tunjangan Fungsional PNS	3.081.593.000	3.087.288.000	(5.695.000)
Beban Tunjangan PPh PNS	554.165.206	552.844.632	1.320.574
Beban Tunjangan Beras PNS	2.121.109.380	2.121.109.380	-
Beban Uang Makan PNS	6.115.444.000	6.115.444.000	-
Beban Tunjangan Umum	673.400.000	673.215.000	185.000
Beban Uang Lembur	16.563.000	16.563.000	-
Beban Pegawai TK/Kegiatan	90.444.787.472	89.501.831.591	942.955.881
<b>Jumlah Beban Pegawai</b>	<b>157.279.030.735</b>	<b>156.309.469.451</b>	<b>969.561.284</b>
Pengembalian	(104.851.838)	(104.851.838)	-
<b>Jumlah</b>	<b>157.174.178.897</b>	<b>156.204.617.613</b>	<b>969.561.284</b>

Perhitungan selisih nilai dari tabel di atas adalah sebagai berikut:

Tabel 89 Selisih Nilai Beban Pegawai pada LO dan LRA  
per 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah)

<b>Saldo Belanja Pegawai - LRA</b>		<b>156.204.617.613</b>
<b>Penambah</b>		
Beban Gaji Pokok PNS	38.038.326	
Beban Pembulatan Gaji	7.727	
Beban Tunjangan Struktural	-	
Beban Tunjangan PPh PNS	1.320.574	
Beban Pegawai TK/Kegiatan	942.955.881	
Beban Tunjangan Umum	185.000	
<b>Jumlah Penambah</b>	<b>982.507.508</b>	
<b>Pengurang</b>		
Beban Tunjangan Fungsional PNS	5.695.000	
Beban Tunjangan Suami/Istri PNS	6.720.220	
Beban Tunjangan Anak PNS	531.004	
Beban Tunjangan Beras	-	
Pengembalian	-	
<b>Jumlah Pengurang</b>	<b>12.946.224</b>	
<b>Total Tambah/Kurang</b>		<b>969.561.284</b>
<b>Saldo Beban Pegawai - LO</b>		<b>157.174.178.897</b>

Perbedaan saldo beban pegawai antara LO dan LRA disebabkan karena adanya pencatatan transaksi Beban TAYL dan pencatatan Beban Pegawai yang Masih Harus di Bayar.

Beban  
Persediaan  
Rp11.343.931.892,00

### D.3. Beban Persediaan

Beban Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp11.343.931.892,00 dan Rp13.584.409.156,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 90 Perbandingan Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Persediaan Konsumsi	11.279.544.915	12.943.410.188	(12,85)
Beban Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges		-	-
Beban Persediaan Bahan Baku	2.276.670	455.344.600	(99,50)
Beban Persediaan Lainnya	62.110.307	185.654.368	(66,55)
<b>Jumlah</b>	<b>11.343.931.892</b>	<b>13.584.409.156</b>	<b>(16,493)</b>

Penurunan beban persediaan utamanya disebabkan karena penurunan pemakaian bahan baku dan persediaan lainnya. Perhitungan Beban Persediaan adalah sebagai berikut:

Tabel 91 Perbandingan Rincian Beban Persediaan pada LO dan LRA per 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah)

Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
Beban Persediaan Konsumsi	11.279.544.915	10.537.218.106	742.326.809
Beban Persediaan Pita Cukai, Materai, Leges		5.589.000	(5.589.000)
Beban Persediaan Bahan Baku	2.276.670	-	2.276.670
Beban Persediaan Lainnya	62.110.307	-	62.110.307
<b>Jumlah</b>	<b>11.343.931.892</b>	<b>10.542.807.106</b>	<b>801.124.786</b>

Perhitungan selisih nilai dari tabel di atas adalah sebagai berikut:

Tabel 92 Selisih nilai Beban Persediaan pada LO dan LRA per 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah)

Saldo Beban Persediaan - LRA		10.542.807.106
<b>Penambah</b>		
Pembelian	Beban Persediaan Bahan Baku	2.276.670
Pembelian	Beban Persediaan Lainnya	62.110.307
	Beban Persediaan Konsumsi	742.326.809
<b>Jumlah Penambah</b>		<b>806.713.786</b>
<b>Pengurang</b>		
<b>Pemakaian</b>		
	Beban Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges	5.589.000
<b>Jumlah Pengurang</b>		<b>5.589.000</b>
<b>Total Tambah(Kurang)</b>		<b>801.124.786</b>
<b>Saldo Beban Persediaan - LO</b>		<b>11.343.931.892</b>

Beban Barang  
dan Jasa  
Rp1.351.662.095.304,00

#### D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.351.662.095.304,00 dan Rp1.518.044.198.005,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Kementerian PPN/Bappenas. Perbandingan rincian Beban Barang dan Jasa untuk per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 93 Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa  
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Keperluan Perkantoran	31.780.624.661	29.836.356.338	6,52
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	236.109.654	440.629.419	(46,42)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	4.086.548.000	4.124.310.000	(0,92)
Beban Barang Operasional Lainnya	19.389.067.413	17.799.674.226	8,93
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	20.447.032.584	5.865.986.858	248,57
Beban Bahan	19.423.039.673	27.216.065.832	(28,63)
Beban Honor Output Kegiatan	15.180.268.808	26.063.600.500	(41,76)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	123.656.903.101	144.625.876.746	(14,50)
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	123.823.692	1.850.702.642	(93,31)
Beban Langganan Listrik, Air dan Telepon	7.337.579.523	7.237.607.616	1,38
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1.330.729.785	1.507.709.534	(11,74)
Beban Jasa Pos dan Giro	3.654.000	5.848.300	(37,52)
Beban Jasa Konsultan	836.045.135.794	992.936.148.797	(15,80)
Beban Sewa	111.761.170.285	111.779.233.190	(0,02)
Beban Jasa Profesi	15.749.482.042	25.631.622.132	(38,55)
Beban Jasa Lainnya	134.434.179.231	104.560.765.074	28,57
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	10.939.569.997	16.598.611.971	(34,09)
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	20.594.484	182.957.810	(88,74)
Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya	19.659.396	-	-
<b>Jumlah Beban</b>	<b>1.351.965.172.123</b>	<b>1.518.263.706.985</b>	<b>(166.298.534.862)</b>
Pengembalian	(303.076.819)	(219.508.980)	(83.567.839)
<b>Jumlah</b>	<b>1.351.662.095.304</b>	<b>1.518.044.198.005</b>	<b>(166.382.102.701)</b>

Penurunan beban barang dan jasa utamanya disebabkan karena penurunan Beban Honor Output Kegiatan karena pembatasan pemberian Honor Output Kegiatan sesuai Standar Biaya Masukan tahun 2021. Sedangkan penurunan Beban Barang Non Operasional

disebabkan karena penurunan jumlah karyawan dimasa pandemi Covid-19, dan penurunan Beban Barang Non Operasional – Penanganan Pandemi Covid-19 utamanya disebabkan karena relokasi anggaran tes swab antigen ke MAK perjalanan dinas.

Tabel 94 Perbandingan Beban Barang dan Jasa pada LO dan LRA per 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah)

Uraian Jenis Beban	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
Beban Keperluan Perkantoran	31.780.624.661	31.180.320.858	600.303.803,00
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	236.109.654	236.560.654	(451.000,00)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	4.086.548.000	4.129.070.000	(42.522.000,00)
Beban Barang Operasional Lainnya	19.389.067.413	17.893.014.513	1.496.052.900,00
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	20.447.032.584	20.313.089.060	133.943.524,00
Beban Bahan	19.423.039.173	19.270.172.251	152.866.922,00
Beban Honor Output Kegiatan	15.180.268.808	15.196.490.559	(16.221.751,00)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	123.656.903.101	108.634.823.497	15.022.079.604,00
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	123.823.692	25.237.692	98.586.000,00
Beban Langganan Listrik, Air dan Telepon	7.337.579.523	7.359.679.870	(22.100.347,00)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1.330.729.785	1.256.766.385	73.963.400,00
Beban Jasa Pos dan Giro	3.654.000	3.654.000	-
Beban Jasa Konsultan	836.045.135.794	178.806.014.177	657.239.121.617,00
Beban Sewa	111.761.170.285	110.519.035.262	1.242.135.023,00
Beban Jasa Profesi	15.749.482.042	15.752.129.042	(2.647.000,00)
Beban Jasa Lainnya	134.434.179.731	133.224.362.613	1.209.817.118,00
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	10.939.569.997	10.296.849.953	642.720.044,00
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	20.594.484	-	20.594.484,00
Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya	19.659.396	-	19.659.396,00
Jumlah Beban	1.351.965.172.123	674.097.270.386	677.867.901.737
Pengembalian	(303.076.819)	(303.076.819)	-
<b>Jumlah</b>	<b>1.351.662.095.304</b>	<b>673.794.193.567</b>	<b>677.867.901.737</b>

Perhitungan selisih nilai dari tabel di atas adalah sebagai berikut:

Tabel 95 Selisih nilai Barang dan Jasa pada LO dan LRA  
per 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah)

<b>Saldo Belanja Barang dan Jasa - LRA</b>		673.794.193.567
<b>Penambah</b>		
Saldo Belanja Barang dan Jasa - LRA		
Penambah		
Beban Keperluan Perkantoran	600.303.803	
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	133.943.524	
Beban Bahan	152.866.922	
Beban Barang Non Operasional Lainnya	15.022.079.604	
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	98.586.000	
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	73.963.400	
Beban Jasa Konsultan	657.239.121.617	
Beban Sewa	1.242.135.023	
Beban Jasa Lainnya	1.209.817.118	
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	642.720.044	
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	20.594.484	
Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya	19.659.396	
Beban Barang Operasional Lainnya	1.496.052.900	
Jumlah Penambah	677.951.843.835	
<b>Pengurang</b>		
Beban Jasa Profesi	2.647.000	
Beban Air, Listrik, Telepon	22.100.347	
Beban Honor Output Kegiatan	16.221.751	
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	451.000	
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	42.522.000	
Jumlah Pengurang	83.942.098	
Total Tambah/Kurang		677.867.901.737
<b>Saldo Beban Barang dan Jasa - LO</b>		<b>1.351.662.095.304</b>

Secara umum perbedaan Beban Barang dan Jasa antara LO dan LRA disebabkan karena jurnal balik transaksi akrual berupa karyawan TA 2020, Pembebanan Aset *Ekstrakomtable*, Belanja yang Masih Harus Dibayar, transaksi atas Belanja Jasa Konsultan yang bersumber dari Hibah Langsung Jasa, transaksi belanja dari hibah langsung uang yang belum disahkan, jurnal otomatis Aplikasi SAKTI, jurnal koreksi atas lisensi berlangganan Model Outlook Macro Ekonomi sejak tahun 2017, dan jurnal koreksi nilai aset atas pemeliharaan *software* (NUP 279&280) Pentana Audit Management System tahun 2020 dan 2021

Beban  
Pemeliharaan  
Rp23.727.944.458,00

#### D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp23.727.944.458,00 dan Rp17.953.512.020,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 96 Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan  
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.726.308.715	6.666.781.894	0,89
Beban Asuransi Gedung dan Bangunan	167.843.196	47.290.339	254,92
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	16.148.239.186	11.665.362.108	38,43
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.663.000	-	-
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	679.456.501	254.005.399	167,50
Beban Persediaan suku cadang	2.433.860	19.497.990	(87,52)
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	-	1.125.000	(100,00)
<b>Jumlah Beban</b>	<b>23.727.944.458</b>	<b>18.654.062.730</b>	<b>27,20</b>
Pengembalian	-	(700.550.710)	-
<b>Jumlah</b>	<b>23.727.944.458</b>	<b>17.953.512.020</b>	<b>32,16</b>

Peningkatan Beban Pemeliharaan di tahun anggaran 2021 disebabkan karena peningkatan akun Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang meliputi belanja pemeliharaan Kebersihan Gedung dan Taman serta Pemberantasan Hama Rutin. Sedangkan kenaikan Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin antara lain disebabkan karena kenaikan belanja untuk pemeliharaan peralatan ruang rapat, lift, cctv, pemadam kebakaran (aerosol), *plumbing*, system tata udara hingga BBM kendaraan dinas pejabat dan operasional.

Belanja Persediaan untuk Pemeliharaan Barang mengalami kenaikan karena transaksi pemeliharaan Gedung wisma bakrie berupa pemeliharaan gedung kantor Menteri Bappenas, renovasi gedung wisma bakrie 2 dan rumah dinas menteri di jl. Widya Chandra. Pada tahun 2021, terjadi kesalahan pengklasifikasian akun yang menyebabkan Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina ke akun Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin.

Perbandingan antara saldo Beban Pemeliharaan pada LO dengan LRA adalah sebagai berikut:

Tabel 97 Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan pada LO dan LRA per 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah)

Uraian Jenis Beban	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.726.308.715	6.613.797.600	112.511.115
Beban Asuransi Gedung dan Bangunan	167.843.196	167.843.196	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	16.148.239.186	16.853.929.258	(705.690.072)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.663.000	3.663.000	-
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	679.456.501	-	679.456.501
Beban Persediaan suku cadang	2.433.860	-	2.433.860
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	-	-	-
Jumlah Beban	23.727.944.458	23.639.233.054	88.711.404
Pengembalian	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>23.727.944.458</b>	<b>23.639.233.054</b>	<b>88.711.404</b>

Perhitungan selisih nilai dari tabel di atas adalah sebagai berikut:

Tabel 98 Selisih nilai Beban Pemeliharaan pada LO dan LRA per 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah)

Saldo Belanja Pemeliharaan - LRA		23.639.233.054
Penambah		
Beban Persediaan untuk Pemeliharaan	679.456.501	
Beban Persediaan Suku Cadang	2.433.860	
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	112.511.115	
Jumlah Penambah	794.401.476	
Pengurang		
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	705.690.072	
Jumlah Pengurang	(705.690.072)	
Total Tambah/Kurang		88.711.404
<b>Saldo Beban Pemeliharaan - LO</b>		<b>23.727.944.458</b>

Perbedaan Beban Pemeliharaan pada LO dan LRA disebabkan karena terdapat pembebanan persediaan bahan untuk pemeliharaan, suku cadang yang berasal dari belanja barang konsumsi.



Beban  
Perjalanan  
Dinas  
Rp166.344.609.514,00

## D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp166.344.609.514,00 dan Rp112.666.543.427,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 99 Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas  
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	59.134.432.181	45.723.525.899	29,33
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.319.100.000	1.635.463.600	(19,34)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	16.094.409.357	18.309.927.610	(12,10)
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID 19	-	3.067.650.000	
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	70.734.327.406	40.834.418.261	73,22
Beban Perjalanan Biasa Luar Negeri	16.218.996.835	3.747.585.332	332,79
Beban Perjalanan Lainnya Luar Negeri	3.383.463.149	364.427.320	828,43
Jumlah Beban	166.884.728.928	113.682.998.022	46,80
Pengembalian	(540.119.414)	(1.016.454.595)	(46,86)
<b>Jumlah</b>	<b>166.344.609.514</b>	<b>112.666.543.427</b>	<b>47,64</b>

Kenaikan beban perjalanan dinas pada Tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya disebabkan terutama karena kelonggaran kebijakan PPKM diakhir tahun.

Adapun perbandingan antara saldo Beban Perjalanan Dinas pada LO dengan LRA adalah sebagai berikut:

Tabel 100 Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas pada LO dan  
LRA per 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah)

Uraian Jenis Beban	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih
Beban Perjalanan Biasa	59.134.432.181	59.174.444.765	(40.012.584)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.319.100.000	1.316.120.000	2.980.000
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	16.094.409.357	16.272.466.492	(178.057.135)
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID 19	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	70.734.327.406	70.409.211.790	325.115.616
Beban Perjalanan Biasa Luar Negeri	16.218.996.835	14.950.653.335	1.268.343.500
Beban Perjalanan Lainnya Luar Negeri	3.383.463.149	3.246.827.096	136.636.053
Jumlah Beban	166.884.728.928	165.369.723.478	1.515.005.450
Pengembalian	(540.119.414)	(540.119.414)	-
<b>Jumlah</b>	<b>166.344.609.514</b>	<b>164.829.604.064</b>	<b>1.515.005.450</b>

Perhitungan selisih nilai dari tabel di atas adalah sebagai berikut:

Tabel 101 Selisih Nilai Beban Perjalanan Dinas pada LO dan LRA  
per 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah)

Saldo Belanja Perjalanan Dinas - LRA		164.829.604.064
Penambah		
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	325.115.616	
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.980.000	
Beban Perjalanan Biasa Luar Negeri	1.268.343.500	
Beban Perjalanan Lainnya Luar Negeri	136.636.053	
Jumlah Penambah	1.733.075.169	
Pengurang		
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	178.057.135	
Beban Perjalanan Biasa	40.012.584	
Pengembalian	-	
Jumlah Pengurang	218.069.719	
Total Tambah/Kurang		1.515.005.450
<b>Saldo Beban Perjalanan Dinas - LO</b>		<b>166.344.609.514</b>

Perbedaan beban perjalanan dinas pada LO dan LRA secara garis besar disebabkan karena pencatatan belanja perjalanan dinas yang masih harus dibayar dan belanja perjalanan dinas dari hibah yang belum disahkan.

*Beban Barang  
untuk Diserahkan  
kepada  
Masyarakat  
Rp50.833.418.800,00*

#### **D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat**

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp50.833.418.800,00 dan Rp98.781.019.703,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 102 Perbandingan Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki	48.005.676.094	18.634.729.494	157,61
Beban Persediaan tanah bangunan untuk dijual atau diserahkan		8.597.374.046	(100,00)
Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau	-	2.695.169.719	(100,00)
Beban Persediaan Peralatan dan Mesin untuk dijual atau	2.828.740.610	46.785.182.527	(93,95)
Beban Persediaan Aset Lain-lain untuk diserahkan kepada	-	24.878.944.149	(100,00)
<b>Jumlah Beban</b>	<b>50.834.416.704</b>	<b>101.591.399.935</b>	<b>(49,96)</b>
Pengembalian	(997.904)	(2.810.380.232)	-
<b>Jumlah</b>	<b>50.833.418.800</b>	<b>98.781.019.703</b>	<b>(49,96)</b>

Penurunan Beban Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat dikarenakan telah dilakukan penyelesaian dalam bentuk serah terima kepada masyarakat.

*Beban Penyusutan dan Amortisasi*  
Rp 85.992.372.351,00

#### D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp85.992.372.351,00 dan Rp82.088.076.115,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 103 Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian Jenis Penyusutan dan Amortisasi	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	70.534.492.422	65.568.041.506	7,57
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	7.944.569.626	7.812.767.571	1,69
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	190.242.011	181.345.013	4,91
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	26.565.653	722.834.835	(96,32)
<b>Jumlah Penyusutan</b>	<b>78.695.869.712</b>	<b>74.284.988.925</b>	<b>5,94</b>
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	7.296.502.819	7.803.087.190	(6,49)
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	-	-	-
<b>Jumlah Amortisasi</b>	<b>7.296.502.819</b>	<b>7.803.087.190</b>	<b>(6,49)</b>
<b>Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>85.992.372.531</b>	<b>82.088.076.115</b>	<b>4,76</b>

Beban Penyusutan dan Amortisasi mengalami peningkatan yang signifikan pada Beban Amortisasi Software dikarenakan pembelian software pada tahun berjalan.

Beban Penyisihan  
Piutang  
Tak Tertagih  
Rp 0,00

### D.9. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp2.680.165,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 104 Perbandingan Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

(Dalam Rupiah)

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang-Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar	-	51.805	(100,00)
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	-	631.579	-
Beban Penyisihan Piutang PNB	-	1.996.781	-
<b>Jumlah Penyisihan</b>	<b>-</b>	<b>2.680.165</b>	<b>(100,00)</b>

Penurunan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih disebabkan karena tidak adanya transaksi piutang PNB di tahun 2021.

Pendapatan  
Pelepasan Aset  
Non Lancar  
Rp351.698.999,00

### D.10. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Pendapatan pelepasan aset non lancar per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp351.698.999,00 dan Rp512.878.889,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 105 Perbandingan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

(Dalam Rupiah)

Uraian Jenis Pendapatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	-	-
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	351.698.999	512.878.889	-
<b>Jumlah</b>	<b>351.698.999</b>	<b>512.878.889</b>	<b>(31,43)</b>

Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin pada Tahun 2021 berupa pelepasan Perkakas Kantor Lainnya/Scrap di Gudang Jatisampurna dan Peralatan Mesin di Gudang Grogol.

Penurunan Pendapatan pelepasan aset non lancar disebabkan karena berkurangnya pelepasan peralatan dan mesin dibandingkan TA 2020.

Adapun perbandingan antara saldo Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar pada LO dengan LRA adalah sebagai berikut:

Tabel 106 Perbandingan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar pada LO dan LRA per 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah)

Uraian Jenis Pendapatan	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	-	-
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	351.698.999	777.698.999	(426.000.000)
<b>Jumlah</b>	<b>351.698.999</b>	<b>777.698.999</b>	<b>(426.000.000,00)</b>

Perbedaan Saldo Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar antara LO dan LRA berasal dari pencatatan penerimaan Penjualan Peralatan dan Mesin tanpa lelang pada tahun 2020 yang baru disetorkan pada awal tahun 2021 senilai Rp426.000.000,00.

*Beban Pelepasan Aset Non Lancar Rp446.023.636,00*

#### D.11. Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Beban dari pelepasan aset non lancar per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp446.023.636,00. dan Rp137.500.909,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 107 Realisasi Beban Pelepasan Aset Non Lancar

(Dalam Rupiah)

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Kerugian Pelepasan Aset	446.023.636	137.500.909	-
<b>Jumlah</b>	<b>446.023.636</b>	<b>137.500.909</b>	<b>-</b>

Kenaikan Beban Pelepasan Aset Non Lancar disebabkan karena dilakukannya penghapusan barang dari lelang pada Gudang Grogol dan Jatisampurna yang dilakukan pada TA 2021.

Tabel 108 Perbandingan Beban Pelepasan Aset Non Lancar antara LO dan LRA per 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah)

Uraian Jenis Beban	LO	LRA	Selisih
Beban Kerugian Pelepasan Aset	446.023.636	-	446.023.636,00
<b>Jumlah</b>	<b>446.023.636</b>	<b>0</b>	<b>(446.023.636)</b>

Secara umum, perbedaan Saldo Beban Pelepasan Aset Non Lancar antara LO dan LRA berasal dari pencatatan kerugian pelepasan aset. Beban Pelepasan Aset Non Lancar meliputi akun yang bersifat akrual sehingga tidak muncul pada LRA.

Pendapatan dari  
Kegiatan Non  
Operasional  
Rp1.668.705.806

#### D.12. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp1.668.705.806,00 dan Rp8.994.562.362,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 109 Perbandingan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian Jenis Pendapatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik (turun) %
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	141.605.392	66.258.848	113,72
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	978.902.148	1.995.640.499	(50,95)
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	2.106.000	6.655.285.462	(99,97)
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	81.372.500	-	-
Beban Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	-	35.000.000	(100,00)
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	464.719.766	242.377.553	-
<b>Jumlah</b>	<b>1.668.705.806</b>	<b>8.994.562.362</b>	<b>(81)</b>

Penurunan yang signifikan pada akun Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya terjadi karena penurunan Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan yang disebabkan adanya perubahan metode perhitungan persediaan pada aplikasi SAKTI dari metode HST (Harga Satuan Terakhir) ke metode FIFO.

Adapun perbandingan antara saldo Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada LO dengan LRA adalah sebagai berikut:

Tabel 110 Perbandingan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada LO dan LRA per 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah)

Uraian Jenis Pendapatan	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	141.605.392	140.473.826	1.131.566
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	978.902.148	1.430.065.952	(451.163.804)
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	17.029.861	(17.029.861)
Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	2.106.000	-	2.106.000
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	81.372.500	-	81.372.500
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	464.719.766	-	464.719.766
<b>Jumlah</b>	<b>1.668.705.806</b>	<b>1.587.569.639</b>	<b>81.136.167</b>

Perhitungan selisih nilai dari tabel di atas adalah sebagai berikut:

Tabel 111 Selisih Nilai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

(Dalam Rupiah)

Saldo Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya- LRA	1.587.569.639
Penambah	
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	81.372.500
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	2.106.000
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	464.719.766
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	1.131.566
Jumlah Penambah	549.329.832
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	451.163.804
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	17.029.861
Jumlah Pengurang	468.193.665
Total Tambah/Kurang	81.136.167
<b>Saldo Beban Persediaan - LO</b>	<b>1.668.705.806</b>

Perbedaan saldo pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya antara LO dan LRA disebabkan karena transaksi penerimaan atas pengembalian belanja TAYL, transaksi koreksi tambah nilai persediaan akibat kesalahan pembukuan nilai, selisih kurs yang belum terealisasi dan pendapatan perolehan aset lainnya.

Beban dari  
Kegiatan Non  
Operasional  
Lainnya  
Rp1.259.194.546,00

### D.13. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Beban dari kegiatan non operasional lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp1.259.194.546,00 dan Rp9.266.332.781,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 112 Perbandingan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya  
(Dalam Rupiah)

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik (turun) %
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	18.967.900	6.145.870.682	(99,69)
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	1.145.523.785	2.841.873.479	(59,69)
Beban Persediaan Rusak/Usang	94.702.861	278.588.620	
<b>Jumlah</b>	<b>1.259.194.546</b>	<b>9.266.332.781</b>	<b>(86,411)</b>

Penurunan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya disebabkan karena perubahan metode penilaian persediaan dari metode HST (Harga Satuan Terakhir) menjadi metode FIFO.

Tabel 113 Perbandingan Beban dari Kegiatan Non Operasional  
Lainnya antara LO dan LRA per 31 Desember 2021

Uraian Jenis Beban	LO	LRA	Selisih
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	18.967.900	-	18.967.900,00
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	1.145.523.785	-	1.145.523.785,00
Beban Persediaan Rusak/Usang	94.702.861	-	94.702.861,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.259.194.546</b>	<b>0</b>	<b>(1.259.194.546)</b>

Perbedaan Saldo Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya antara LO dan LRA berasal dari pencatatan kerugian selisih kurs yang belum terealisasi. Beban dari Kegiatan non Operasional Lainnya meliputi akun yang bersifat akrual sehingga tidak muncul pada LRA.

Pos Luar Biasa  
Rp0,00

### D.14. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.



## E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal*  
Rp2.659.028.591.533,00

### E.1. Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp 2.659.028.591.533,00 dan Rp2.629.750.217.776,00.

*Defisit LO*  
Rp(1.846.374.866.249,00)

### E.2. Surplus (Defisit) LO

Jumlah (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp(1.846.243.954.580,00) dan Rp(1.991.480.239.369,00).

*Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas*  
Rp(1.988.988.723,00)

### E.3 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp(1.988.988.723,00) dan Rp(55.929.612.705,00). Rincian Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas terdiri dari:

Tabel 114 Rincian Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas  
(Dalam Rupiah)

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	Nilai
Kebijakan/Kesalahan Mendasar	-
Penyesuaian Nilai Aset	-
Koreksi Nilai Persediaan	16.861.900
Koreksi atas Reklasifikasi	(920.000)
Selisih Revaluasi Aset	-
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	(2.016.248.984)
Koreksi Lain-lain	11.318.361
<b>Jumlah</b>	<b>(1.988.988.723)</b>

*Penyesuaian Nilai Aset*  
Rp0,00

#### E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Selisih Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

*Koreksi Nilai Persediaan*  
Rp16.861.900,00

#### E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp16.861.900,00 dan Rp0,00. Koreksi Nilai Persediaan muncul akibat adanya transaksi

perubahan nilai persediaan dikarenakan adanya kesalahan pembukuan. Berikut merupakan rincian Koreksi Nilai Persediaan per Satker:

Tabel 115 Rincian Koreksi Nilai Persediaan Per Satker  
(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas	16.861.900
<b>Jumlah</b>		<b>16.861.900</b>

Koreksi atas  
Reklasifikasi  
Rp(920.000,00)

### E.3.3 Koreksi atas Reklasifikasi

Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp(920.000,00) dan Rp2.808.800,00. Koreksi atas reklasifikasi merupakan transaksi yang muncul akibat proses koreksi atas aset yang sudah direklasifikasi akibat kesalahan penggunaan akun. Nilai Rp(920.000,00) berasal dari Satker Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas.

Selisih Revaluasi  
Aset Tetap  
Rp0,00

### E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp57.006.925.695,00.

Koreksi Nilai Aset  
Non Revaluasi  
Rp(2.016.248.984,00)

### E.3.5 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp(2.016.248.984,00) dan Rp(195.763.386,00). Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi terdiri dari :

Tabel 116 Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi  
(Dalam Rupiah)

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	Nilai
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(821.992.077)
Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	(1.194.256.907)
<b>Jumlah</b>	<b>(2.016.248.984)</b>

Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi per Satker terdiri dari:

Tabel 117 Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas	(2.009.521.230)
2	Majelis Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/ICCTF	(6.727.754)
<b>Jumlah</b>		<b>(2.016.248.984)</b>

Koreksi Lain-Lain  
Rp11.318.361,00

### E.3.6 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp11.318.361,00 dan Rp(884.358.404,00). Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara. Berikut rincian transaksi koreksi lainnya berdasarkan satker:

Tabel 118 Rincian Koreksi Lainnya Berdasar Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas	11.318.361
2	Majelis Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/ICCTF	-
<b>Jumlah</b>		<b>11.318.361</b>

Berikut merupakan perhitungan Koreksi Lain-lain untuk Satker Bappenas:

Tabel 119 Rincian Koreksi Lain-lain Satker Bappenas

(Dalam Rupiah)

Koreksi Lainnya	Nilai
Jurnal manual untuk mengeliminasi penyisihan BOT	1.980.261
Jurnal manual untuk mengeliminasi penyisihan BOT Piutang Lainnya PPK DM III (pengembalian Bank Garansi)	537.499
Jurnal manual untuk mengeliminasi Penyisihan Piutang Lainnya PPK DM V (Pengembalian Bank Garansi)	94.080
Jurnal manual untuk mengeliminasi Penyisihan Sewa Koperasi tanggal 16 Desember s/d 31 Desember 2020	16.520
Jurnal Penyesuaian Pengembalian Temuan BPK Kegiatan FMSRB Tahun Anggaran 2019 ke Kas Negara	8.690.000
Jurnal Balik Selisih Kurs TA 2020	1
<b>Jumlah</b>	<b>11.318.361</b>

Transaksi Antar  
Entitas  
Rp1.805.957.118.082,00

### E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar

Rp1.805.957.118.082,00 dan Rp1.964.829.000.421,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Tabel 120 Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

(Dalam Rupiah)

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	1.140.697.791.326
Diterima Dari Entitas Lain	(3.335.323.238)
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	(10.160.494.013)
Pengesahan Hibah Langsung	679.104.390.189
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	(349.246.182)
<b>Jumlah</b>	<b>1.805.957.118.082</b>

*Ditagihkan ke  
Entitas Lain  
Rp1.140.697.791.326,00*

#### **E.4.1 Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)/Diterima dari Entitas Lain (DDEL)**

*Diterima dari  
Entitas Lain  
Rp(3.335.323.238,00)*

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja KL yang melibatkan Bendahara Umum Negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2021, DKEL sebesar Rp1.140.697.791.326,00 sedangkan DDEL sebesar Rp(3.335.323.238,00).

Rincian DKEL per Satker terdiri dari :

Tabel 121 Rincian Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) per Satker  
(Dalam Rupiah)

Satker	Nilai
Kantor Menteri PPN/Bappenas	1.050.912.743.774
Bappeda Provinsi Jawa Tengah	816.747.992
Bappeda Provinsi DIY	294.767.500
Bappeda Provinsi Jawa Timur	170.047.000
Bappeda Provinsi Aceh	276.582.056
Bappeda Provinsi Sumatera Utara	368.603.450
Bappeda Provinsi Sumatera Barat	199.540.600
Bappeda Provinsi Riau	437.268.550
Bappeda Provinsi Jambi	355.631.832
Bappeda Provinsi Sumatera Selatan	754.694.437
Bappeda Provinsi Lampung	536.054.000
Bappeda Provinsi Kalimantan Barat	579.062.351
BAPPEDA, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	188.786.408
Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan	340.012.000
BAPPEDA PROP.KALTIM	633.842.000
Bappeda Provinsi Sulawesi Utara	571.522.200
Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah	426.230.642
Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan	140.701.967
Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara	438.641.015
Bappeda Provinsi Maluku	423.599.013
Bappeda Provinsi Bali	503.084.820
Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat	274.338.300
Bappeda Provinsi NTT	819.462.785
Bappeda Provinsi Bengkulu	649.488.000
Bappeda Provinsi Maluku Utara	652.230.855
Bappeda Provinsi Banten	150.432.000
Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	387.846.829
Bappeda Provinsi Gorontalo	780.094.646
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	391.519.195
Bappeda Provinsi Sulawesi Barat	672.687.350
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN KALIMANTAN UTARA	440.437.123
Majelis Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/ICCTF	76.111.090.636
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 1.140.697.791.326</b>

Rincian Diterima dari Entitas Lain (DDEL) per Satker terdiri dari :

Tabel 122 Rincian Diterima dari Entitas Lain (DDEL) per Satker

Satker	Jumlah
Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas	(3.334.676.205)
Majelis Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/ICCTF	-
Bappeda Provinis Sulawesi Selatan	(647.033)
	<b>(3.335.323.238)</b>

Nilai DKEL sebesar Rp1.140.697.791.326,00 berasal dari seluruh transaksi belanja yang telah terbit SP2D dikurangi pengembaliannya SSPB. Sedangkan nilai DDEL sebesar Rp(3.335.323.238,00)

merupakan seluruh setoran penerimaan ke Bendahara Umum Negara melalui setoran SSBP.

Transfer Masuk  
Rp0,00 /  
Transfer Keluar  
Rp(10.160.494.013,00)

#### E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer masuk/transfer keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL, dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp(10.160.494.013,00).

Rincian Transfer Keluar diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 123 Rincian Transfer Keluar per Satker

No	Satker	Nilai
1.	Kementerian PPN/Bappenas	(10.160.494.013)
2.	Majelis Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/ICCTF	-
<b>Jumlah</b>		<b>(10.160.494.013)</b>

Nilai Transfer Keluar sebesar Rp(10.160.494.013,00). merupakan :

1. Transfer keluar dari Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas kepada Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara berupa Peralatan dan Mesin senilai Rp(755.015.069,00), Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin senilai Rp476.165.994,00, dan Aset Tetap Renovasi senilai Rp(9.498.715.398,00).
2. Transfer keluar dari Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas untuk Direktorat Bina Penataan Bangunan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berupa Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan senilai Rp(402.294.000,00), dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan senilai Rp19.364.460,00

Pengesahan Hibah Langsung  
Rp679.104.390.189,00

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung  
Rp(349.246.182,00)

### E.4.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp679.104.390.189,00 sedangkan untuk Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp349.246.182,00.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung per Satker adalah sebagai berikut:

Tabel 124 Rincian Pengesahan Hibah Langsung per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas	679.104.390.189
<b>Jumlah</b>		<b>679.104.390.189</b>

Berikut merupakan daftar hibah langsung yang sudah disahkan hingga periode Desember 2021:

Tabel 125 Daftar Hibah Langsung Sudah Disahkan  
per 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah)

No	No Register	Kegiatan Donor	Belanja Hibah	No. MPHL/SPHL	Nominal
1	27MAMT9A	Global Sustainable Supply Chain for Marine Commodities (GMC) - UNDP	Belanja Jasa	81097977625722243	511.986.961
2	2KEC23UA	Sustainable Infrastructure Assistance Program (SIAP) Phase II - ADB	Belanja Jasa	81218230649765030	11.426.196.027
3	71125701	ICBDA Papua - USAID	Belanja Barang	81218138649764572	1.035.602.645
4	71125701	SCAA Papua - USAID	Belanja Barang	81218153649764571	662.035.000
5	71125701	Sustainable Cooperative Agribusiness Alliance (SCAA) Sulsel - USAID	Belanja Barang	081218164649764570	499.785.000
6	2QR18DFA	Knowledge Sector Initiative (KSI) Phase II - DFAT	Belanja Jasa	81218172649765031	14.628.476.512
7	27VDG2UA	Project for Development of Regional Disaster Risk Resilience Plan in Central Sulawesi - JICA	Belanja Jasa	81244727654073197	72.738.000.000
8	2ANAKPPA	ARISE Plus – Indonesia Trade Support Facility (TSF)	Belanja Jasa	812619406581211021	15.193.555.574
9	27MAMT9A	Global Sustainable Supply Chain for Marine Commodities (GMC) - UNDP	Belanja Jasa	81276585658328304	865.930.105
10	2FR4C6KA	Indonesia - Australia Partnership for Infrastructure Facility (KIAT) - DFAT	Belanja Jasa	81280405662427566	52.122.441.566
11	2QR18DFA	Knowledge Sector Initiative (KSI) Phase II - DFAT	Belanja Barang	01301704663593813	332.221.850
12	2QR18DFA	Knowledge Sector Initiative (KSI) Phase II - DFAT	Belanja Jasa	081301706663593809	16.936.849.254
13	26XPYRCA	Proyek Innovation and Investment for Inclusive and Sustainable Economic Development (ISED)	Belanja Barang	81355008676274881	205.746.115
14	29JPW1VA	Proyek Australia Indonesia Partnership for Justice phase II (AIPJ2) - DFAT	Belanja Jasa	81360842676274887	649.845.840
15	23TSV7CA	Proyek Australia Indonesia Partnership for Economic Development (PROSPERA) - DFAT	Belanja Jasa	81343580676274884	18.838.429.045
16	2VBMK3A	Proyek KOMPAK - DFAT	Belanja Jasa	81326594676274886	21.831.926.340
17	2RF9M19A	Pertumbuhan Hijau Fase II - GGGI	Belanja Jasa	81371173677110042	8.663.530.366
18	27MAMT9A	Global Sustainable Supply Chain for Marine Commodities (GMC) - UNDP	Belanja Jasa	081371174677110043	778.846.756



No	No Register	Kegiatan Donor	Belanja Hibah	No. MPHL/ SPHL	Nominal
19	22JAP1VA	SDGs SSTC - GIZ	Belanja Jasa	81382466682615209	6.036.496.549
20	2NNZYN8A	NSLIC/NSELRED - GAC	Belanja Jasa	081382597682615206	24.231.371.314
21	238F2MTA	Joint Analysis for Helath Development Planning - WHO	Belanja Jasa	81412801692063611	828.084.411
22	26XPYRCA	ISED - GIZ	Belanja Jasa	814343826920063610	15.041.512.048
23	2UXLX1GA	Monitoring, Reporting, and Verification (MRV) - GIZ	Belanja Jasa	81434383692063609	9.547.807.005
24	2162E4GA	LEOPALD - GIZ	Belanja Jasa	81434387692063612	5.315.137.830
25	27MAMT9A	Global Sustainable Supply Chain for Marine Commodities (GMC) - UNDP	Belanja Jasa	81444551692063613	1.384.090.192
26	2UXLX1GA	Monitoring, Reporting, and Verificator for Mitigation Measures in Indonesia (MRV MMI) - GIZ	Belanja Barang	81444677693451783	299.668.919
28	2KC3LSVA	Bangun Indonesia untuk Jaga Alam demi Keberlanjutan (BIJAK) - USAID	Belanja Jasa	81535352701099789	37.644.427.240
29	2QR18DFA	Knowledge Sector Initiative (KSI) Phase II - DFAT	Belanja Jasa	81535309701099788	9.750.052.266
30	27MAMT9A	Global Sustainable Supply Chain for Marine Comodities (GMC) - UNDP	Belanja Jasa	81540021702614620	972.693.589
31	22MSEWLA	Clean, Affordable and Secure Energy for South East Asia (CASE) - GIZ	Belanja Jasa	81540024702614622	1.958.668.711
32	2KEC23UA	Sustainable Infrastructure Assistance Program (SIAP) Phase II - ADB	Belanja Jasa	81540025702614619	24.271.842.671
33	2FR4C6KA	Indonesia-Australia Partnership for Infrastructure Facility (KIAT) - DFAT	Belanja Jasa	81540027702614621	57.577.950.496
34	2UZW4NKA	Emission Reduction in Cities through Improved Waste Management (DKTI WASTE) - (GIZ)	Belanja Jasa	81540028702614617	950.352.173
35	26QQTPZA	Indonesia Urban Water, Sanitation and Hygiene (IUWASSH) - USAID	Belanja Jasa	81542002702907178	21.711.189.728
36	26QQTPZA	Clean Cities Blue Ocean (CCBO) - USAID	Belanja Jasa	81542008702760275	1.483.853.962
37	2VMBK3A	Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) - DFAT	Belanja Jasa	81542741702760273	41.651.511.404
38	2B1PS66A	Strengthening Framework of Implementation of Sustainable Development Goals (SDGs) - JICA	Belanja Jasa	81542745702760276	13.887.516.000
39	22X7BKZA	Capacity Development for Implementation of Climate Change Strategies Phase II (ICCS Phase II) -	Belanja Jasa	81542752702760274	2.301.000.000
40	25AMMFAA	The Field Support Services (FSS) - Global Affairs Canada	Belanja Jasa	81540028702614617	9.813.218.512
41	276S46YA	Climate Impact Response and Biodiversity Management Planning in Indonesia (ClimB)- GIZ	Belanja Jasa	81546694702907177	3.534.262.349

No	No Register	Kegiatan Donor	Belanja Hibah	No. MPH/ SPHL	Nominal
42	22X7BKZA	Capacity Development for Implementation of Climate Change Strategies Phase II (ICCS Phase II) - JICA	Belanja Jasa	81546742702914380	1.611.643.350
43	27VDG2UA	Development of Regional Disaster Risk Resilience Plan in Central Sulawesi (DR DRRP) - JICA	Belanja Barang	81546954702914383	384.615.000
44	26XPYRCA	ISED - GIZ	Belanja Barang	81547179702914381	80.012.250
45	2K9AHR3A	Global Future Cities Programme (GFCP) - FCBO	Belanja Jasa	81547246702907179	50.205.319.947
46	2F5C52EA	Compact Development Funding (CDF) - MCC	Belanja Jasa	81551160702935407	146.558.176
47	2F5C52EA	Compact Development Funding (CDF) - MCC	Belanja Jasa	81551164702935412	848.811.300
48	2L4S726A	Program Kerjasama Pemerintah RI-UNFPA Siklus 10	Belanja Jasa	81613414704784749	7.959.871.690
49	24BX2GYA	Social Protection Programme (SPP) - GIZ	Belanja Jasa	81613465704784747	17.617.187.471
50	2QXCZ3A	Proyek Programme Document/ProDoc Bappenas - UNICEF	Belanja Jasa	81613545704784748	53.584.450.512
51	2KC1Y8LA	Hibah Langsung Uang - READSI	Langsung Uang	21140000000108	5.570.000.000
52	2QXCZ3A	Hibah Langsung Uang - UNICEF	Langsung Uang	21140000000111	8.443.283.468
53	2L4S726A	Hibah Langsung Uang - UNFPA	Langsung Uang	21140000000110	4.538.524.700
<b>TOTAL</b>					<b>679.104.390.189</b>

Hibah Langsung Barang/Jasa yang sudah disahkan ada yang berkaitan dengan penanganan pandemi Covid-19 sebesar Rp302.784.990,00 terdiri dari hibah UNICEF sebesar Rp297.717.000,00, hibah READSI sebesar Rp3.714.990,00 dan hibah UNFPA sebesar Rp1.354.000,00. Rincian Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung adalah sebagai berikut.

Tabel 126 Rincian Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung per Satker

(Dalam Rupiah)

NO	Satker	Nilai
1	Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas	(349.246.182)
2	Majelis Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/ICCTF	-
<b>Jumlah</b>		<b>(349.246.182)</b>

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung berasal dari Hibah Langsung Uang – UNICEF sebesar Rp349.246.182,00 dengan nomor SP4HL 211400601370001.

*Ekuitas Akhir*  
Rp2.616.752.766.312,00

#### **E.5. Ekuitas Akhir**

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp2.616.752.766.312,00 dan Rp2.659.028.591.533,00.

## F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

### Pengungkapan Lain-lain

#### F.1. Pengungkapan Lain-lain

Selain data keuangan yang telah diungkapkan diatas, terdapat beberapa informasi terkait data keuangan dan non keuangan dengan perincian sebagai berikut:

1. Penyusunan Laporan Keuangan TA 2021 Kementerian PPN/Bappenas disusun berdasarkan basis akrual dengan menggunakan aplikasi dari Kementerian Keuangan yaitu Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
2. Kementerian PPN/Bappenas pada Tahun Anggaran 2021 melakukan revisi DIPA (termasuk revisi administrasi) sebanyak 11 (sebelas) kali, Revisi DIPA dilakukan karena refocusing, realokasi, serta penambahan pagu anggaran Hibah Langsung Uang Luar Negeri;
3. Peralatan dan mesin berupa kendaraan dinas bermotor sebanyak 19 unit telah direklas menjadi barang rusak berat dan dalam proses penetapan jadwal pelaksanaan lelang oleh KPKNL Bekasi sesuai surat Kepala Biro Umum nomor 16431/PL.08.01/B.05/T/12/2021 tanggal 10 Desember 2021 hal Permohonan Penetapan Jadwal Pelaksanaan Lelang Barang Milik Negara pada Satuan Kerja Kementerian PPN/Bappenas; dan
4. Peralatan dan mesin berupa Lift, AC Sentral, dan UPS sebanyak 18 unit telah direklas menjadi barang rusak berat dan dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Direktorat Jenderal dari KPKNL Jakarta I, sesuai surat Kepala KPKNL Jakarta I nomor S-2624/WKN.07/KNL.01/2021 tanggal 23 September 2021 hal Penyampaian Hasil Penilaian BMN pada Kementerian PPN/Bappenas serta nomor S-2648/WKN.07/KNL.01/2021 tanggal 27 September 2021 hal Penyampaian Ralat Hasil Penilaian BMN

pada Kementerian PPN/Bappenas dan dalam proses penentuan nilai limit.

## **F.2. Sertifikasi PPK dan Bendahara**

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Penilaian Kompetensi Bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sejumlah 20 PPK TA 2021 pada Satker Bappenas, 1 PPK Satker ICCTF dan 3 PPK pada Satker Dana Dekonsentrasi telah memiliki sertifikat kompetensi.

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.05/2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, seluruh Bendahara TA 2021 pada Satker Bappenas, 1 (satu) Bendahara pada Satker ICCTF dan 28 Bendahara pada Satker Dana Dekonsentrasi telah memiliki sertifikat kompetensi.

## **F.3. Rekening Pemerintah**

Dalam penyelenggaraan Bagian Anggaran 055, satuan kerja pusat/KP memiliki 1 rekening Bendahara Pengeluaran dan 22 rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu yang digunakan dan dipertahankan sedangkan pada satuan kerja Dekonsentrasi/DK memiliki 32 rekening Bendahara Pengeluaran yang digunakan dan dipertahankan serta satker ICCTF memiliki 1 rekening Bendahara Pengeluaran yang digunakan dan dipertahankan.

Dalam rangka menindaklanjuti PMK No.183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian/Lembaga, pada bulan Desember 2020, Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan restrukturisasi atas 52 dari total 58 rekening (termasuk MCC dan KNKS yang telah dilikuidasi) pengeluaran giro menjadi rekening pengeluaran *virtual* (*Virtual Account*).

Empat rekening pengeluaran belum dilakukan restrukturisasi menjadi rekening virtual dikarenakan dua satker belum melengkapi data yang dibutuhkan untuk proses restrukturisasi rekening dan dua satker memiliki akun rekening pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang belum menjadi mitra pengelola rekening pengeluaran Direktorat Jenderal Perbandaharaan.

#### F.4. Informasi Pandemi Covid-19

Sampai dengan Periode 31 Desember Tahun Anggaran 2021 realisasi Akun Belanja Pandemi COVID 19 adalah sebagai berikut:

Tabel 127 Informasi Pandemi Covid-19

(Dalam Rupiah)

No	Nama Satker	Kode Akun	Pagu	Realisasi	Persentase
1	KANTOR MENTERI NEGARA PPN / BAPPENAS	521131	20.598.501.000	20.226.797.637	98,20
	ICCTF		82.950.000	66.666.918	80,37
	Bappeda Aceh		10.800.000	10.800.000	100,00
	Bappeda Sulawesi Tengah		5.444.000	3.500.000	64,29
	Bappeda Bangka Belitung		3.000.000	2.681.000	89,37
	Bappeda Sulawesi Tenggara		4.000.000	1.600.000	40,00
2.	KANTOR MENTERI NEGARA PPN / BAPPENAS	521241	25.238.000	25.237.692	100,00
3	KANTOR MENTERI NEGARA PPN / BAPPENAS	522192	10.303.517.000	10.176.817.953	98,77
	ICCTF		125.000.000	111.502.000	89,20
	Bappeda Jawa Tengah		6.500.000	6.500.000	100,00
	Bappeda Aceh		1.000.000	680.000	68,00
	Bappeda Lampung		5.000.000	1.350.000	27,00
	Bappeda Sulawesi Tengah		10.000.000	0	0,00
4	KANTOR MENTERI NEGARA PPN / BAPPENAS	532119	632.056.000	632.056.000	100,00
<b>Total</b>			<b>31.813.006.000</b>	<b>31.266.189.200</b>	<b>98,28</b>

Nilai sejumlah Rp302.784.990,00 (521131-Belanja Barang Operasional-Penanganan Pandemi Covid-19) dari total realisasi belanja penanganan dampak pandemi Covid-19, merupakan belanja hibah langsung uang luar negeri yang sudah disahkan.

### F.5. Implementasi Kegiatan *Stunting*

Program *Stunting* di Bappenas terbagi menjadi 2 kegiatan yaitu Komponen ABG.108.101 Koordinasi Strategis Gerakan dan Percepatan Perbaikan Gizi dan Komponen ABG.108.104 Hibah *Investing in Nutrition and Early Years Projects* (INEY).

Adapun realisasi atas 2 kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 128 Indikasi Konvergensi Implementasi Kegiatan *Stunting* DIPA Bappenas

*dalam jutaan rupiah*

No	Program/Kegiatan/Output		Pagu	Realisasi	%	
(a)	(b)		(c)	(d)	(e)	
055 01 06	Program Perencanaan Pembangunan Nasional					
	2937	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kesehatan dan Gizi Masyarakat				
		608	Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan			
			Komp. 640 Koordinasi Strategis Gerakan dan Percepatan Perbaikan Gizi	438,657	438,650	100%
			D. Hibah <i>Investing in Nutrition and Early Years Project</i> (INEY)	15.79	11.427	72,37%

Beberapa capaian utama kegiatan antara lain:

- a. finalisasi dokumen Rencana Aksi Pangan dan Gizi;
- b. koordinasi major project *stunting* TA 2022;
- c. koordinasi sistem monitoring dan evaluasi *SUN networks*;
- d. koordinasi *Nutrition for Growth*;
- e. pengembangan *dashboard* monitoring dan evaluasi program percepatan penurunan *stunting* dan interkoneksi data dengan internal Bappenas dan Kemenkeu;
- f. rekonsiliasi penyusunan ringkasan *output* K/L TA 2022 yang mendukung percepatan penurunan *stunting*;
- g. pengembangan sistem penandaan tematik *stunting* pada KRISNA;
- h. finalisasi pedoman praktik baik;
- i. pengelolaan media sosial dan pengembangan website [cegahstunting.id](http://cegahstunting.id);
- j. finalisasi rewiu pelaksanaan DAK *stunting* TA 2020;
- k. bimbingan teknis DAK yang mendukung percepatan penurunan *stunting* kepada pemerintah daerah;

- l. reuiu kinerja anggaran dan pembangunan semester I tahun 2021 program percepatan penurunan *stunting*; dan
- m.rangkaian SUN *Annual Meeting* 2021.

Penyerapan anggaran bersumber dari Hibah INEY yang sebesar 72,37% utamanya karena kegiatan hybrid yang baru dapat dilaksanakan pada bulan Desember 2021 dan proses pengadaan Tenaga Ahli/Konsultan yang memerlukan diskusi yang iteratif dengan *World Bank*.



### F.6. Tuntutan Hukum

Terdapat satu tuntutan hukum Pasca Kerusuhan Maluku-Maluku Utara Tahun 1999 yang telah memiliki hukum tetap (*inkracht*) yang tertuang pada yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Desember 2012 No: 318/PDT.G.Class Action/2011/PN.Jkt.Pst jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 11 Mei 2015 No:116/PDT/2015/PT.DKI jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal tanggal 19 Oktober 2017 No:1950/Pdt/2016 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tanggal 31 Juli 2019 No:451 PK/Pdt/2019 sebagai berikut:

Data Tuntutan Hukum Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht*)

No	Kementerian/ Lembaga	Nomor Perkara dan Deskripsi Perkara	Penggugat	Aanmaning	Upaya Hukum Lanjutan/ Luar Biasa	Gugatan			Pengguguran /DIPA	Keterangan
						Rupiah	Valas	Tanah/ Bangunan		
1	Kementerian PPN/Bappenas	No. Perkara 451/PK/PDT/2019  Pokok gugatan: Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh penyelenggaraan negara dalam hal pelaksanaan ganti rugi harta benda materiil dan immateriil pasca kerusuhan Maluku- Maluku Utara tahun 1999	Penggugat: 1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 2. Gubernur Maluku Utara 3. Menteri Keuangan 4. Kepala Kantor Perwakilan Pemda Provinsi Maluku 5. Gubernur Maluku 6. Gubernur Sulawesi Tenggara 7. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS 8. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 9. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 10. Kepala Kantor Perwakilan Propinsi Maluku Utara 11. Presiden RI 12. Menteri Sosial 13. Kepala Kantor Perwakilan Pemda Sulawesi Tenggara 14. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian			391.451.450.000			0,00	1. Tuntutan ini belum dianggarkan ke dalam DIPA sehingga belum dilakukan pencatatan atas utang. 2. Sudah diungkapkan di Catatan Atas Laporan Keuangan

Atas status tuntutan hukum sebagaimana pada penjelasan di atas masih belum terdapat perkembangan lanjutan mengenai informasi posisi terakhir atas tindak lanjut putusan pengadilan dimaksud antara lain mengenai penganggaran dan nilai tertanggungnya.

Jakarta, Mei 2022

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



Suharso Monoarfa